

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Makum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPDA	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1	_____
2	_____
3	_____

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 – 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 – 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :




1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;

3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, yang menggambarkan:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kahag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- a. Visi dan Misi Bupati, dan
 - b. Tujuan, sasaran yang disertai indikator sasaran, arah kebijakan, dan program daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, program lintas PD, dan program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.



- (2) Isi, uraian dan matrik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran RPJMD bersifat indikatif.

BAB III PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional;
 - d. Merugikan kepentingan nasional yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional; dan/atau
 - e. Sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Paraf Hierarki	(2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Sekda	
Asisten	
Bag	

- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KBTENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Semua program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2016 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya tahun anggaran 2016.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 4 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN


INDARTATO


Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBAR DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 296-5/2016**

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2016

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	1-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-7
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-14
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-27
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-84
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-1
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-8
3.3 KERANGKA PENDANAAN	III-18
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2 ISU - ISU STRATEGIS	IV-10
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 VISI	V-1
5.2 MISI	V-1
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1 PEDOMAN TRANSISI	X-1
10.2 KAIDAH PELAKSANAAN	X-1

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	1-2
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Dokumen Lainnya	I-6
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pacitan	II-1
Gambar 2.2 Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan Tahun 2014	II-2
Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019	IV-12
Gambar 4.2 Peta Pembagian Kawasan Pengembangan	IV-20
Gambar 4.3 Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan	IV-20
Gambar 4.4 Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo	IV-21
Gambar 4.5 Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan	IV-21
Gambar 4.6 Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo	IV-22
Gambar 4.7 Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung	IV-22
Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021	V-2
Gambar 6.1 Delapan Agenda Prioritas Utama (HASTA TAMA) Pembangunan Pacitan 2016-2021	VI-1

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kebag	✓
Hakim	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penrakarsa BAPPEPA	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	




DAFTAR TABEL


		Hal.
Tabel 2.1	Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-2
Tabel 2.2	Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (km ²) Tahun 2014	II-3
Tabel 2.3	Jarak Antar Kecamatan (Km) Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-4
Tabel 2.4	Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-5
Tabel 2.5	Luas Tanah Kering Menurut Jenis Penggunaan (Ha) Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-5
Tabel 2.6	Banyaknya Hujan Bulanan, Hujan Harian Maximum, Hari Hujan dan Rata-rata Hujan Per Bulan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-6
Tabel 2.7	Banyaknya Curah Hujan Per Bulan Menurut Stasiun Hujan di Wilayah Kabupaten Pacitan (mm ³) Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-6
Tabel 2.8	Data Potensi Mineral Kabupaten Pacitan Tahun 2015	II-7
Tabel 2.9	Potensi Pariwisata Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-10
Tabel 2.10	Produksi Perikanan (ton) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-10
Tabel 2.11	Potensi Perindustrian Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-11
Tabel 2.12	Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-rata Penduduk Per Desa dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Tahun 2011-2014 Kabupaten Pacitan	II-12
Tabel 2.13	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014 Kabupaten Pacitan	II-12
Tabel 2.14	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2011-2014 Kabupaten Pacitan	II-13
Tabel 2.15	Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014 Kabupaten Pacitan	II-13
Tabel 2.16	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Utama Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Pacitan	II-14
Tabel 2.17	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan	II-15
Tabel 2.18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan	II-15
Tabel 2.19	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014	II-16
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-22
Tabel 2.21	Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan	II-22
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Mumi (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-23
Tabel 2.23	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2010-2015 Kabupaten Pacitan	II-23
Tabel 2.24	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-24
Tabel 2.25	Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-25
Tabel 2.26	Persentase Penduduk Yang Bekerja Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-25
Tabel 2.27	Jumlah Grup Kesenian Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-26
Tabel 2.28	Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-26
Tabel 2.29	Jumlah Grup Olahraga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-26
Tabel 2.30	Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-27

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kejati	✓
Kepri	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	P.
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	

Tabel 2.31	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-28
Tabel 2.32	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-28
Tabel 2.33	Rasio Guru/Murid Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-29
Tabel 2.34	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-30
Tabel 2.35	Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-30
Tabel 2.36	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-31
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-32
Tabel 2.38	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-36
Tabel 2.39	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-38
Tabel 2.40	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-40
Tabel 2.41	Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-41
Tabel 2.42	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-42
Tabel 2.43	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-43
Tabel 2.44	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-43
Tabel 2.45	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-44
Tabel 2.46	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-44
Tabel 2.47	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-44
Tabel 2.48	Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-44
Tabel 2.49	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk Minimal Dilalui Roda 4 (m) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-45
Tabel 2.50	Panjang Jalan Kabupaten Pacitan Dalam Kondisi Baik > 40 Km/Jam (m) Tahun 2011 - 2015	II-45
Tabel 2.51	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Minimal 1,5m (m) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-46
Tabel 2.52	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-46
Tabel 2.53	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-46
Tabel 2.54	Luas Pemukiman (Ha) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-47
Tabel 2.55	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-47
Tabel 2.56	Penduduk Berakses Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-47
Tabel 2.57	Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-48
Tabel 2.58	Rumah Tangga Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-48
Tabel 2.59	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-48
Tabel 2.60	Rumah Layak Huni (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-48
Tabel 2.61	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-49

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Kaum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Tabel 2.62	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Ditertibkan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-49
Tabel 2.63	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dihasilkan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-49
Tabel 2.64	Persentase RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-50
Tabel 2.65	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-50
Tabel 2.66	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-51
Tabel 2.67	Jumlah Ijin Trayek (Buah) Tahun 2011 - 2015 Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-52
Tabel 2.68	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-52
Tabel 2.69	Jumlah Angkutan Darat (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-52
Tabel 2.70	Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-53
Tabel 2.71	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-53
Tabel 2.72	Pemasangan Rambu-Rambu (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-53
Tabel 2.73	Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-54
Tabel 2.74	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-54
Tabel 2.75	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-54
Tabel 2.76	Kinerja Bidang Lingkungan Hidup 2011-2015 Kabupaten Pacitan	11-55
Tabel 2.77	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-55
Tabel 2.78	Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-56
Tabel 2.79	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-56
Tabel 2.80	Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-56
Tabel 2.81	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-57
Tabel 2.82	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-57
Tabel 2.83	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-57
Tabel 2.84	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-58
Tabel 2.85	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-58
Tabel 2.86	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-58
Tabel 2.87	Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-59
Tabel 2.88	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-59
Tabel 2.89	Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-59
Tabel 2.90	Persentase Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-60
Tabel 2.91	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-60

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Staf	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.92	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-60
Tabel 2.93	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-61
Tabel 2.94	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-61
Tabel 2.95	Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-61
Tabel 2.96	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-62
Tabel 2.97	Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-63
Tabel 2.98	Jumlah BPR/LKM (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-63
Tabel 2.99	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-63
Tabel 2.100	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-64
Tabel 2.101	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Trilyun) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-64
Tabel 2.102	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-64
Tabel 2.103	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-65
Tabel 2.104	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-65
Tabel 2.105	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-65
Tabel 2.106	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-65
Tabel 2.107	Jumlah Organisasi Pemuda (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-66
Tabel 2.108	Jumlah Organisasi Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-66
Tabel 2.109	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-66
Tabel 2.110	Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-67
Tabel 2.111	Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-67
Tabel 2.112	Lapangan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-67
Tabel 2.113	Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-67
Tabel 2.114	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-68
Tabel 2.115	Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-68
Tabel 2.116	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-68
Tabel 2.117	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-69
Tabel 2.118	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-69
Tabel 2.119	Penegakan PERDA Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-71
Tabel 2.120	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-71
Tabel 2.121	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-71

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Keuangan	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1	
2	
3	

Tabel 2.122	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-72
Tabel 2.123	Sistem Informasi Manajemen Pemda (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-72
Tabel 2.124	SKPD dengan Hasil Survey IKM Minimal Baik (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-72
Tabel 2.125	Ketersediaan Pangan Utama (Ton) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-73
Tabel 2.126	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-73
Tabel 2.127	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-73
Tabel 2.128	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-74
Tabel 2.129	LPM Berprestasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-74
Tabel 2.130	Persentase PKK Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-74
Tabel 2.131	Persentase Posyandu Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-75
Tabel 2.132	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-75
Tabel 2.133	Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-75
Tabel 2.134	Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-75
Tabel 2.135	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-76
Tabel 2.136	Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-76
Tabel 2.137	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-77
Tabel 2.138	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-77
Tabel 2.139	Jumlah Perpustakaan (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-77
Tabel 2.140	Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun (Pengunjung) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-78
Tabel 2.141	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-78
Tabel 2.142	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-78
Tabel 2.143	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-79
Tabel 2.144	Produktifitas Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-79
Tabel 2.145	Produksi Peternakan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-79
Tabel 2.146	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-80
Tabel 2.147	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-80
Tabel 2.148	Kunjungan Wisata (orang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-80
Tabel 2.149	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (milyar) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-81
Tabel 2.150	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-81
Tabel 2.151	Konsumsi Ikan (kg/kap/th) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-81
Tabel 2.152	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran Tahun	II-82

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabum	



Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


2011 - 2015 Kabupaten Pacitan		
Tabel 2.153	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-82
Tabel 2.154	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-83
Tabel 2.155	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-83
Tabel 2.156	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-83
Tabel 2.157	Pertumbuhan Industri Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-83
Tabel 2.158	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-84
Tabel 2.159	Transmigrasi Swakarsa (orang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-84
Tabel 2.160	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-85
Tabel 2.161	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-85
Tabel 2.162	Persentase Nilai Tukar Petani Tahun 2013 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-85
Tabel 2.163	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-86
Tabel 2.164	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum (Penumpang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-86
Tabel 2.165	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun (Penumpang/Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-86
Tabel 2.166	Ketaatan terhadap RTRW (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-87
Tabel 2.167	Luas Wilayah Produktif (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-87
Tabel 2.168	Luas Wilayah Industri (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-87
Tabel 2.169	Luas Wilayah Kebanjiran (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-87
Tabel 2.170	Luas Wilayah Kekeringan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-88
Tabel 2.171	Luas Wilayah Perkotaan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-88
Tabel 2.172	Jumlah Bank dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-89
Tabel 2.173	Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-89
Tabel 2.174	Jumlah Restoran (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-89
Tabel 2.175	Jumlah Penginapan/Hotel (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-90
Tabel 2.176	Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-90
Tabel 2.177	Jumlah Demo Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-91
Tabel 2.178	Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-91
Tabel 2.179	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-91
Tabel 2.180	Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-91
Tabel 2.181	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-92
Tabel 2.182	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-92
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	III-2
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	III-3
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	III-4

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabup	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1 _____	
2 _____	
3 _____	

Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahum 2011-2015 Kabupaten Pacitan	III-5
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	III-7
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	III-14
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2013-2015 Kabupaten Pacitan	III-15
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015 Kabupaten Pacitan	III-16
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2015 Kabupaten Pacitan	III-17
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013-2015 Kabupaten Pacitan	III-17
Tabel 3.11	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015 Kabupaten Pacitan	III-18
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam RPJMD 2011-2016	III-20
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 Kabupaten Pacitan	III-22
Tabel 3.14	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017-2021 Kabupaten Pacitan	III-27
Tabel 3.15	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 Kabupaten Pacitan	III-27
Tabel 3.16	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahum 2017-2021 Kabupaten Pacitan	III-27
Tabel 3.17	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 Kabupaten Pacitan	III-28
Tabel 3.18	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021	III-32
Tabel 4.1	Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025	IV-2
Tabel 4.2	Pemetaan Isu-isu Strategis Berdasarkan Isu/Kebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi	IV-11
Tabel 4.3	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	IV-15
Tabel 4.4	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I	IV-18
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-4
Tabel 6.1	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-3
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	VII-4
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pacitan	VIII-2
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pacitan	IX-2

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	





DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014	II-16
Grafik 2.2	Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014	II-17
Grafik 2.3	Pendapatan Per Kapita (Rupiah) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-18
Grafik 2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kabupaten Pacitan	II-18
Grafik 2.5	Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014	II-19
Grafik 2.6	Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014	II-19
Grafik 2.7	Angka Kriminalitas Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-20
Grafik 2.8	Angka Melek Huruf (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-20
Grafik 2.9	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-21
Grafik 2.10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-21
Grafik 2.11	Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-24
Grafik 2.12	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-24
Grafik 2.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-29
Grafik 2.14	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Pacitan	II-31
Grafik 2.15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-32
Grafik 2.16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-33
Grafik 2.17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-33
Grafik 2.18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-33
Grafik 2.19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-34
Grafik 2.20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-34
Grafik 2.21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-35
Grafik 2.22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-35
Grafik 2.23	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-36
Grafik 2.24	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-37
Grafik 2.25	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan	II-37
Grafik 2.26	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-38
Grafik 2.27	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-38
Grafik 2.28	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-39
Grafik 2.29	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-39
Grafik 2.30	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	II-40

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Subag	✓
Muband	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1 _____	
2 _____	
3 _____	

Grafik 2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-41
Grafik 2.32	Cakupan Puskesmas Pembantu (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan	11-42
Grafik 2.33	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014 Kabupaten Pacitan	11-70

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1 _____	
Kabid		2 _____	
Kep. Sek. M		3 _____	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati Pacitan Bapak Indartato dan Wakil Bupati Pacitan Bapak Yudhi Sumbogo untuk periode 2016-2021 pada tanggal 4 April 2016, maka daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2016-2021. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Pacitan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dihasilkan melalui beberapa pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan melalui beberapa tahapan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Musrenbang RPJMD;
5. Penyusunan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Perda RPJMD.

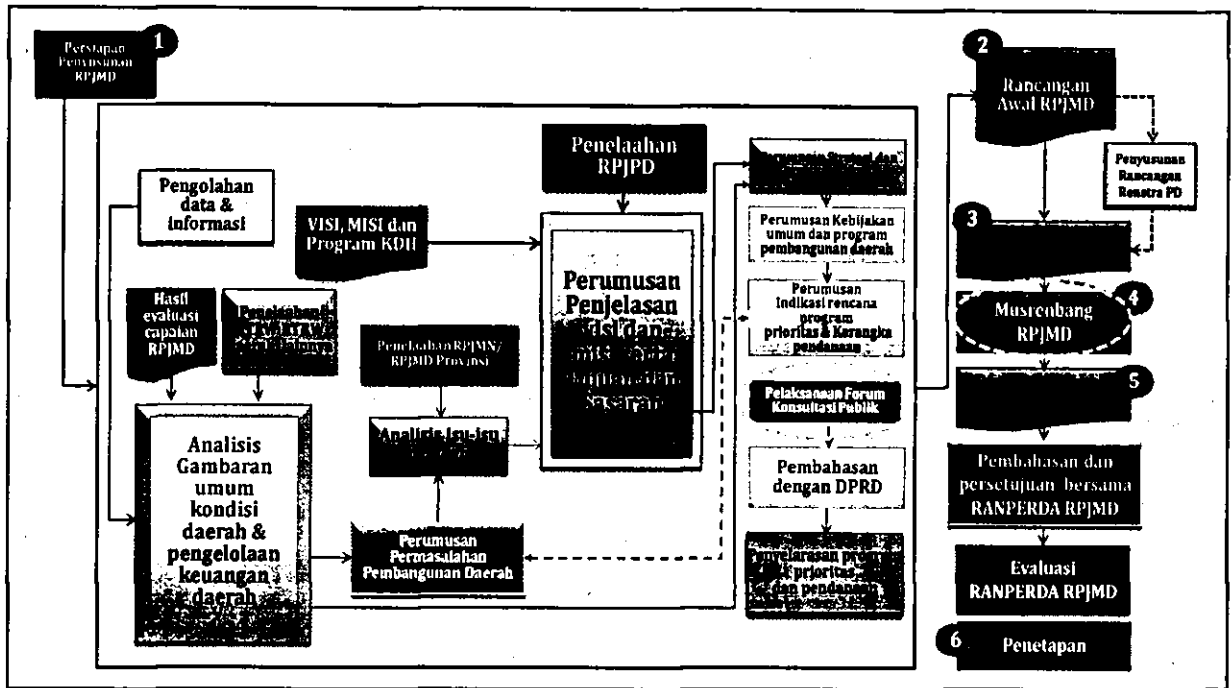
Secara rinci disajikan pada gambar berikut ini:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Wakil	<i>[Signature]</i>
Daerah	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Gambar 1.1.

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021



Sumber: Bahan paparan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Tahun 2016

RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Pacitan yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Pacitan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) di lingkungan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya RPJMD dan Renstra-PD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Subag	<i>[Signature]</i>
Daerah	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BARPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kaum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pacitan dengan dokumen perencanaan lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Pacitan
 RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan RPJMD periode ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pacitan masa bakti 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025.
 Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pacitan 2009-2028. Yang dimaksud dengan berpedoman pada RTRW adalah menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Pacitan.
- b. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur.
- c. Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah
 RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- d. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Terkait:	
1. Subbag		1. _____	
2. Subbag		2. _____	

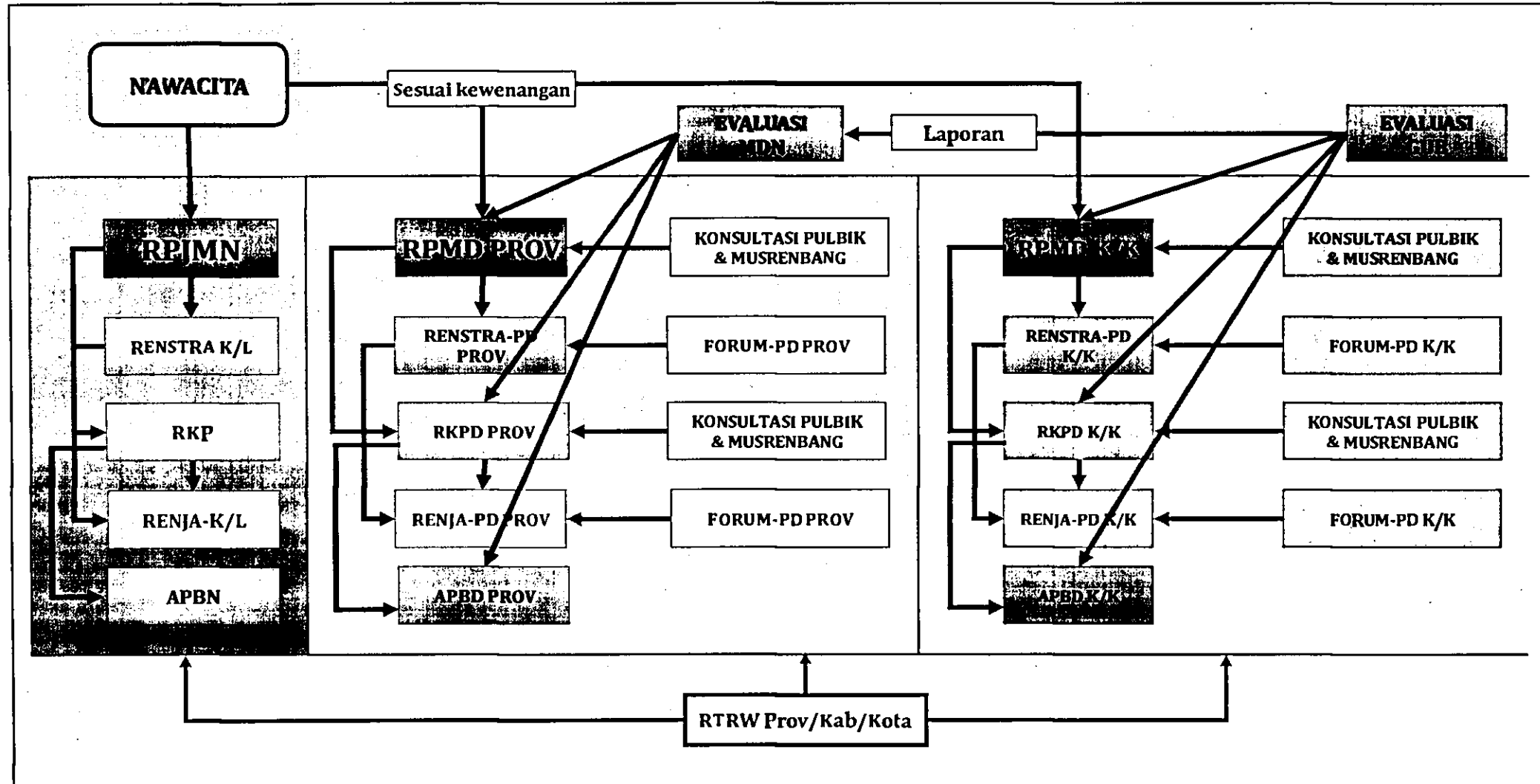
memuat prioritas dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada Gambar 1.2. Selain keterkaitan antar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021. Telaahan terhadap KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
bag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SK/PD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SK/PD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	

Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Dokumen Lainnya



Paraf Hierarchy	Paraf Koordinasi
Sekda	BAPPEDA
Asisten	SKPD/Bagian Terkait:
Kabag	1 _____
Hukum	2 _____
	3 _____

Sumber: Bahan Paparan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah diedit, Tahun 2016

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu-isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1. Strategi
- 6.2. Arah Kebijakan

VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Bagian	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BARPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan ke dalam dokumen yang menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan masyarakat Pacitan yang maju dan sejahtera.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun sampai dengan tahun 2021;
3. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Pacitan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Paraf Hierarki	
Seksa	✓
Asisten	✓
Kelembagaan	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten serta beberapa data/informasi lainnya.

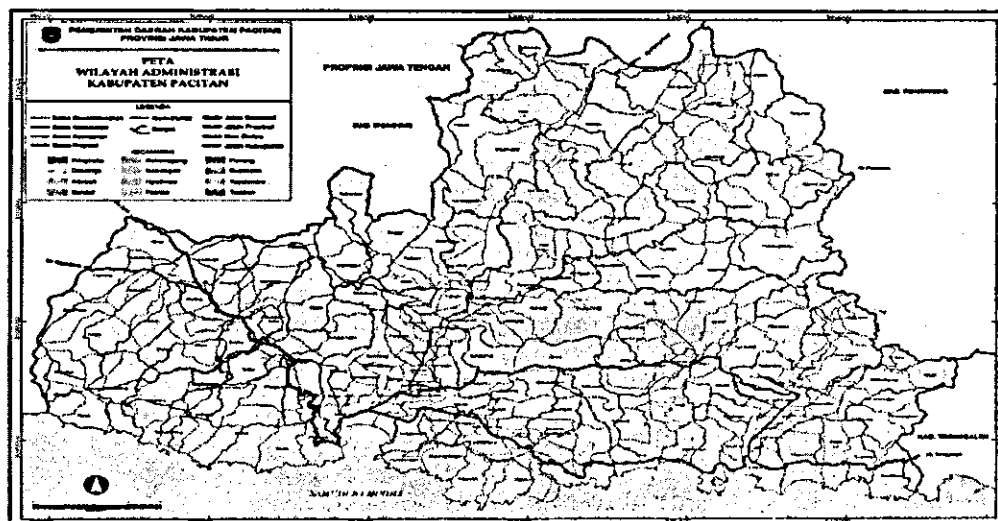
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan tahun 2009-2018

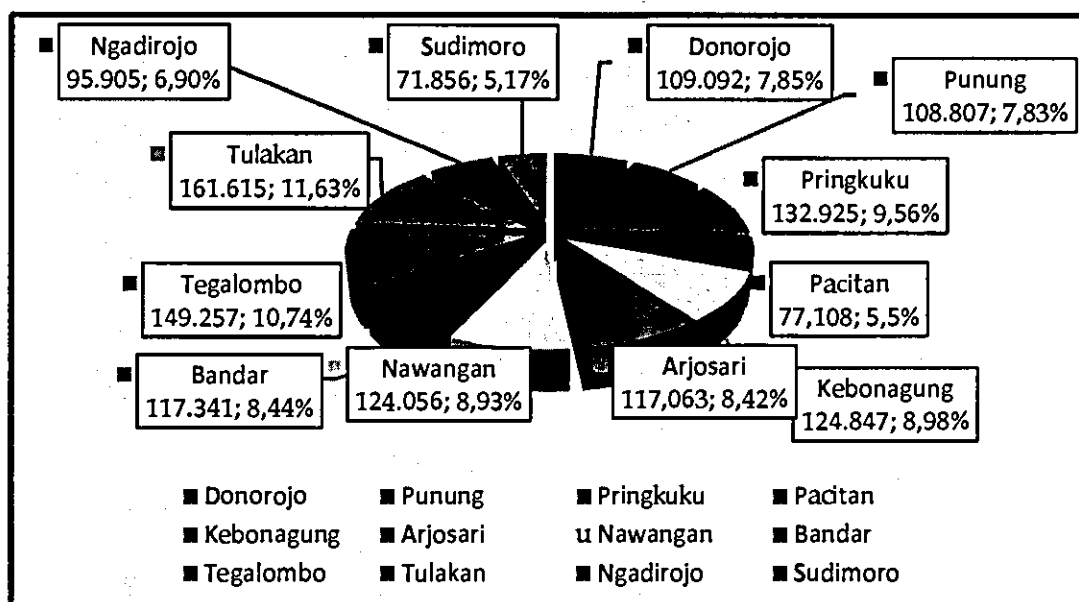
Paraf Hierarki	
Sekoa	✓
Asisten	✓
Staf	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km², dimana secara administratif terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km². Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km².

Luas tanah sawah Kabupaten Pacitan sebesar 130,15 km² atau sekitar 9,36% dan luas tanah kering adalah 1.259,72 km² atau sekitar 90,6%. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan sebesar 51,53%, dan sebagian besar dari tanah kering adalah untuk tanaman kayu-kayuan sebesar 35,89%. Berikut adalah gambar dan tabel tentang luas Kabupaten Pacitan, status dan letak geografis menurut kecamatan, luas daerah Kabupaten Pacitan menurut jenisnya, jarak antar kecamatan, luas tanah sawah menurut jenis pengairan, dan luas tanah kering menurut jenis penggunaan pada tahun 2014.

Gambar 2.2
Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan Tahun 2014



Sumber: Pacitan Dalam Angka Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Tabel 2.1
Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Status Daerah		Letak	
		Kota	Pedesaan	Pantai	Bukan Pantai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Donorojo	12	-	12	3	9
2 Punung	13	1	12	-	13
3 Pringkuku	13	-	13	5	8
4 Pacitan	25	15	10	3	22
5 Kebonagung	19	1	18	7	12
6 Arjosari	17	2	15	-	17
7 Nawangan	9	-	9	-	9
8 Bandar	8	1	7	-	8
9 Tegalombo	11	-	11	-	11
10 Tulakan	16	-	16	1	15
11 Ngadirojo	18	2	16	2	16
12 Sudimoro	10	-	10	4	6
Jumlah	171	22	149	25	146

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Paraf Hierarki

Sekda	✓
Asisten	✓
bag	✓




Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015


SKPD/ Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA
SKPD/ Bagian Terkait:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Tabel 2.2
Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (km²) Tahun 2014

Kecamatan		Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Donorojo	0,85	108,25	109,09
2	Punung	7,03	101,78	108,81
3	Pringkuku	4,47	128,46	132,93
4	Pacitan	12,07	65,04	77,11
5	Kebonagung	17,53	107,32	124,85
6	Arjosari	8,72	108,34	117,06
7	Nawangan	19,31	104,74	124,06
8	Bandar	16,77	100,57	117,34
9	Tegalombo	12,17	137,09	149,26
10	Tulakan	18,18	143,44	161,62
11	Ngadirojo	7,95	87,96	95,91
12	Sudimoro	5,12	66,74	71,86
Jumlah		130,15	1.259,72	1.389,87

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Paraf hierarki	
Sekda	
Asisten	
bidg	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BARPEDA	
SKPD/ Bagian Terkai:	
1. _____	
2. _____	

Tabel 2.3
Jarak Antar Kecamatan (Km) Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan		Donorojo	Punung	Pringkuku	Pacitan	Kebonagung	Arjosari	Nawangan	Bandar	Tegalombo	Tulakan	Ngadirojo	Sudimoro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Donorojo	0	6	13	35	42	45	69	107	69	62	75	89
2	Punung	6	0	6	29	36	39	63	101	63	56	68	82
3	Pringkuku	13	6	0	22	29	32	56	94	56	49	61	76
4	Pacitan	35	29	22	0	7	10	34	72	34	27	39	53
5	Kebonagung	42	36	29	7	0	17	41	79	41	34	47	61
6	Arjosari	45	39	32	10	17	0	24	62	24	37	50	64
7	Nawangan	69	63	56	34	41	24	0	38	48	61	74	88
8	Bandar	107	101	94	72	79	62	38	0	86	99	112	126
9	Tegalombo	69	63	56	34	41	24	48	86	0	61	74	88
10	Tulakan	62	56	49	27	34	37	61	99	61	0	13	27
11	Ngadirojo	75	68	61	39	47	64	74	112	74	13	0	14
12	Sudimoro	89	82	76	53	61	64	88	126	88	27	14	0

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.4
Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan		Irigasi Teknis	Irigasi 1/2 Teknis	Irigasi Sederhana	Tadah Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Donorojo	-	-	-	84,49	-	84,49
2	Punung	57,00	18,75	81,15	546,08	-	702,98
3	Pringkuku	-	36,00	260,00	150,80	-	446,80
4	Pacitan	64,32	325,10	203,41	613,70	-	1.206,53
5	Kebonagung	93,60	285,50	480,40	893,30	-	1.752,80
6	Arjosari	187,15	344,91	22,82	317,29	-	872,17
7	Nawangan	-	177,00	440,00	1.314,26	-	1.931,26
8	Bandar	-	460,00	676,30	541,00	-	1.677,30
9	Tegalombo	145,68	171,84	180,67	718,55	-	1.216,74
10	Tulakan	25,25	92,25	586,35	1.113,60	-	1.817,45
11	Ngadirojo	291,17	125,38	215,87	162,32	-	794,74
12	Sudimoro	-	93,28	167,02	251,70	-	512,00
Jumlah		864,17	2.130,01	3.313,99	6.707,09	-	13.015,26

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Tabel 2.5
Luas Tanah Kering Menurut Jenis Penggunaan (Ha) Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan		Tanah Untuk Bangunan	Tegal/Huma	Tan. Kayu-kayuan	Hutan Rakyat, Kebun	Hutan Negara	Lainnya	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Donorojo	195,10	781,31	678,77	8.380,38	77,30	711,87	10.824,73
2	Punung	183,77	4.643,18	2.294,46	2.275,47	9,30	771,49	10.177,67
3	Pringkuku	171,77	2.290,38	8.550,96	610,47	172,00	1.050,16	12.845,74
4	Pacitan	310,55	1.693,72	2.637,21	782,70	299,50	780,66	6.504,34
5	Kebonagung	178,80	3.036,45	4.949,86	765,10	14,35	1.787,31	10.731,87
6	Arjosari	162,40	1.057,09	8.416,88	579,08	81,70	536,97	10.834,12
7	Nawangan	239,76	1.430,54	6.857,43	932,70	75,30	938,54	10.474,27
8	Bandar	283,02	2.688,02	1.179,57	4.586,56	409,40	910,22	10.056,79
9	Tegalombo	294,34	4.242,97	2.629,33	5.215,17	41,10	1.286,04	13.708,95
10	Tulakan	540,04	4.342,61	2.984,05	4.931,05	-	1.546,28	14.344,03
11	Ngadirojo	402,83	2406,16	2.679,27	2.506,16	16,30	785,08	8.795,80
12	Sudimoro	190,95	1.278,15	1.355,99	3.404,13	18,00	426,37	6.673,59
Jumlah		3.153,33	29.890,38	45.213,78	34.968,97	1.214,25	11.530,99	125.971,90

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahun 2014, musim penghujan di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Januari-Juli dan bulan Nopember-Desember. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan bulan Desember yaitu 25 hari hujan. Musim kemarau di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Agustus-Oktober. Bulan Desember mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 23,80 mm³, sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terkecil yaitu bulan Oktober sebesar 4,48 mm³. Air hujan ini mengalir melalui 3 sungai besar yang terdapat di Kabupaten Pacitan yaitu Sungai Grindulu, Sungai Lorok dan Sungai Baksoka. Berikut adalah tabel banyaknya hujan bulanan, hujan harian maximum, hari hujan dan rata-rata hujan per bulan.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
bag.	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Tabel 2.6
Banyaknya Hujan Bulanan, Hujan Harian Maximum, Hari Hujan dan Rata-rata Hujan Per Bulan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan

Bulan		Hujan Bulanan (mm)	Hujan Harian (Hari)	Hari Hujan	Hujan Rata-Rata
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Januari	494,00	109,00	25,00	19,76
02	Februari	180,00	67,00	18,00	9,99
03	Maret	138,00	63,00	12,00	11,51
04	April	144,00	75,00	13,00	11,06
05	Mei	30,00	31,20	4,00	7,54
06	Juni	112,00	151,00	6,00	18,59
07	Juli	120,00	94,00	7,00	17,10
08	Agustus	14,00	28,00	2,00	6,98
09	September	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oktober	4,00	11,00	1,00	4,48
11	November	248,00	163,00	13,00	19,08
12	Desember	595,00	236,00	25,00	23,80

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Tabel 2.7
Banyaknya Curah Hujan Per Bulan Menurut Stasiun Hujan di Wilayah Kabupaten Pacitan (mm³) Tahun 2014

Stasiun Hujan	Bulan												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Donorojo	432	260	193	284	-	82	34	10	-	-	202	467
2	Punung	387	127	91	129	35	87	86	15	-	-	340	549
3	Pringkuku	478	107	77	129	27	129	206	19	-	5	290	552
4	Pacitan	540	102	151	111	16	176	174	29	-	10	223	541
5	Kebonagung	606	135	87	165	50	261	266	78	-	17	330	703
6	Arjosari	634	236	113	182	17	42	40	10	-	5	254	638
7	Nawangan	492	226	180	137	45	269	32	0	-	-	262	629
8	Bandar	259	112	78	89	-	12	31	0	-	1	240	421
9	Tegalombo	429	154	114	243	44	91	17	8	-	-	153	576
10	Tulakan	570	217	142	93	61	90	211	0	-	5	289	610
11	Ngadirojo	543	240	134	113	45	61	244	0	-	11	277	740
12	Sudimoro	437	252	308	61	46	84	254	10	-	9	261	559
13	Kerti	543	143	81	125	5	72	43	17	-	-	210	750
14	Tahunan	567	206	185	153	32	106	38	0	-	-	142	597
TOTAL		6.917	2.517	1.934	2.014	423	1.562	1.676	196	0	63	3.473	8.332

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Topografi Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa pegunungan dan perbukitan sehingga menjadikan penggunaan lahan yang ideal pada kawasan tersebut berupa kawasan hutan. Hal ini menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari potensi hutan ini sebagian akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar tetapi juga dipasarkan keluar Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi hutan produksi yang luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang ada, sedangkan sisanya 12,10% adalah hutan lindung. Luas areal hutan rakyat meningkat dikarenakan adanya penanaman tanaman kayu-kayuan yang cukup besar terutama karena adanya kegiatan pengembangan baik dari dukungan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun bantuan dari mitra usaha, pembuatan bedengan tanaman secara swadaya dan pembuatan kebun bibit rakyat. Hal ini mengindikasikan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
...	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

bahwa kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian hutan semakin meningkat. Berikut adalah kondisi topografi Kabupaten Pacitan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 km² atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 km² atau 52% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Kandungan mineral di Kabupaten Pacitan yang tercatat pada Dinas Pertambangan dan Energi bahwa Kabupaten Pacitan memiliki kandungan mineral berupa logam dan bukan logam yang tersebar pada beberapa kecamatan dan kelurahan atau desa. Berikut adalah tabel potensi mineral Kabupaten Pacitan tahun 2015:

Tabel 2.8
Data Potensi Mineral Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Jenis Mineral		Volume (Ton)	Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan
(1)		(2)	(3)
Logam			
1	Timah hitam / Timbal	Hipotetik	Gunung Tileng Kec. Ngadirojo
		Hipotetik	Desa Kluwih, Kec. Tulakan
2	Mangan	Hipotetik	Dsn. Pojok, Ds. Tegalombo Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Kemuning, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Tahunan, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Kledung, Kec. Bandar
		Hipotetik	Desa Mujing, Kec. Nawangan
3	Tembaga	Hipotetik	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Kel. Pucangsewu, Kec. Pacitan
4	Seng	Hipotetik	Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo
5	Emas	Hipotetik	Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo
		Hipotetik	Desa Kebonsari, Kec. Punung
		Hipotetik	Desa Tinatar, Kec. Punung
		Hipotetik	Desa Mlati, Kec. Arjosari
		Terkira (2.880.000 ton)	Gunung Gembes, Kec. Bandar
6	Pasir besi	Terkira (2.440,32 m ³)	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo
		Terkira (7.325,64 m ³)	Desa Sendang, Kec. Donorojo
7	Batu besi	Hipotetik	Desa Plumbungan, Kec. Kebonagung
		Hipotetik	Desa Kembang, Kec. Pacitan
		Hipotetik	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
8	Timah putih	Hipotetik	Desa Tanjung Lor, Kec. Ngadirojo
9	Nikel	Hipotetik	Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo
Bukan Logam			
1	Dolomit	Hipotetik	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku
2	Gypsum	Hipotetik	Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Mujing, Kec. Nawangan
3	Bentonit	Terkira (70.000.000 m ³)	Desa Punung, Kec. Punung
		-	Desa Mendolo Kidul, Kec. Punung
		-	Desa Mendolo Lor, Kec. Punung

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Jenis Mineral		Volume (Ton)	Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		-	Desa Mantren, Kec. Punung
		-	Desa Pelem, Kec. Pringkuku
		-	Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku
		-	Desa Donorojo, Kec. Donorojo
		-	Desa Sukodono, Kec. Donorojo
		-	Desa Sekar, Kec. Donorojo
4	Kalsit	Terkira	Desa Pringkuku, Kec. Pringkuku
		443.700 m ³	Desa Jlubang, Kec. Pringkuku
		-	Desa Piton, Kec. Punung
		-	Desa Donorojo, Donorojo
5	Zeolit	Terkira	Desa Bangunsari, Kec. Bandar
		Terkira (1.020.510 m ³)	Desa Tamansari, Kec. Pringkuku
6	Oker	Hipotetik	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
		-	Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo
		-	Desa Bandar, Kec. Bandar
7	Phospat	Hipotetik	Gua Kendil, Kec. Pringkuku
		-	Gua Buwungan, Kec. Pringkuku
		-	Gua Tabuhan, Kec. Punung
		-	Gua Kalak, Kec. Donorojo
		-	Gua Nglampeng, Kec. Donorojo
		-	Gua Samopura, Kec. Tulakan
8	Pirophylit	Terkira	Desa Gondang, Kec. Nawangan
		4.800.000 m ³	Desa Karanggede, Kec. Arjosari
		-	Desa Temon, Kec. Arjosari
9	Kaolin	Terkira	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari
		9.000.000 m ³	Desa Gondosari, Kec. Punung
		-	Desa Tamansari, Kec. Pringkuku
		-	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
		-	Desa Pucangombo, Kec. Tegalombo
		-	Desa Tumpuk, Kec. Bandar
10	Feldspar	Terkira (46.000.000 m ³)	Desa Wonosidi, Kec. Tulakan
		-	Desa Mlati, Kec. Arjosari
		-	Desa Bolosingo, Kec. Pacitan
		-	Desa Kebonsari, Kec. Punung
		-	Desa Tamansari, Kec. Pringkuku
		-	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro
		-	Desa Sudimoro, Kec. Sudimoro
11	Pasir Kuarsa	Hipotetik	Desa Tahunan, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Cokrokembang, Kec. Ngadirojo
		Hipotetik	Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan
12	Ball clay	Hipotetik	Desa Gondosari, Kec. Punung
		Hipotetik	Desa Wonogondo, Kec. Kebonagung
		Hipotetik	Desa Kedungdowo, Kec. Kebonagung
		Hipotetik	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
		Hipotetik	Desa Bungur, Kec. Tulakan
13	Marmer	Terkira	Desa Ketro, Kec. Kebonagung
		> 77.000.000 m ³	Desa Sanggrahan, Kec. Kebonagung
		-	Desa Gembuk, Kec. Kebonagung
		-	Desa Wonoanti, Kec. Tulakan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Jenis Mineral		Volume (Ton)	Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan
(1)		(2)	(3)
		-	Desa Jetak, Kec. Tulakan
14	Rijang	Hipotetik	Desa Sooka, Kec. Punung
		Hipotetik	Desa Wiyoro, Kec. Ngadirojo


Sumber: Profil ESDM Dalam Angka Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan tentang sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan dan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang di Kabupaten Pacitan. Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi tahun 2011 - 2015 sebagai berikut:

1. Pertanian, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam/keprok, janggolan, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur. Data produksi dan produktifitas komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
2. Tanaman perkebunan, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren, nilam.
3. Ternak, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok. Dari beberapa jenis ternak tersebut yang merupakan unggulan, data produksi peternakan di Kabupaten Pacitan 5 (lima) tahun terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
4. Kehutanan, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu, dan gmelina.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Batu bara
 - b. Mineral logam: timah putih, nikel, timah hitam, mangan, tembaga, seng, emas, pasir besi, batu besi.
 - c. Mineral bukan logam : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, jasper.
 - d. Batuan : ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.
6. Pariwisata:
Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi wisata, baik wisata pantai, goa, maupun budaya. Berikut ini disajikan secara rinci.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPDI Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.9
Potensi Pariwisata Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Teleng Ria	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Watukarung	Desa watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Segara Anakan	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	30 Km
		Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Srau	Desa candi, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Taman	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	32 Km
		Pantai Wawaran	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	15 Km
		Pantai Klayar	Desa Widoro, Kec. Donorojo	53 Km
		Pantai Dhaki	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro	48 Km
		Pantai Buyutan	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Pancer Door	Kel. Ploso, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Kali Wuluh	Desa Klesem, Kec. Kebonagung	20 Km
		Pantai Soge	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	28 Km
		Pantai Pidakan	Desa Jetak, Kec. Tulakan	25 Km
2.	Wisata Goa	Goa Tabuhan	Desa Wareng, Kec. Punung	40 Km
		Goa Gong	Desa Bomo, Kec. Punung	30 Km
		Goa Putri	Desa Kendal, Kec. Punung	29 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku	12 Km
4.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	15 Km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

7. Kelautan dan Perikanan:

Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari : Tuna, Cakalang, Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga waja, Teri, Kakap Merah, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, Cucut Martil, Bawal putih, Lemadang, Kuniran, Golok-golok, Lobster, Lele dan Nila.

Tabel 2.10
Produksi Perikanan (ton) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi perikanan (ton)	6.244,07	7.006,49	9.275,32	9.338,57	11.692,87

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

8. Perdagangan:

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing - masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Manag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPBI/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

9. Perindustrian:

Potensi sektor perindustrian di Kabupaten Pacitan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Potensi Perindustrian Tabun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/ Akik	Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan
2.	Gula merab	Kebonagung, Donorojo, Tulakan
3.	Keramik dan Gerabab Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo
6.	Kapur Tobor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo, Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terdapat pada Kabupaten Pacitan berdasarkan data yang tercatat dalam Laporan Bencana Kabupaten Pacitan Tabun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yaitu banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran, tanah ambles, pohon tumbang dan rumah roboh tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan, berikut adalah rincian jenis bencana pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan:

1. Banjir: Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari dan Ngadirojo;
2. Tanah Longsor: Donorojo, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro;
3. Angin Topan: Pacitan, Kebonagung, Bandar dan Sudimoro;
4. Kebakaran: Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar dan Tulakan;
5. Tanah Ambles: Arjosari;
6. Pohon Tumbang: Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo dan Tulakan;
7. Rumah Roboh: Bandar.

2.1.4 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 Tahun terakhir disajikan dalam beberapa tabel, sebagai berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Penitaksara BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

Tabel 2.12
Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-rata Penduduk Per Desa dan
Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2011-2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Penduduk	Rata-rata Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010. Donorojo	12	109,09	40.446	3.371	371
020. Punung	13	108,81	37.521	2.886	345
030. Pringkulu	13	132,93	31.977	2.460	241
040. Pacitan	25	77,11	76.537	3.061	993
050. Kebonagung	19	124,85	45.542	2.397	365
060. Arjosari	17	117,06	41.672	2.451	356
070. Nawangan	9	124,06	52.734	5.859	425
080. Bandar	8	117,34	46.017	5.752	392
090. Tegalombo	11	149,26	55.900	5.082	375
100. Tulakan	16	161,62	86.994	5.437	538
110. Ngadirojo	18	95,91	49.017	2.723	511
120. Sudimoro	10	71,86	35.119	3.512	489
Jumlah Tahun 2014	171	1.389,87	599.476	3.506	431
Tahun 2013	171	1.389,87	599.939	3.508	432
Tahun 2012	171	1.389,87	586.595	3.430	422
Tahun 2011	171	1.389,87	586.276	3.429	422

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Jumlah penduduk beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 sebesar 586.276 orang dan mengalami peningkatan menjadi 599.939 orang pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 599.476 orang. Kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebesar 431 jiwa/Km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pacitan sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 993 jiwa/Km², hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 241- 538 jiwa/Km².

Tabel 2.13
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Penduduk/Population		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
	2013	2014	2013-2014
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Donorojo	40.776	40.446	-0,81
020. Punung	37.538	37.521	-0,05
030. Pringkulu	31.945	31.977	0,10
040. Pacitan	76.512	76.537	0,03
050. Kebonagung	45.481	45.542	0,13
060. Arjosari	41.338	41.672	0,81
070. Nawangan	52.578	52.734	0,30
080. Bandar	46.129	46.017	-0,24
090. Tegalombo	55.842	55.900	0,10
100. Tulakan	87.032	86.994	-0,04
110. Ngadirojo	49.213	49.017	-0,40
120. Sudimoro	35.555	35.119	-1,23
Jumlah	599.939	599.476	-0,08

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada Tahun 2014 terdiri dari laki-laki sebesar 298.315 jiwa dan perempuan sebesar 301.161 jiwa. Laju penduduk dari Tahun 2013 ke 2014 sebesar -0,08.

Tabel 2.14
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2011-2014
Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Donorojo	19.757	20.689	40.446	95,50
020. Punung	18.469	19.052	37.521	96,94
030. Pringkulu	15.095	16.882	31.977	89,41
040. Pacitan	38.041	38.496	76.537	98,82
050. Kebonagung	23.216	22.326	45.542	103,99
060. Arjosari	20.843	20.829	41.672	100,07
070. Nawangan	26.388	26.346	52.734	100,16
080. Bandar	23.113	22.904	46.017	100,91
090. Tegalombo	27.772	28.128	55.900	98,73
100. Tulakan	43.636	43.358	86.994	100,64
110. Ngadirojo	24.416	24.601	49.017	99,25
120. Sudimoro	17.569	17.550	35.119	100,11
Jumlah Tahun 2014	298.315	301.161	599.476	99,05
Tahun 2013	298.053	301.886	599.939	98,73
Tahun 2012	291.550	295.045	586.595	98,82
Tahun 2011	291.498	294.778	586.276	98,89

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Menurut hasil Registrasi Penduduk Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 599.476 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 298.315 jiwa (49,76 persen) dan perempuan sebesar 301.161 jiwa (50,24 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,05 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Sedangkan menurut hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 540.881 jiwa.

Tabel 2.15
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014
Kabupaten Pacitan

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	22.407	17.419	39.826
5 - 9	21.572	22.428	44.000
10 - 14	23.389	24.476	47.865
15 - 19	24.926	18.469	43.395
20 - 24	15.127	20.527	35.654
25 - 29	23.105	18.448	41.553
30 - 34	20.960	19.659	40.619
35 - 39	19.196	22.191	41.387
40 - 44	24.471	22.555	47.026
45 - 49	22.294	25.191	47.485
50 - 54	22.307	19.714	42.021
55 - 59	15.355	16.598	31.953
60 - 64	15.098	16.080	31.178
65+	28.108	37.406	65.514
Jumlah	298.315	301.161	599.476

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	BAPPEDA	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	

Berdasarkan komposisi umurnya, penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 402.271 jiwa berada pada usia produktif yaitu berusia 15-64 tahun atau sebesar 67,10 persen. Sementara itu, penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 paling banyak bekerja di lapangan usaha pertanian tanaman pangan yaitu sebanyak 203.998 orang dan diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 15.897 orang.

Tabel 2.16
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu
Yang Lalu Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Utama
Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Lapangan Usaha Utama*)					
	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010. Donorojo	13.097	35	7	544	31	5.806
020. Punung	18.680	32	10	115	103	104
030. Pringkulu	13.594	21	221	961	49	266
040. Pacitan	10.500	66	611	368	652	779
050. Kebonagung	18.682	36	210	113	159	5.287
060. Arjosari	16.185	45	16	507	119	173
070. Nawangan	14.181	1.066	39	5.721	2.012	202
080. Bandar	17.893	68	21	738	474	105
090. Tegalombo	21.296	99	91	544	758	187
100. Tulakan	27.782	1.249	102	1.323	1.147	2.604
110. Ngadirojo	18.639	458	276	1.818	623	350
120. Sudimoro	13.469	492	53	1.373	168	34
Jumlah	203.998	3.667	1.657	14.125	6.295	15.897

Sumber Data: BPS Kabupaten Pacitan

Catatan: *)

1. Pertanian Tanaman Pangan
2. Perkebunan
3. Perikanan
4. Peternakan
5. Pertanian Lain
6. Industri Pengolahan

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada satu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinci menurut total nilai tambah dari 17 sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengadaan air, pengelolaan sampah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Nilai PDRB Kabupaten Pacitan tahun

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, mengalami kenaikan di bandingkan dengan tahun 2013. Data PDRB ADHB sebagaimana tabel 2.17 dan PDRB ADHK (2010) Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 2.17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan

(Rp.000.000,00)

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.853.202,20	3.205.937,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	543.347,00	619.434,50
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	638.930,10	703.833,80
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2.912,90	3.001,80
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	8.766,50	9.586,40
F	KONSTRUKSI	1.402.753,40	1.587.605,70
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.518.502,60	1.669.333,70
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	188.539,60	217.275,00
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	174.723,40	200.978,50
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	521.087,70	563.524,00
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	178.491,50	202.167,00
L	REAL ESTATE	146.606,70	160.161,30
M, N	JASA PERUSAHAAN	25.385,30	27.689,10
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	433.223,10	446.622,90
P	JASA PENDIDIKAN	451.339,50	509.039,70
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	83.892,90	95.619,70
R, S, T, U	JASA LAINNYA	243.961,30	276.807,00
JUMLAH/ TOTAL		9.415.665,57	10.498.617,48

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Tabel 2.18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan

(Rp.000.000,00)

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.306.121,00	2.392.241,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	497.298,50	516.399,10
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	564.622,20	590.005,40
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3.331,10	3.424,20
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7.845,00	8.072,40
F	KONSTRUKSI	1.182.250,10	1.239.596,90
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.366.145,60	1.456.620,10
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	176.665,90	195.994,10
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	154.615,50	167.569,00
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	505.967,90	544.065,40
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	150.879,20	161.881,30
L	REAL ESTATE	133.875,30	143.474,20
M, N	JASA PERUSAHAAN	22.417,00	23.901,60
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	383.013,80	386.725,60
P	JASA PENDIDIKAN	392.604,00	420.610,50
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	76.925,50	83.109,90
R, S, T, U	JASA LAINNYA	228.591,40	243.882,10
JUMLAH/ TOTAL		8.153.169,20	8.577.575,99

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

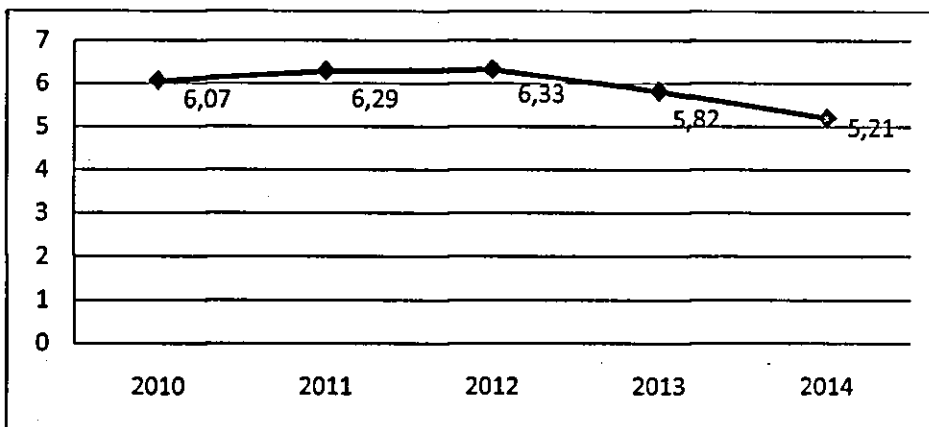
Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabup. Pacitan	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

PDRB ADHB tahun 2014 sebesar 10.498,62 milyar rupiah meningkat sebesar 11,50% dari tahun 2013, sedangkan PDRB ADHK (2010) tahun 2014 meningkat menjadi 8.577,52 milyar rupiah atau sebesar 5,21% dari tahun 2013. PDRB tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, penyumbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 3.205,94 milyar rupiah dan 2.392,24 milyar rupiah. Bila dilihat peranan masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, yaitu sebesar 30,5%. Distribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0,03%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari indeks berantai atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebesar 5,21. Nilai ini turun sebesar 0,61 poin dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,82. Bila dilihat menurut per sektor, laju pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,94. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat perbedaan percepatan pertumbuhan, dengan sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2013 merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya yaitu sebesar 12,3. Berikut adalah gambar laju pertumbuhan ekonomi dan tabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Tabel 2.19
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,47	3,73
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,87	3,84
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,86	4,50
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3,86	2,79
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7,83	2,90
F	KONSTRUKSI	7,07	4,85
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	8,57	6,62
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9,96	10,94
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,61	8,38
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,64	7,53
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	12,30	7,29

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Aaisten	SKPD/ Bagian Terkait
Kabag	1. _____
	2. _____
	3. _____

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
L	REAL ESTATE	7,58	7,17
M, N	JASA PERUSAHAAN	6,36	6,64
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	2,04	0,97
P	JASA PENDIDIKAN	9,36	7,13
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,61	8,04
R, S, T, U	JASA LAINNYA	6,19	6,69
JUMLAH/TOTAL		5,82	5,21

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

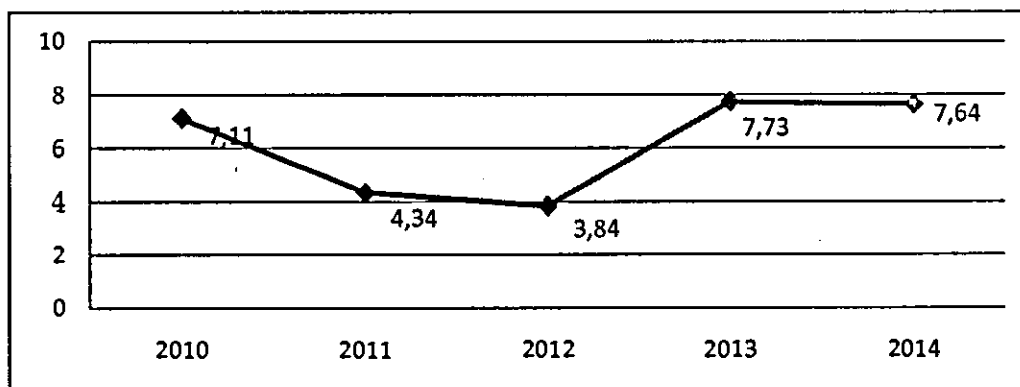
* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

2.2.1.2 Laju Inflasi Kabupaten Pacitan

Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2010 sebesar 7,11%, angka ini bergerak naik turun selama 5 tahun terakhir dan tahun 2014 sebesar 7,64%. Berikut adalah grafik laju inflasi Kabupaten Pacitan.

Grafik 2.2
Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur per Desember 2014 yaitu sebesar 7,77, maka inflasi Kabupaten Pacitan sebesar 7,64 masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk inflasi nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional pada Tahun 2014 mencapai 8,36%. Angka ini tentu berada jauh di atas angka inflasi Pacitan pada tahun 2014.

2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita (Rupiah)

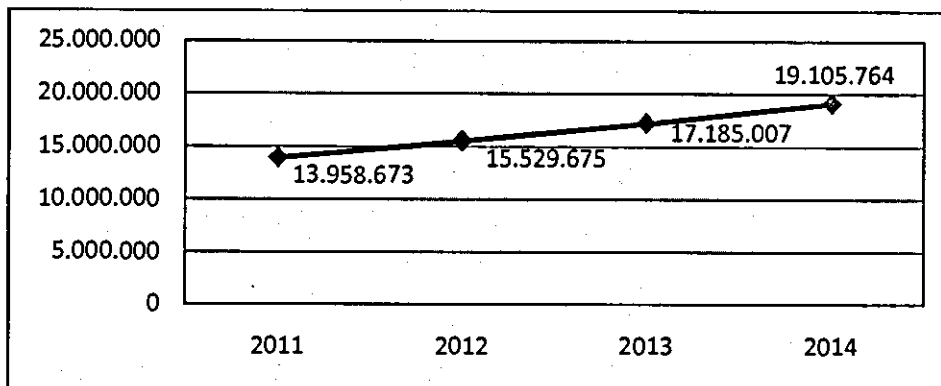
Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk. Pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau perbandingannya dengan daerah lain.

Parat Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asistan	<i>[Signature]</i>
Kabag. Umum	<i>[Signature]</i>

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2011 mencapai Rp.13.958.673,00 dan meningkat menjadi Rp.19.105.764,00 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 36,87% per tahun. Berikut adalah grafik Pendapatan Per Kapita dalam Rupiah Kabupaten Pacitan:

Grafik 2.3
Pendapatan Per Kapita (Rupiah) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Pacitan



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

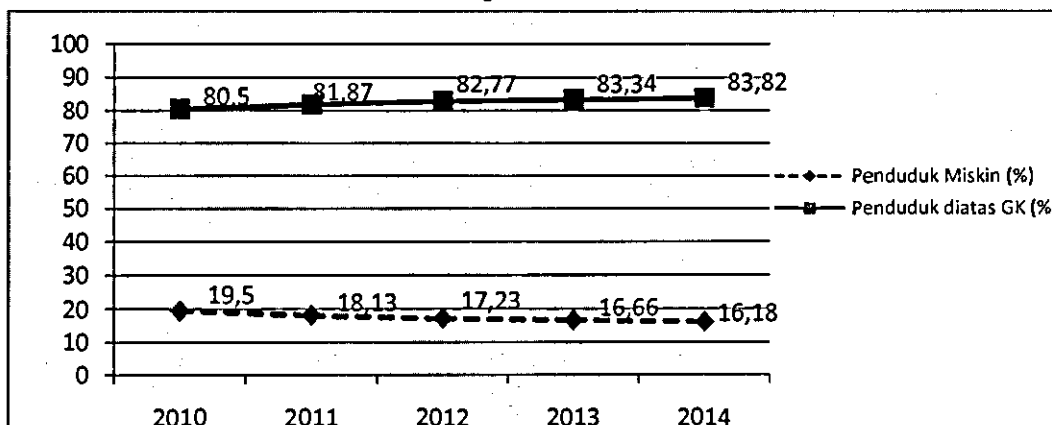
2.2.1.4 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})\%$. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index (HCI)*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Data persentase penduduk miskin dan penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Pacitan disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.4
Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014
Kabupaten Pacitan



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Parat Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Hukum	

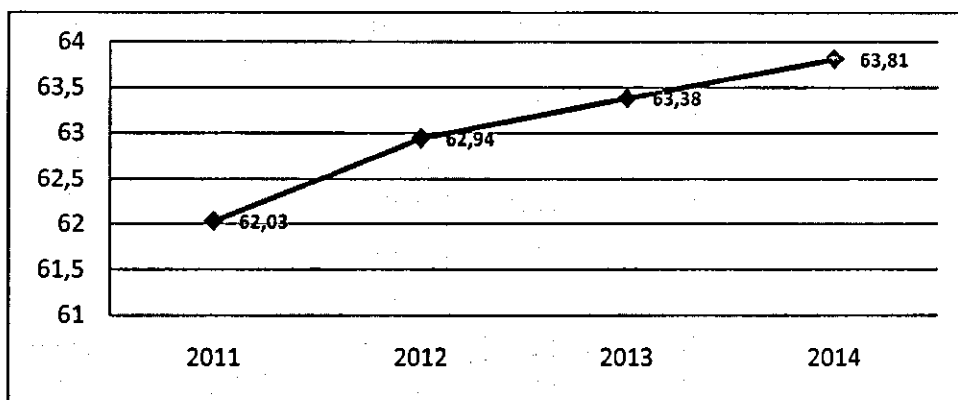
Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Dari Grafik 2.4 di atas tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2010 sebesar 19,50%, tahun 2011 sebesar 18,13%, tahun 2012 sebesar 17,23%, tahun 2013 sebesar 16,66%, dan pada tahun 2014 sebesar 16,18%, atau selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,32%. Angka tersebut masih jauh di atas tingkat kemiskinan nasional (10,96%) maupun Provinsi Jawa Timur (12,28%). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2014 sebesar 83,82%.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

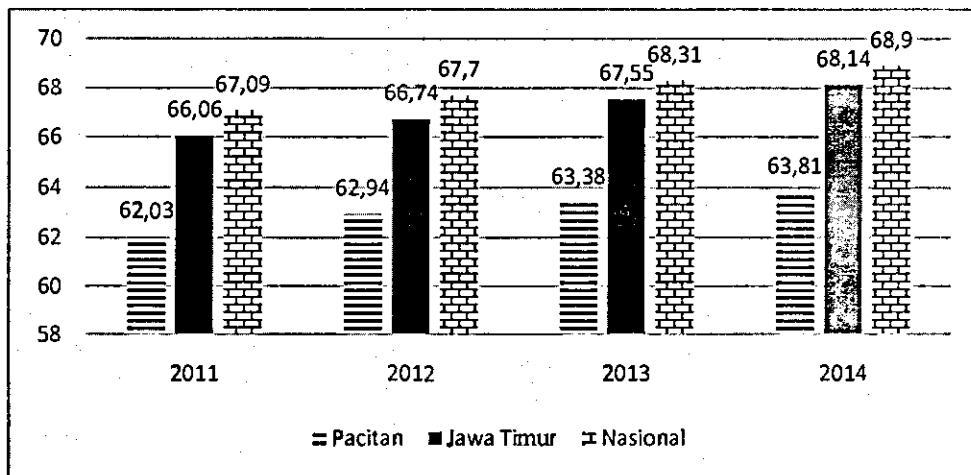
IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2011 yaitu sebesar 62,03, tahun 2012 menjadi sebesar 62,94, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 63,38, dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 63,81. Perhitungan ini didasarkan pada formula perhitungan IPM yang baru yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per-Kapita Per Tahun. Berikut kami sajikan grafik perkembangan IPM Kabupaten Pacitan tahun 2011 s/d 2014.

Grafik 2.5
Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015

Grafik 2.6
Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015

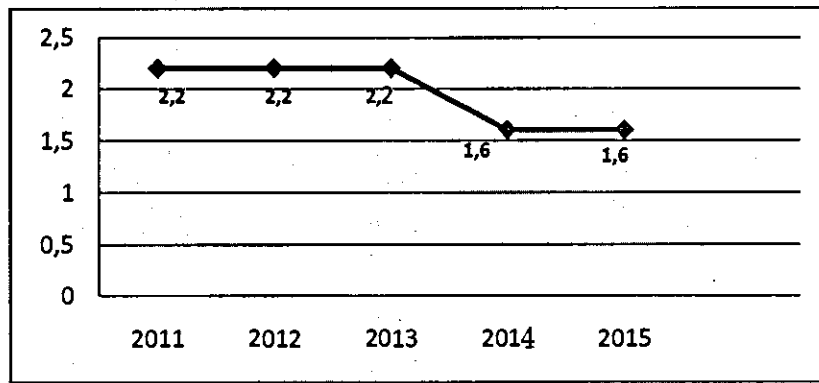
Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Sekwan	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1	
2	
3	

2.2.1.6 Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas di Kabupaten Pacitan pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 1,6% mengalami penurunan 0,6 dibanding capaian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar 2,2. Kasus tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 143 kasus dan di tahun 2015 sebanyak 123 kasus. Berikut adalah grafik angka kriminalitas di Kabupaten Pacitan.

Grafik 2.7
Angka Kriminalitas Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

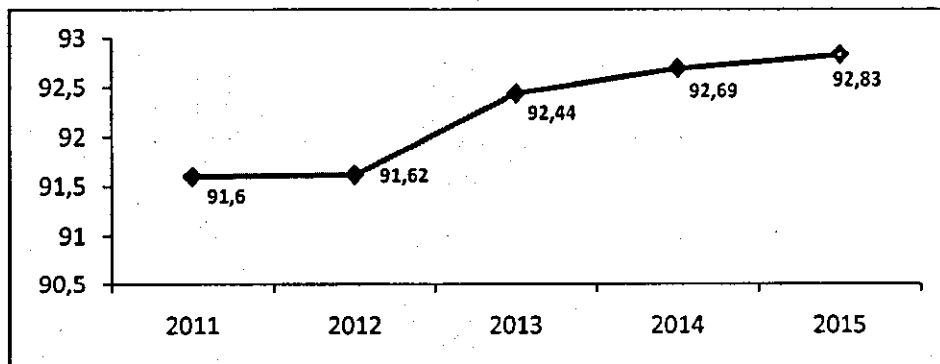
2.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Indikator angka melek huruf pada awal periode tahun 2011 adalah 91,6%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2015 mencapai 92,83%.

Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Pacitan. Maka capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 92,83%. Berikut adalah grafik angka melek huruf Kabupaten Pacitan:

Grafik 2.8
Angka Melek Huruf (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



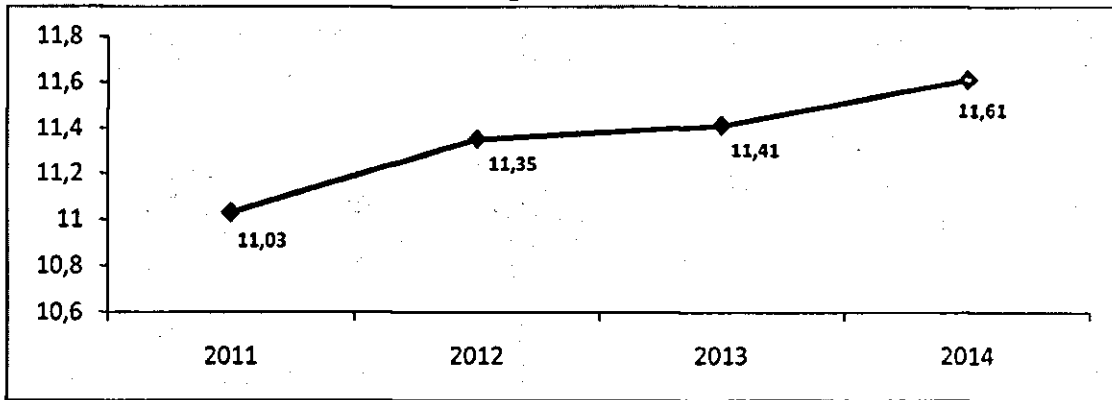
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator harapan lama sekolah pada tahun 2011 mencapai 11,03 tahun, kondisi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 meningkat menjadi 11,35 tahun, 2013 menjadi 11,41 tahun, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,61 tahun. Berikut adalah grafik harapan lama sekolah tahun di Kabupaten Pacitan 2011-2014:

Grafik 2.9
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Pacitan

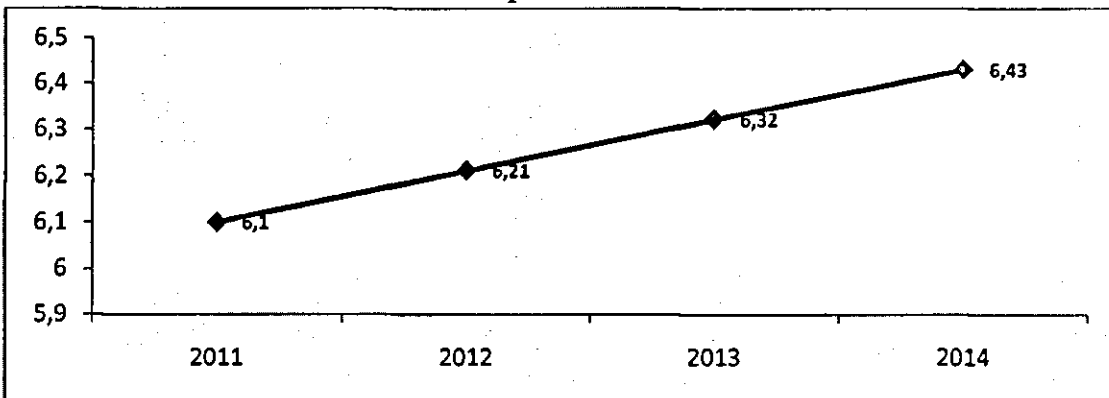


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 adalah 6,10 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 6,43 tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan:

Grafik 2.10
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Pacitan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

d. Angka Partisipasi Kasar

Indikator angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A pada awal periode tahun 2011 adalah 103,10%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 103,12%. Indikator angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B pada awal periode tahun 2011 adalah 97,25%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2015 tercatat 98,62%. Indikator angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C pada awal periode tahun 2011 adalah 68,05%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 71,54%. Berikut adalah tabel angka partisipasi kasar

Paraf Hierarki	Kabupaten Pacitan
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Tersort:
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

Tabel 2.20
 Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD/MI/Paket A	103,1	103,11	103,1	103,11	103,12
APK SMP/MTs/Paket B	97,25	97,34	97,45	97,91	98,62
APK SMA/SMK/MA/Paket C	68,05	68,35	69,09	70,15	71,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Kualitas penduduk suatu daerah dapat diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Komposisi penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah tamat SD/ sederajat yaitu mencapai 174.421 jiwa atau 36,72%. Sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat mencapai 100.465 jiwa atau 21,15%. Adapun penduduk dengan tamatan perguruan tinggi baru berjumlah 20.678 jiwa atau 4,35.

Tabel 2.21
 Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
 Tahun 2014 Kabupaten Pacitan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
Tdk/belum pernah sekolah	5.495	23.767	29.262	6,16
Tdk/belum tamat SD/ sederajat	44.193	41.874	86.067	18,12
Tamat SD/ sederajat	86.752	87.669	174.421	36,72
Tamat SLTP/ sederajat	43.595	56.870	100.465	21,15
Tamat SMU/ sederajat	21.062	13.403	34.465	7,26
Tamat SM Kejuruan	19.107	10.487	29.594	6,23
Tamat Perguruan Tinggi	9.726	10.952	20.678	4,35
Jumlah	229.930	245.022	474.952	100

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

f. Angka Partisipasi Murni

Indikator angka partisipasi murni SD/MI/Paket A pada awal periode tahun 2011 adalah 98,21%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 99,03%.

Indikator angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B pada awal periode tahun 2011 adalah 82,49%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 85,14%.

Indikator angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C pada awal periode tahun 2011 adalah 54,5%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 60,44%. Berikut adalah tabel angka partisipasi murni Kabupaten Pacitan:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Maklum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni (%) Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
APMSD/MI	98,21	98,91	98,91	98,99	99,03
APM SMP/MTs	82,49	82,72	82,81	84,23	85,14
APM SMA/SMK/MA/Paket C	54,5	55,38	55,56	59,86	60,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.2.2.2 Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi sama dengan 1000 kelahiran bayi dalam kurun waktu setahun dikurangi AKB.

Tabel 2.23
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2010-2015
Kabupaten Pacitan

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12,38	11,57	11,4	9,98	8,86	8,41
2	Angka kelangsungan hidup bayi	987,62	988,43	988,6	990,02	991,14	991,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2015 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dari 1000 bayi yang dilahirkan sebanyak 991 bayi yang dapat terus hidup.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Berdasarkan data tahun 2011 sampai dengan 2015 nilai AKI fluktuatif dari waktu ke waktu, sehingga upaya untuk melanjutkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Berikut adalah tabel perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Tabag	
...	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.24
 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

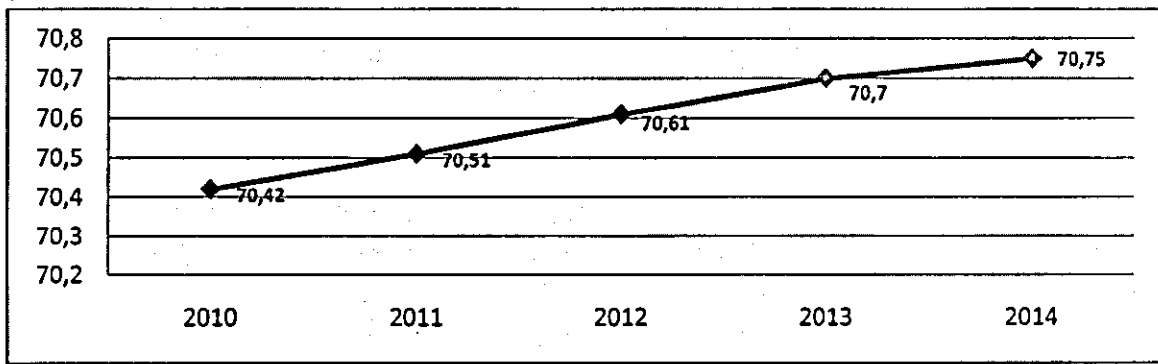
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu	105,17	95,01	133,03	118,17	76,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Angka Usia Harapan Hidup

Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup masyarakat yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan angka usia harapan hidup pada tahun 2010-2014 sebesar 0,33, dari 70,42 tahun pada tahun 2010 menjadi 70,75 tahun pada tahun 2014.

Grafik 2.11
 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014
 Kabupaten Pacitan



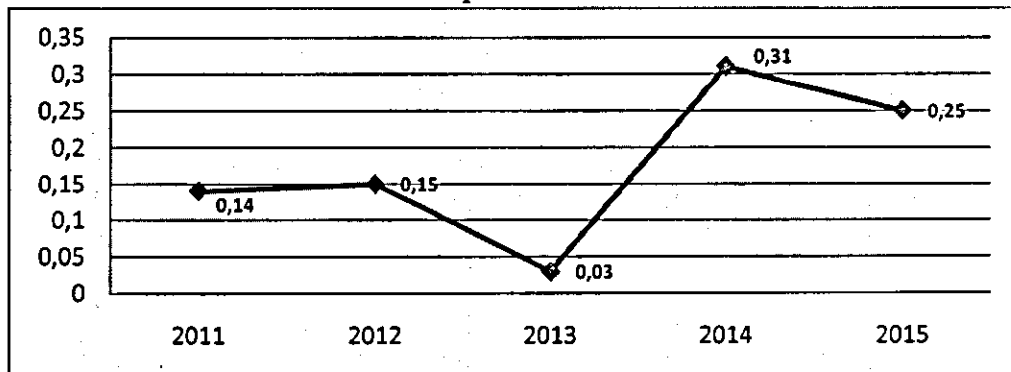
Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,14 mengalami fluktuatif sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,25.

Capaian selalu mencapai target <1 per 1000 balita. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil menjaga Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk tetap di bawah <1 per 1000 balita, sehingga target nasional telah terpenuhi. Berikut adalah grafik persentase gizi buruk Kabupaten Pacitan.

Grafik 2.12
 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
K. K. K. K.	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1	
2	
3	

2.2.2.3 Pertanian

a. Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan

Indikator persentase penduduk yang memiliki lahan bertujuan untuk memperlihatkan proporsi penduduk Pacitan yang memiliki lahan. Namun data yang dipublikasikan oleh BPS tidak menggunakan indikator tersebut melainkan data banyaknya produk sertifikat menurut jenis sertifikat selama beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, untuk menyajikan kepemilikan lahan di Pacitan digunakan indikator Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, pada Tahun 2010 hak milik (perorangan) sebanyak 2.884 sertifikat meningkat menjadi 9.801 sertifikat pada tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi 7.002 produk sertifikat. Selengkapnya banyaknya produk sertifikat menurut jenis sertifikat dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 2.25
Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat Tahun 2010 - 2014
Kabupaten Pacitan

Jenis Sertifikat	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Hak Milik (Perorangan)	2.884	4.458	7.799	9.801	7.002
Hak Guna Bangunan	1	5	4	146	2
Hak Pakai (Instansi)	15	-	31	80	7
Wakaf	9	-	5	51	25

Sumber Data: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

a. Persentase Penduduk Yang Bekerja

Indikator kinerja persentase penduduk yang bekerja pada awal periode tahun 2011 mencapai 98,46 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 98,78. Berikut adalah tabel persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.26
Persentase Penduduk Yang Bekerja Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase penduduk yang bekerja	98,46	98,98	99,01	98,92	98,78

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	

2.2.3.1 Kebudayaan

a. Jumlah Grup Kesenian

Indikator Kinerja Jumlah grup kesenian pada awal periode tahun 2011 mencapai 18 grup mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 45 grup kesenian. Berikut adalah tabel jumlah grup kesenian di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.27
Jumlah Grup Kesenian Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah grup kesenian	18	24	25	35	45

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Gedung Kesenian

Indikator Kinerja jumlah gedung kesenian pada awal periode tahun 2011 mencapai 1 buah gedung kesenian dan bertambah 1 gedung lagi pada tahun 2014, sehingga kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 2 buah gedung kesenian. Berikut adalah tabel gedung kesenian Kabupaten Pacitan:

Tabel 2.28
Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Gedung kesenian	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

a. Jumlah Grup Olahraga

Indikator kinerja jumlah grup olahraga pada tahun 2011 mencapai 80 grup olahraga dan pada tahun 2015 mencapai 138 grup olahraga. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan sebanyak 58 grup olahraga. Berikut adalah tabel jumlah grup olahraga Kabupaten Pacitan:

Tabel 2.29
Jumlah Grup Olahraga Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Grup Olahraga	80	80	137	137	138

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Gedung Olahraga

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 mencapai 64 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan gedung olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tahun 2011 sebanyak 3 unit gedung olahraga dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7 unit gedung olahraga. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan pengelolaan sebanyak 4 gedung olahraga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.30 sebagai berikut:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	

Tabel 2.30
Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Gedung Olahraga	3	4	4	7	7

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan aspek kedua dari tiga aspek pada indikator kinerja kunci yang tercantum pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan dibawah ini.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pacitan berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagian dari urusan wajib seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, dan lain sebagainya.

2.3.1.1 Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SD/MI tahun 2015 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,99%, dan APS SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 90,07%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 0,01% anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Pacitan saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Jumlah anak umur Sekolah Dasar yang tidak bersekolah tersebut tetap selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 9,93%. Sehingga ini memberikan gambaran bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di masa datang.

Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 7-12 tahun pada awal periode tahun 2011 adalah 100,57%. Indikator ini selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 99,99%.

Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun pada awal periode tahun 2011 adalah 86,22%. Indikator ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 90,07%. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.31
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

Angka Partisipasi Sekolah (%)	2011	2012	2013	2014	2015
Kelompok usia 7 - 12 tahun	100,57	99,99	99,99	99,99	99,99
Kelompok usia 13 - 15 tahun	86,22	88,33	89,17	89,95	90,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Sekolah SD	420	417	417	416	416
Jumlah Sekolah MI	104	104	103	104	107
Jumlah Sekolah SD/MI	524	521	520	520	523
Jumlah Sekolah SMP	77	69	71	72	72
Jumlah Sekolah Mts	38	47	51	51	51
Jumlah Sekolah SMP/MTs	115	116	122	123	123
Penduduk Usia SD/MI (7-12 tahun)	48.472	46.710	45.654	44.591	44.608
Penduduk Usia SMP/MTs (13-15 tahun)	26.960	27.316	27.188	25.962	25.269
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	108,10	111,54	113,90	116,62	117,24
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	42,66	42,47	44,87	47,38	48,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Melihat tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten Pacitan sampai tahun 2015 tercatat perkembangannya cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia SD dan SMP dapat diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah pendidikan dasar.

3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang baik.

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten Pacitan dengan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.33
Rasio Guru/Murid Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio guru / murid SD/MI	116	110	107	120	118
Rasio guru / murid SMP/MTs	91	100	101	109	108

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

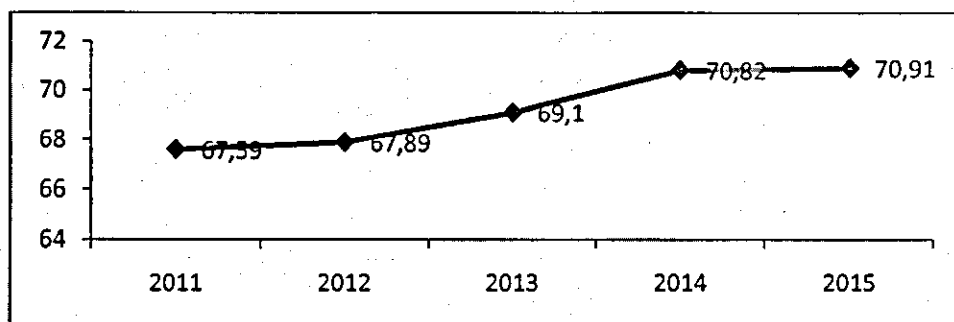
Indikator rasio guru dan murid SD/MI pada awal periode tahun 2011 adalah 116. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 dan 2013 menurun di angka 110 dan 107, namun meningkat pada tahun 2014 dan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 118. Indikator rasio guru dan murid SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 adalah 91 Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 108.

b. Pendidikan Menengah

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SMA/MA/SMK tahun 2011 kelompok umur 16-18 sebesar 67,59%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 32,41% anak umur 16-18 tahun di Kabupaten Pacitan saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Jumlah anak umur SMA/MA/SMK yang tidak bersekolah tahun 2012 menurun menjadi 32,11%, pada tahun 2013 menjadi 30,9% dan tahun 2014 kembali menurun menjadi 29,82%, dan pada tahun 2015 turun menjadi 29,09%. Walau terus mengalami penurunan, namun masih menjadi tugas berat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting guna kemajuan masyarakat. Angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2015 sebesar 70,91%, mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari capaian tahun 2014. Berikut adalah grafik angka partisipasi sekolah pendidikan menengah Kabupaten Pacitan.

Grafik 2.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Tabel 2.34
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Sekolah SMA	10	9	9	9	10
Jumlah Sekolah SMK	25	26	27	29	31
Jumlah Sekolah MA	14	16	16	17	22
Jumlah Sekolah SMA dan MA	49	51	52	55	63
Penduduk Usia 16-18	23222	26772	25756	28324	27225
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	21,10	19,05	20,19	19,42	23,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Melihat tabel diatas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan menengah Kabupaten Pacitan terlihat trend yang fluktuatif dari tahun 2011 hingga tahun 2015, yaitu 21,10 pada tahun 2011, turun menjadi 19,05 pada tahun 2012, meningkat menjadi 20,19 pada tahun 2013, dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 19,42 dan meningkat di tahun 2015 menjadi 23,14. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk usia 16-18 tahun masih dapat diimbangi oleh penambahan jumlah sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Pacitan, walaupun rasio tersebut masih dapat ditingkatkan apalagi mulai tahun 2017 pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru/murid bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang baik.

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid untuk pendidikan menengah pada Kabupaten Pacitan dengan periode 2011- 2015:

Tabel 2.35
Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio guru / murid SMA	77	73	71	75	77
Rasio guru / murid SMK	80	99	99	105	105
Rasio guru / murid MA	166	145	132	154	185

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator rasio guru dan murid SMA pada awal periode tahun 2011 adalah 77. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 menjadi 73, pada tahun 2013 menjadi 71, tahun 2014 menjadi 75 dan akhir tahun 2015 mencapai 77. Indikator rasio guru dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Murid	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Ternait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

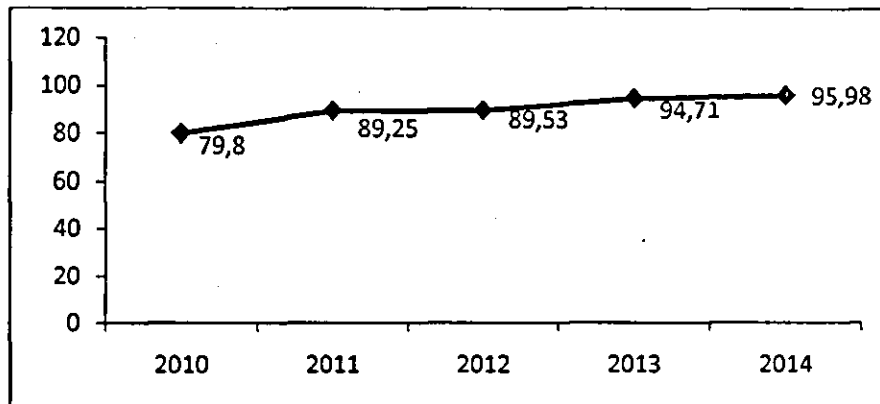
murid SMK pada awal periode tahun 2011 adalah 80. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 105. Indikator rasio guru dan murid MA pada awal periode tahun 2011 adalah 166. Indikator ini juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 menjadi 145, tahun 2013 menjadi 132, tahun 2014 meningkat menjadi 154 dan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 185.

c. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah secara baik.

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Grafik 2.14
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) Tahun 2010 - 2014
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 adalah 79,8%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 95,98%.

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 87,14%, dan 86,32%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 94,71 untuk SMP/MTs, dan 92,81 untuk SMA/SMK/MA.

Tabel 2.36
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	87,14	87,58	88,34	93,34	94,71
Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	86,32	89,1	88,31	91,21	92,81

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Konreg	<i>[Signature]</i>	1	
Tukang	<i>[Signature]</i>	2	
		3	

d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50,3	52,07	52,54	57,85	63,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

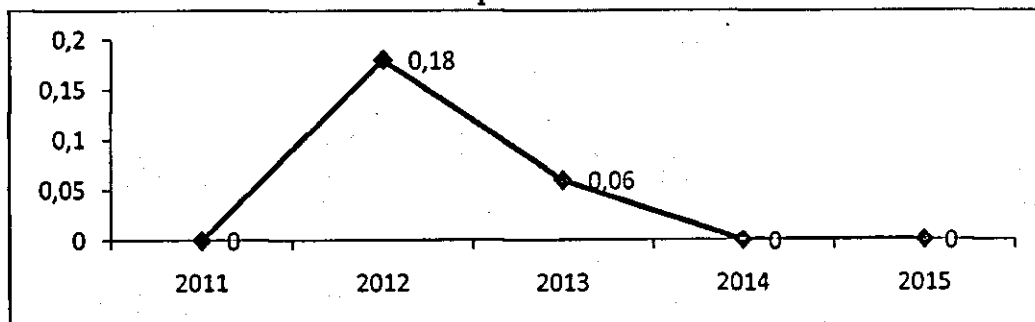
Indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD pada awal periode tahun 2011 adalah 50,3%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 63,02%. Namun bila dengan rumus perhitungan baru, dimana angka penyebut yang sebelumnya menggunakan penduduk usia 0 - 6 tahun menjadi penduduk usia 3 - 6 tahun maka APK PAUD menjadi 75,81%.

e. Angka Putus Sekolah

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator angka putus sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 adalah 0%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,18%, tahun 2013 menjadi 0,06%, tahun 2014 dan 2015 menjadi 0%. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SD/MI :

Grafik 2.15
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

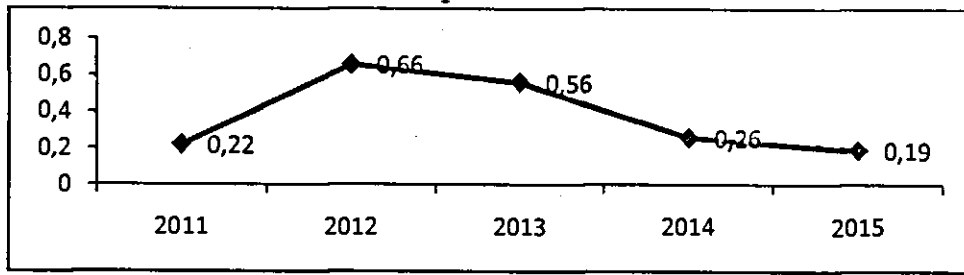
2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Indikator angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 0,22%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 mencapai 0,66%, tahun 2013 mencapai 0,56%, tahun 2014 mencapai 0,26% dan tahun 2015 mencapai 0,19% untuk SMP/MTs. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SMP/MTs:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
< tag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Grafik 2.16
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

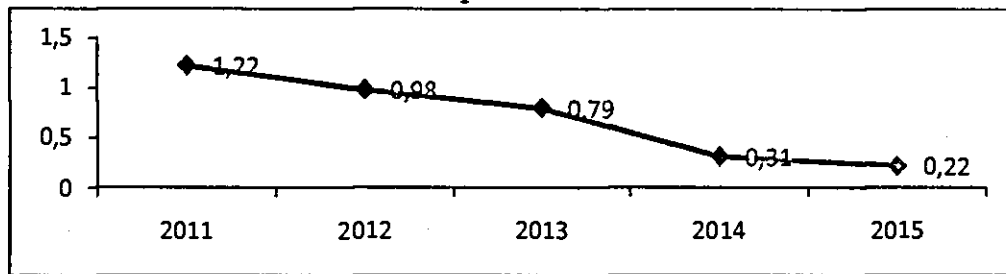


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Indikator angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 1,22%. Indikator ini selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,22%. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.17
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

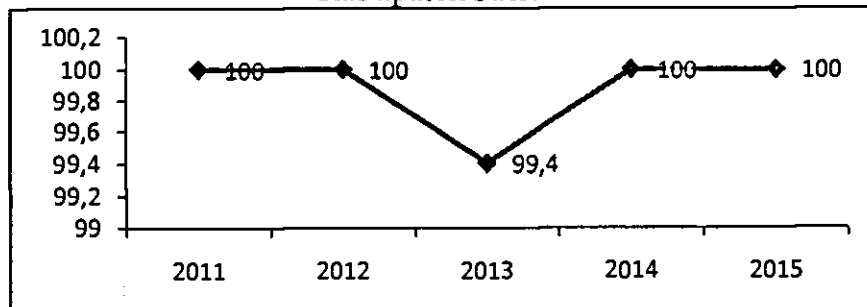
f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Indikator angka kelulusan sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 100%. Indikator tersebut dapat dipertahankan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SD/MI tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.18
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Parat Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
rtukum	

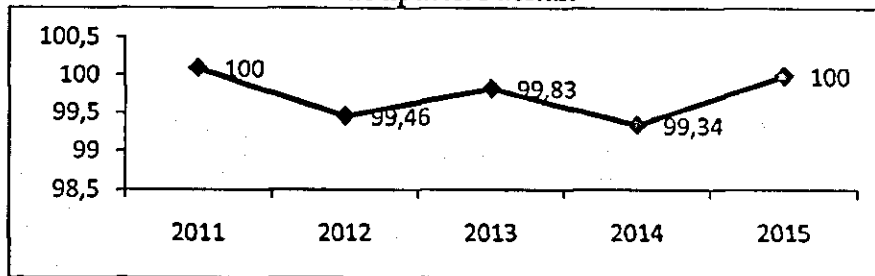
Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	



2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Indikator angka kelulusan sekolah SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 100%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 mencapai 99,46%, tahun 2013 mencapai 99,83%, tahun 2014 mencapai 99,34% dan Tahun 2015 mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMP/MTs tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.19
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

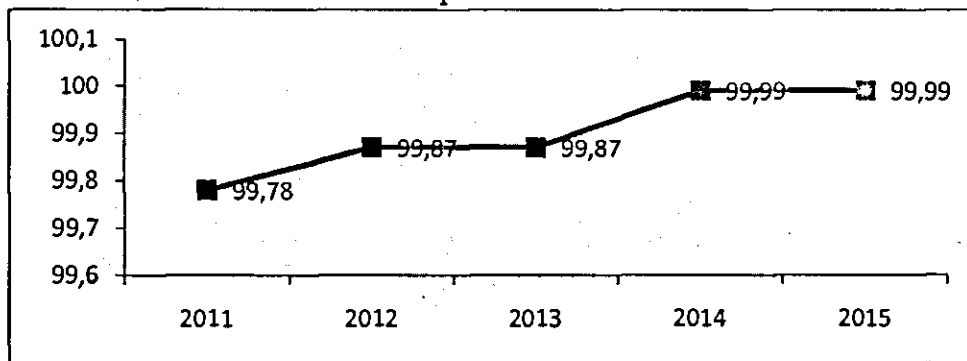


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Indikator angka kelulusan sekolah SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 99,78%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 99,99%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2011 hingga tahun 2015.

Grafik 2.20
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

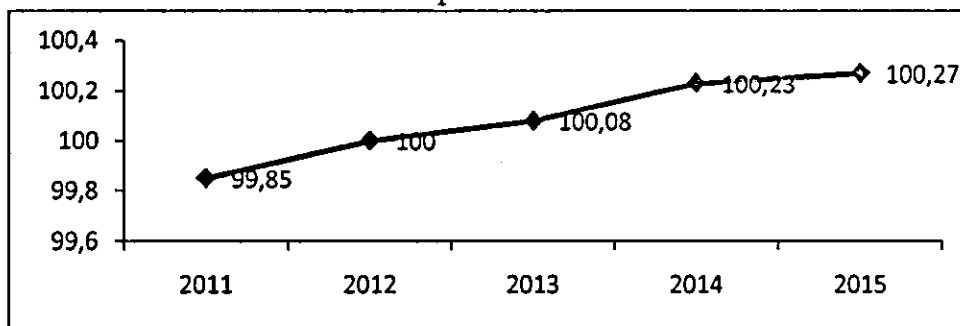
Indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 99,85%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 100,27%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2011 - 2015:

Paraf hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Substansi	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Grafik 2.21
 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

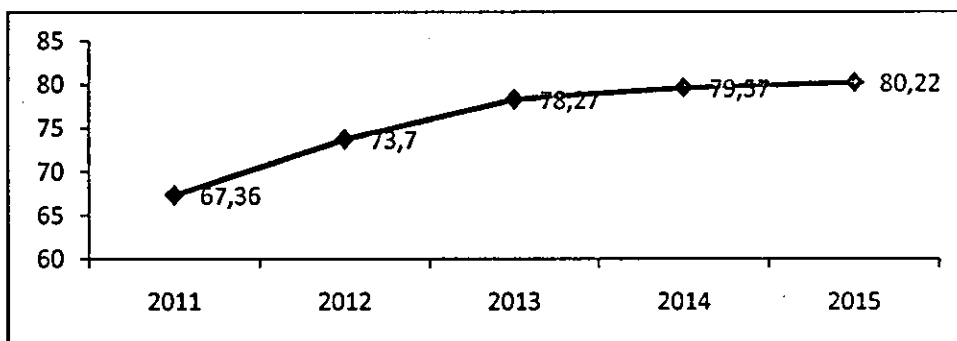


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Indikator angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 67,36%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 80,22%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2011 hingga tahun 2015 :

Grafik 2.22
 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

6. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi murid didiknya. Standar pendidik atau guru saat ini adalah Sarjana atau Diploma IV. Pemerintah pusat saat ini melakukan sertifikasi terhadap guru, program tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajar.

Indikator guru yang memenuhi kualifikasi akademik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 78,31%, 84,89%, dan 98,48%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 87,78% untuk SD/MI, 95,51% untuk SMP/MTs, dan 98,92% untuk SMA/SMK/MA. Berikut adalah grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Penrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.38
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%)	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	78,31	79,07	82,80	86,64	87,78
SMP/MTs	84,89	86,67	89,84	92,44	95,51
SMA/SMK/MA	98,48	98,33	94,23	96,66	98,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

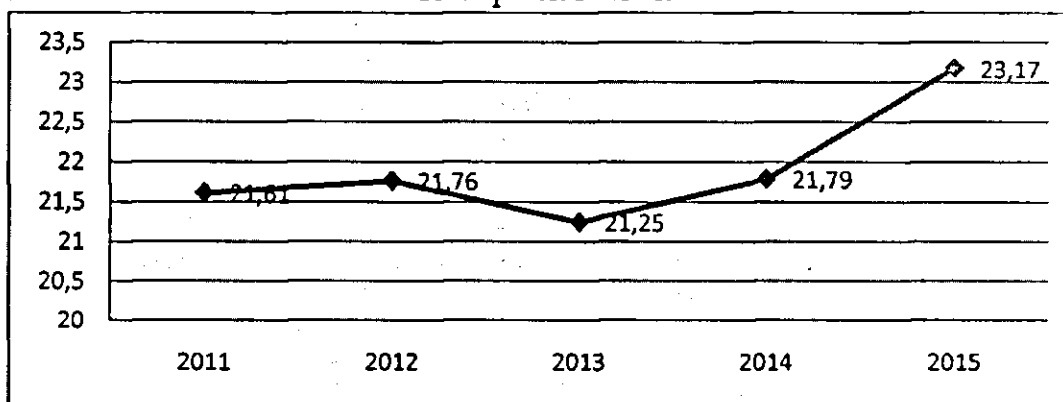
2.3.1.2 Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indikator rasio posyandu per satuan balita pada awal periode tahun 2011 mencapai 21,61 posyandu per 1000 balita mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 23,17 posyandu per 1000 balita. Berikut ini disajikan grafik perkembangan rasio posyandu per satuan balita tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.23
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

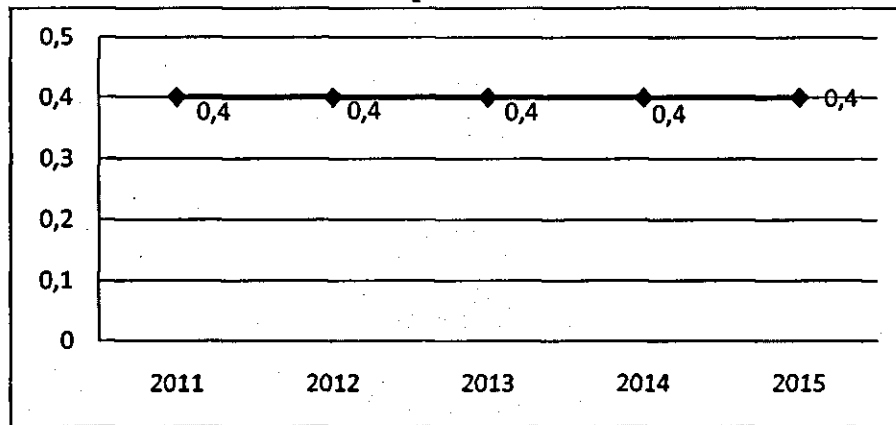
Rasio puskesmas per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan puskesmas dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Indikator Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,04 per 1000 penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 0,04 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011-2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Humas	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Grafik 2.24
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



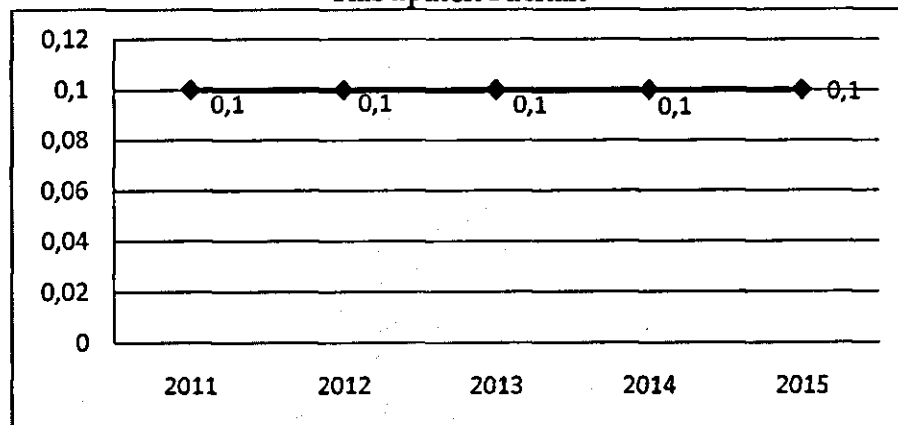
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Rasio Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio pustu per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan pustu dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Indikator rasio pustu per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,1 per 1000 penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 0,1 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio pustu per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011-2015 :

Grafik 2.25
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada Kabupaten Pacitan memiliki angka yang sangat kecil, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten Pacitan, tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dari tahun 2011

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

yang hanya 1 RS dan tahun 2014 hanya bertambah 1, yaitu menjadi 2 Rumah Sakit yang terdapat pada Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.39
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

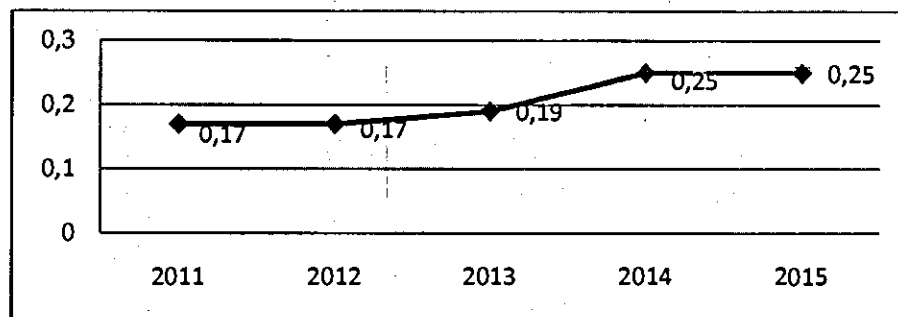
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	2	2
Jumlah Penduduk	542.417	543.391	512.314	576.392	576.969
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0018	0,0018	0,0059	0,0035	0,0034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,17 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 0,25 per 1000 penduduk pada tahun 2015. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter umum dan dokter spesialis per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan dari tahun 2011- 2015 :

Grafik 2.26
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

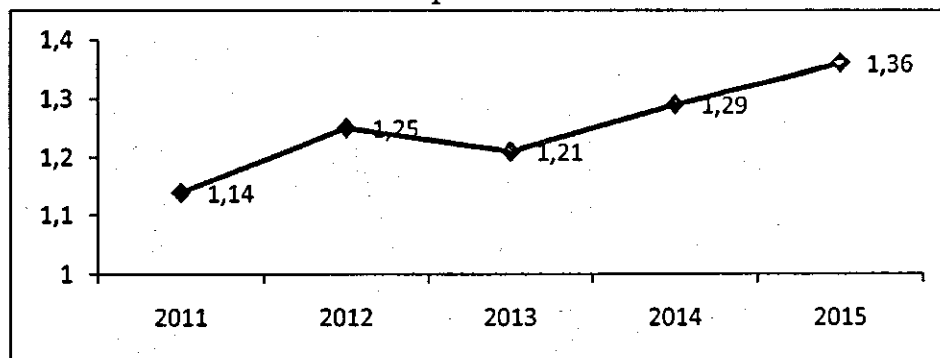


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 1,14 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 1,36 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio tenaga medis per satuan penduduk dari tahun 2011 hingga tahun 2015 Kabupaten Pacitan :

Grafik 2.27
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



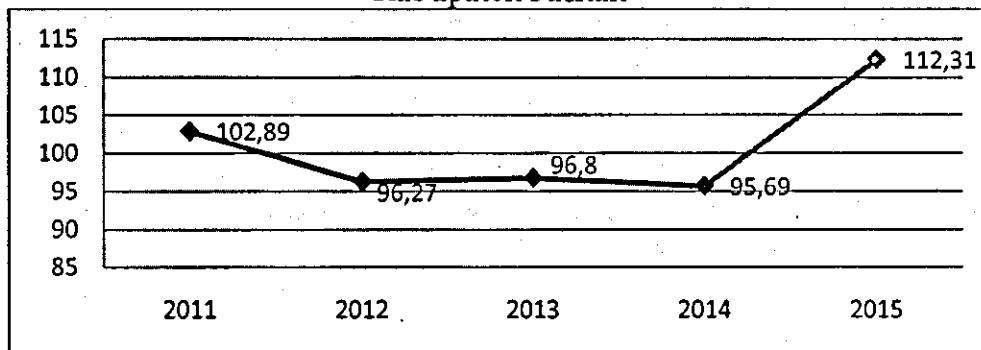
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sakda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		BAPPEDA	
Kabag		SKPD/ Bagian Terkait	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

g. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2011 mencapai 102,89% mengalami penurunan tahun 2012 menjadi 96,27%, meningkat sedikit menjadi 96,80%, kemudian menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 95,69%, dan terakhir meningkat menjadi 112,31% pada tahun 2015. Berikut ini disajikan grafik cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani:

Grafik 2.28
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

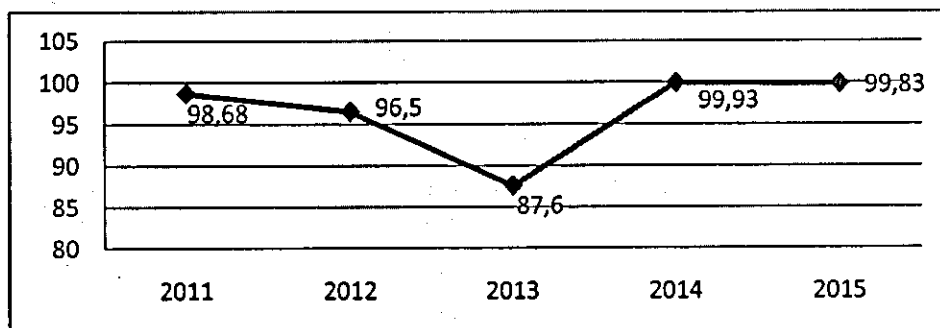


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

h. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2011 mencapai 98,68% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 menurun menjadi 96,5%, menjadi 87,6% pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 99,93% pada tahun 2014, kemudian sedikit menurun menjadi 99,83% pada tahun 2015.

Grafik 2.29
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

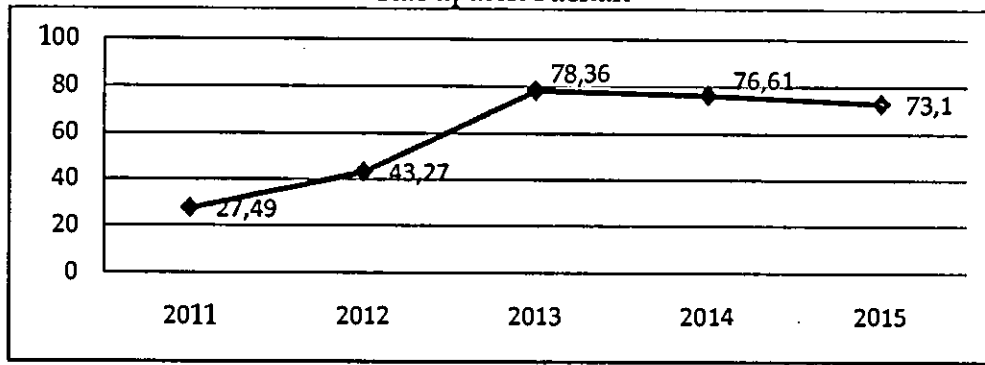
i. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada awal periode tahun 2011 mencapai 27,49% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi pada tahun 2015 mencapai 73,10%. Data realisasi cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) setiap tahunnya disajikan sebagaimana grafik berikut:

Paraf Hierarki	
Sskda	<i>[Signature]</i>
Asistan	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Grafik 2.30
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

j. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤ 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada Kabupaten Pacitan yang tercatat dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 2011 - 2016 sudah mencapai angka 100% dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini perlu dipertahankan oleh pemerintah daerah karena terkait dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

k. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TBC BTA positif pada awal periode tahun 2011 mencapai 28,47% mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan pada tahun 2015 mencapai 32,70%. Berikut ini disajikan tabel cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA tahun 2011 sampai dengan 2015:

Tabel 2.40
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penemuan pasien bam TBC BTA positif	28,47	21,7	38,77	28,82	32,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Penirakasa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

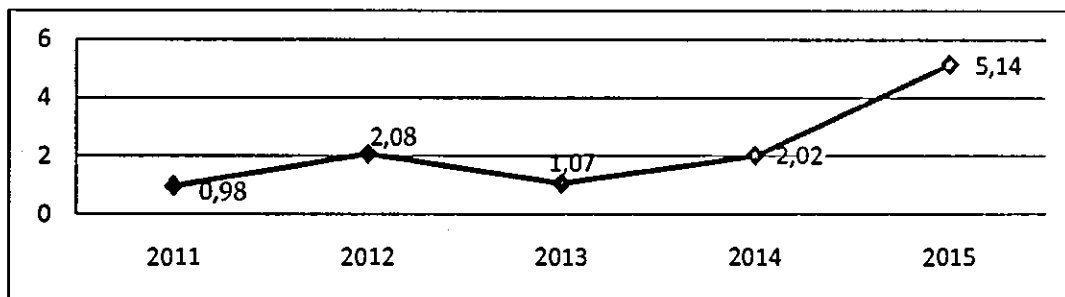
I. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Definisi tersebut merupakan definisi operasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Penderita DBD yang ditangani pada awal periode tahun 2011 mencapai 100%. Capaian ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015.

m. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2011 mencapai 0,98% dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 5,14%. Berikut ini disajikan grafik cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.31
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

n. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali pada satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Definisi tersebut menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 Tahun 2008.

Tabel 2.41
Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Kunjungan Bayi	102,8	99,87	93,78	95,8	95,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2011 mencapai 102,8% mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 95,08%.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



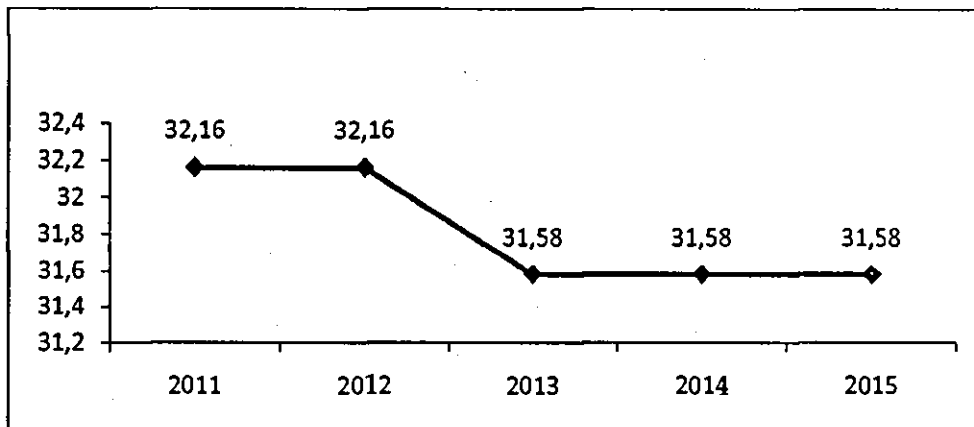
o. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat. Cakupan puskesmas adalah kecamatan, tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas pada tahun 2011 mencapai 200% dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 200%. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berhasil memenuhi target 1 kecamatan ada 2 puskesmas.

p. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya.

Grafik 2.32
Cakupan Puskesmas Pembantu (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2011 mencapai 32,16% mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 31,58%.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan kabupaten. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan.

Tabel 2.42
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	2011	2012	2013	2014	2015
Jalan	50,23	51,11	52,12	54,61	56,152
Jembatan	90,91	91,57	92,15	92,45	92,81

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Capaian kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 50,23% dari total panjang jalan di Kabupaten Pacitan, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 56,152%. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2011 mencapai 90,91% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 92,81%.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung dari panjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian. Capaian kinerja rasio jaringan irigasi kabupaten pada tahun 2011 mencapai 0,085 mengalami penurunan menjadi 0,082 pada tahun 2012 dan 2013, kemudian meningkat mencapai 0,0829 pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berikut adalah tabel rasio jaringan irigasi Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.43
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Jaringan Irigasi	0,085	0,082	0,082	0,0829	0,0829

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan masing-masing tempat ibadah yang ada di Kabupaten Pacitan, dibagi dengan jumlah penduduk yang memeluk masing-masing agama yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dikali dengan 1000. Berikut ini data rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2014 :

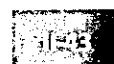
Tabel 2.44
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Pacitan

Keterangan	2011	2012	2013	2014
Masjid	1556	1556	1546	1546
Langgar/Musholla	1051	1051	1617	1617
Gereja	7	8	5	4
Pura	0	0	0	0
Vihara	0	0	0	0
Islam	589633	589636	599759	597746
Kristen	534	534	557	534
Katholik	236	236	338	338
Hindu	2	2	4	3
Budha	3	3	3	3
Konhucu	27	27	9	0
Rasio Masjid	2,64	2,64	2,58	2,59
Rasio Langgar/Musholla	1,78	1,78	2,70	2,71
Rasio Gereja	13,11	14,98	8,98	7,49
Rasio Pura	0,00	0,00	0,00	0,00
Rasio Vihara	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Pacitan Dalam Angka 2015 (Data Diolah)

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asistan	✓
Kabag	✓
Maklum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Indikator kinerja rumah bersanitasi pada tahun 2011 mencapai 78,52% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,56%. Berikut adalah tabel persentase rumah tinggal bersanitasi :

Tabel 2.45
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	78,52	79,66	80,77	86,27	87,56

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,31 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,36. Berikut adalah tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.46
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,31	0,33	0,34	0,36	0,36

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator kinerja rasio rumah layak huni pada awal periode tahun 2011 mencapai 23,07 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 25,39. Berikut adalah tabel rasio rumah layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.47
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Rumah Layak Huni	23,07	23,8	23,90	25,31	25,39

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

g. Rasio Pemukiman Layak Huni

Indikator kinerja rasio permukiman layak huni pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,97 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,995. Berikut adalah tabel rasio permukiman layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.48
Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Pemukiman Layak Huni	0,97	0,97	0,98	0,99	0,995

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Aaisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



h. Panjang Jalan Dilalui Roda 4

Jalan utama kabupaten yang dilalui roda 4 (m) di Kabupaten Pacitan masuk status jalan kabupaten, meskipun kondisinya ada yang baik dan ada yang rusak. Panjang yang masuk status jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan sepanjang 798.000 m pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2015 masih tetap sepanjang 798.000 m.

i. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4)

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) pada tahun 2011 sepanjang 478.800 m dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 798.000 m pada tahun 2015. Berikut adalah tabel jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.49
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk Minimal Dilalui Roda 4 (m) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4)	478.800	478.800	496.149	794.513	798.000

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

j. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Capaian kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) pada tahun 2011 sepanjang 335.160 m dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 sepanjang 448.091 m. Berikut adalah tabel panjang jalan Kabupaten Pacitan dalam kondisi baik (>40 km/jam) dari tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.50
Panjang Jalan Kabupaten Pacitan Dalam Kondisi Baik > 40 Km/Jam (m)
Tahun 2011 - 2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	335.160	337.660	363.554	435.763	448.091

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

k. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) pada tahun 2011 mencapai 13.330 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 24.137,5. Berikut adalah tabel panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase minimal 1,5 m di Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Tabel 2.51
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Minimal 1,5m (m)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5m)	13.330	13.525	18.120	20.766	24.137,5

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

l. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Perhitungan drainase dalam kondisi baik dihitung dengan melihat panjang drainase rusak/tersumbat dibagi dengan panjang seluruh drainase di Kabupaten Pacitan dikali dengan 100%.

Tabel 2.52
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	60,54	64,54	70,70	75,62	80,54

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Capaian kinerja drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 2011 mencapai 60,54 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 80,54.

m. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Luas sawah beririgasi kabupaten dalam kondisi baik pada akhir tahun 2015 sebesar 4.489 Ha. Kondisi ini meningkat 5,70% dari tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 telah mengalami peningkatan sebanyak 25,15%. Berikut adalah tabel luas irigasi Kabupaten Pacitan dalam kondisi baik tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.53
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	3.587	3.600	4.237	4.247	4.489

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

n. Luas Permukiman

Capaian kinerja luas permukiman pada tahun 2011 mencapai 13.323,75 Ha mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 14.357,73 Ha. Berikut adalah tabel luas permukiman Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.54
Luas Pemukiman (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Pemukiman	13.323,75	13.496,08	13.668,41	14.013,07	14.357,73

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.4 Perumahan

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga.

Tabel 2.55
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan	50,3	51,8	60,40	64,48	69,02
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pedesaan	33,3	33,9	36,21	37,51	37,92

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih perkotaan pada tahun 2011 mencapai 50,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 69,02%. Sedangkan capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih pedesaan pada tahun 2011 mencapai 33,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 37,92%.

Tabel Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas terdiri dua indikator yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pedesaan, untuk perhitungan kedepan kedua indikator tersebut akan disatukan dalam indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.

b. Penduduk Berakses Air Bersih

Persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2011 mencapai 38,22% dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 50,05% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.56
Penduduk Berakses Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk berakses air bersih	38,22	41,08	43,94	44,67	50,05

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Capaian kinerja jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 mencapai 84.067 rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 133.678 rumah tangga. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.57
Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Pengguna Listrik	84.067	94.050	116.550	123.613	133.678

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Rumah Bersanitasi

Capaian kinerja rumah bersanitasi pada awal periode tahun 2011 mencapai 78,52% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,56%. Berikut adalah tabel rumah bersanitasi pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.58
Rumah Tangga Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Bersanitasi	78,52	79,66	80,77	86,27	87,56

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2011 mencapai 0,07 mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,057. Berikut adalah tabel lingkungan pemukiman kumuh Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.59
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,07	0,067	0,061	0,059	0,057

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Rumah Layak Huni

Capaian kinerja rumah layak huni pada tahun 2011 mencapai 89,37% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 98,70. Berikut adalah tabel rumah layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 :

Tabel 2.60
Rumah Layak Huni (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Layak Huni	89,37	93,46	97,48	98,62	98,70

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Tabel Rumah Layak Huni (%) tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan seperti tersebut di atas, pada perhitungan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian mengingat adanya perubahan data penduduk dan jumlah rumah layak huni.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA <input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	



2.3.1.5 Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPI/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30%. Indikator ini dihitung dengan menghitung luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB.

Tabel 2.61
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPI/HGB Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB	35,26	35,43	35,94	36,40	36,70

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2011 mencapai 35,26 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 36,70.

Tabel 2.62
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Ditertibkan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Ditertibkan	52	85	101	166	181

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditertibkan pada tahun 2011 terdapat 52 rekomendasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 181 rekomendasi.

Tabel 2.63
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dihasilkan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan	0	0	1	2	4

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan pada tahun 2011 belum terdapat dokumen yang diciptakan, tetapi mengalami peningkatan hingga tahun 2015, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 4 dokumen.

Lebih lanjut, disajikan juga informasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. RTH publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan yang

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Penrakarsa	
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	



digunakan untuk kepentingan umum. Indikator penyediaan RTH Publik adalah persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Tabel 2.64
 Persentase RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
 Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11,1	13,4	15,7	18	19,2

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan

Capaian kinerja rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan pada tahun 2011 mencapai 68,91 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 71,72 dengan rata-rata kenaikan 3,78% setiap tahunnya. Berikut adalah tabel rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Pacitan :

Tabel 2.65
 Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	68,91	69,15	69,44	69,81	71,72

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya jalan, alun-alun, taman, pantai, gedung pemerintahan yang terbuka untuk umum, dan perpustakaan umum. Indikator kinerja ruang publik yang berubah peruntukannya pada awal periode tahun 2011 mencapai 0%, artinya tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya dan bertahan selama kurun waktu 4 tahun sampai dengan tahun 2015.

d. Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penataan Ruang

Data terkait ketersediaan informasi penataan ruang merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Informasi ini disajikan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Indikator capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah telah terealisasi pada tahun 2011 dengan telah disusunnya RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025.

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Parsi Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah telah terealisasi pada Tahun 2011 dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Selanjutnya, pada Tahun 2013, dikarenakan adanya regulasi baru mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada beberapa urusan yang menjadi kewenangan daerah dan adanya perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka telah dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Dengan demikian, Kabupaten Pacitan telah memiliki RPJMD Tahun 2011-2016.

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Daerah

Indikator capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah telah dilaksanakan setiap tahun. Terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

2.3.1.7 Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang yang menggunakan angkutan umum tahun 2011 sebesar 7.019.808 menurun menjadi 6.520.078 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. Berikut adalah tabel jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.66
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	7.019.808	6.537.696	6.728.670	6.210.811	6.520.708

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Ijin Trayek

Jumlah ijin trayek Kabupaten Pacitan tercapai sejalan dengan diadakannya penertiban di jalan umum lebih intens dan diadakannya pembinaan serta pendekatan secara persuasif kepada para pengusaha angkutan umum terutama angkutan pedesaan. Dari jumlah ijin tahun 2015 yang dikeluarkan sebesar 12 ijin trayek meningkat di tahun 2015 mencapai 51 ijin trayek. Berikut adalah tabel jumlah ijin trayek Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 - 2015:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Tabel 2.67
Jumlah Ijin Trayek (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Ijin Trayek	12	12	20	25	51

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Capaian jumlah uji KIR kendaraan umum pada tahun 2011 adalah sebesar 2.283, mengalami peningkatan tahun 2012 menjadi 2.466 dan meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 3.152, akan tetapi mengalami penurunan menjadi 2.525 di tahun 2014 dan meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 3.957 kendaraan. Berikut adalah tabel jumlah uji KIR Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.68
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	2.283	2.466	3.152	2.464	3.957

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada awal periode tahun 2011 mencapai 5 lokasi tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 tetap 5 lokasi. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena dibutuhkan biaya investasi yang besar untuk pembangunan prasarana tersebut. Dengan kondisi APBD seperti saat daerah belum mampu membiayai sendiri, sehingga perlu kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan diantara pembangunan pelabuhan Teluk Begelon di Desa Kembang Kecamatan Pacitan yang direncanakan sejak tahun 2011. Pembangunan tersebut melibatkan kerjasama antara pemerintah kabupaten sebagai penyedia lahan, pemerintah provinsi dan pusat sebagai pelaksana pembangunan untuk konstruksi dan jalan akses. Progres pembangunan pelabuhan hingga tahun 2015 masih sedang berjalan untuk pekerjaan pematangan lahan dan konstruksi dermaga/trestle sehingga belum bisa dimasukkan dalam realisasi karena pembangunan belum selesai.

e. Jumlah Angkutan Darat

Angkutan Darat meliputi sedan, bus, mini bus, truk dan jeep. Tahun 2011 jumlahnya sebesar 9.470 kendaraan dan menurun sampai Tahun 2015 menjadi sebesar 8.483 kendaraan. Berikut adalah tabel jumlah angkutan darat pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.69
Jumlah Angkutan Darat (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Angkutan Darat	9.470	7.519	7.652	8.570	8.483

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

f. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum dalam indikator capaian tahun 2011 terealisasi 1.468 kendaraan, mengalami fluktuasi setiap tahunnya menjadi 1.434 pada tahun 2012, meningkat menjadi 1.576 pada tahun 2013, menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 1.252 dan kemudian meningkat menjadi 1.670 pada tahun 2015. Fluktuasi ini disebabkan karena beberapa kendaraan wajib uji terjadi pergantian kepemilikan dan mutasi kendaraan angkutan umum baik keluar kota maupun mutasi dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi serta kesadaran untuk melakukan uji kendaraan bermotor rendah. Berikut adalah tabel kepemilikan KIR angkutan umum pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.70
Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	1.468	1.434	1.576	1.252	1670

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

g. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Capaian kinerja lama pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2011 mencapai 40 menit mengalami percepatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 30 menit. Hal ini dapat tercapai dikarenakan dalam proses uji kendaraan bermotor sudah menggunakan Sistem Informasi Uji Kendaraan (SIUK). Berikut adalah tabel lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015:

Tabel 2.71
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	40	30	30	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

h. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu sangat dibutuhkan bagi keselamatan transportasi, karena berfungsi untuk memberi tahu terhadap apa saja yang terdapat dalam setiap perjalanan darat, air maupun udara bagi pengendara. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2011 mencapai 27,80% meningkat menjadi 29,12% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel pemasangan rambu-rambu pada jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :


Tabel 2.72
Pemasangan Rambu-Rambu (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

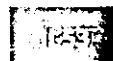
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pemasangan Rambu-Rambu	27,80	27,01	28,29	28,59	29,12

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Tabel Pemasangan Rambu-rambu (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan pada perhitungan selanjutnya akan disesuaikan dengan perubahan perhitungan data rambu-rambu yang baru.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



2.3.1.8 Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan hal sangat penting guna menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Indikator dihitung dengan menghitung volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume produksi sampah dikali dengan seratus.

Indikator kinerja penanganan sampah pada tahun 2011 mencapai 87,98% mengalami peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2015 mencapai 90,35%. Berikut adalah persentase penanganan sampah di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.73
Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Penanganan Sampah	87,98	88,60	88,95	89,64	90,35

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL baik untuk dokumen AMDAL ataupun UKL UPL/SPPL pada tahun 2011 mencapai 50 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 100. Hal ini menunjukkan pola pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan AMDAL sudah berjalan di Kabupaten Pacitan dan harus terus dipertahankan. Dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diharapkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan akan dapat dikurangi. Berikut adalah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.74
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	50	60	83	100	100

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Indikator kinerja Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,31% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,36%. Berikut adalah tabel Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.75
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

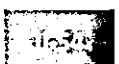
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,31	0,33	0,34	0,36	0,36

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Selain indikator-indikator di bidang lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator lainnya, sebagaimana disajikan berikut ini :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BADEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Tabel 2.76
Kinerja Bidang Lingkungan Hidup 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penghargaan Kebersihan Nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Jumlah Sekolah Adiwiyata	-	-	6	31	41
3	% Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan yang Ditindak Lanjuti	70	80	100	100	100
4	Jumlah Lokasi pemantauan lingkungan yang disampling	25	50	78	112	156
5	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan untuk hasil tembakau	2	2	2	2	2
6	Indeks Tutupan Hutan	-	-	-	-	72,27
7	IKLH	-	-	-	-	73,24
8	Status Mutu Air	51	60	72	86	100
9	Penegakan Hukum	70	80	100	100	100

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.9 Pertanahan

a. Persentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat

Persentase bidang tanah aset pemda yang bersertifikat pada tahun 2011 mencapai 29%, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 36,63%. Berikut adalah tabel persentase bidang tanah aset pemda yang bersertifikat di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.77
Persentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat	29	32,7	32,7	33	36,63

Sumber: Setda Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Capaian kinerja rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,75% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,91%. Berikut adalah tabel rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Tabel 2.78
Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk	0,75	0,87	0,88	0,89	0,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Capaian kinerja bayi berakte kelahiran pada tahun 2011 mencapai 98,1%, meningkat menjadi 100% sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Berikut adalah tabel rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.79
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	98,1	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen penduduk yang sudah memiliki akta nikah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan penduduk yang sudah memiliki akta nikah dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%.

Capaian kinerja pasangan berakte nikah pada tahun 2011 mencapai 100% sama setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini berarti semua pasangan yang ada di Kabupaten Pacitan sudah memiliki akte nikah.

d. Cakupan Penerbitan KTP

Capaian kinerja penerbitan KTP pada tahun 2011 mencapai 75,42% mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2013 menjadi 88,11%, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 89,63%, kemudian kembali meningkat menjadi 91,38% tahun 2015. Berikut adalah tabel cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

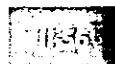
Tabel 2.80
Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Penerbitan KTP	75,42	87,54	88,11	89,63	91,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



e. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Capaian kinerja cakupan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2011 mencapai 64,93% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 81,43%. Berikut adalah tabel cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.81
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	64,93	72,95	77,25	79,06	81,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator kinerja penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2011 telah dilaksanakan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015 telah dilaksanakan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator kinerja partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2011 mencapai 35,68% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 45,56%. Berikut adalah tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.82
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,68	40,49	42,24	42,24	45,56

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Perhitungan Tabel Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas, terdiri dari dua indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta, namun pada perhitungan selanjutnya akan dipisahkan perhitungannya.

b. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur

Jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2011 mencapai 26,34%. Kabupaten Pacitan berhasil menurunkan jumlah tenaga kerja dibawah umur setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 0,01%. Berikut adalah tabel persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

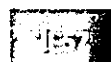
Tabel 2.83
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	26,34	45,39	0,57	0,65	0,01

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hiararki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 mencapai 46,84% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 40,64%, kemudian meningkat menjadi 46,7% pada tahun 2013 dan 79,73 tahun 2014. Pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 79,20%. Berikut adalah tabel partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.84
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	46,84	40,64	46,7	79,73	79,20

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2011 mencapai 41,17%. Hal ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 100%. Berikut adalah tabel penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.85
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2011 - 2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari tindakan Kekerasan	41,17	66,6	70,58	70,27	100

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2011 mencapai 1,98%. Kabupaten Pacitan mampu menurunkan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 1,75%. Berikut adalah tabel rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.86
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,98	1,98	1,96	1,25	1,75

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Cakupan Peserta KB Aktif

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Keluarga berencana (KB) dapat meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Muijwal	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa DAPPEDA	
SKPD/Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.87
Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Peserta KB Aktif	79,31	77,9	79,23	79,98	78,40

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator kinerja peserta KB aktif pada tahun 2011 mencapai 79,31% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 turun menjadi 77,9% dan meningkat menjadi 79,23% dan 79,98% pada tahun 2014, namun akhir tahun 2015 turun menjadi sebesar 78,40%.

c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator kinerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada awal periode tahun 2011 mencapai 23,94% mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 27,85%. Berikut ini adalah tabel keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.88
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	23,94	29,57	27,99	27,85	27,85

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.13 Sosial

a. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sarana sosial ada berbagai macam jenisnya seperti seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

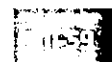
Tabel 2.89
Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)	8	12	13	13	16

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Capaian sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2011 terealisasi 8 unit capaian ini meningkat 100% pada tahun 2015 menjadi 16 unit.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian terkait:	
Kabag		1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	



b. Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial pada tahun 2011 dan 2012 terealisasi 100%, kondisi ini menurun menjadi 80% pada tahun 2013 dan 86,6% pada tahun 2014, sedangkan tahun 2015 capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial kembali mencapai 100%. Berikut ini adalah tabel capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.90
Persentase Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	100	100	80	86,6	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2011 mencapai 3,60%, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 78,3%. Berikut ini adalah tabel penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.91
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	3,60	7,2	40,76	60	78,3

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.14 Ketenagakerjaan




a. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Tabel 2.92
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,24	70,81	78,9	68,85	75

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2011 sebesar 70,24% meningkat menjadi 70,81% pada tahun 2012, menurun menjadi 68,85% tahun 2014, dan kemudian meningkat menjadi 75% pada tahun 2015.

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun pada tahun 2011 sebesar 5 perusahaan, mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 menjadi 4 perusahaan per tahun. Berikut adalah tabel angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.93
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	5	4	4	4	4

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 0,87% mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya sampai dengan kondisi terakhir tahun 2014 menjadi 1,08%. Berikut adalah tabel tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2010 - 2014:

Tabel 2.94
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2010 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,87	1,54	1,02	0,99	1,08

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

d. Keselamatan dan Perlindungan

Capaian jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan pada tahun 2011 sebesar 16%, mengalami penurunan tahun 2012 menjadi 14%. Pada tahun 2013 mulai meningkat menjadi 15% dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 21,9% dan 31,9%. Berikut adalah tabel jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.95
Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Keselamatan dan Perlindungan	16	14	15	21,9	31,9

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Tabel Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan tersebut, akan dilakukan penyesuaian pada perhitungan selanjutnya mengingat adanya penambahan data perusahaan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

e. **Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Capaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2011 sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh perselisihan buruh dan pengusaha yang melibatkan kebijakan pemerintah dapat diselesaikan dengan baik. Capaian 100% ini bertahan sampai dengan tahun 2013, sedangkan tahun 2014 menurun menjadi 4,1%, dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 100%.

2.3.1.15 **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

a. **Persentase Koperasi Aktif**

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.96
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi Aktif	366	377	392	396	399
Jumlah Koperasi	428	433	449	453	456
Persentase Koperasi Aktif (%)	85,51	87,07	87,30	87,42	87,47

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Koperasi aktif pada tahun 2011 mencapai 85,51% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,47%, dimana telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 1,96%. Hal ini karena gerakan pengembangan koperasi semakin baik dan dapat diterima masyarakat dengan lebih sederhana. Demikian juga jumlah koperasi yang aktif dan sehat (rutin RAT) juga semakin meningkat. Sedangkan untuk jumlah koperasi tidak aktif 5 tahun terakhir juga masih ada, hal ini tentunya akan mempengaruhi indikator capaiannya. Untuk itu perlu diupayakan pembinaan lebih intensif bagi pengurus koperasi dalam kegiatan revitalisasi koperasi sehingga akan menghidupkan kembali beberapa koperasi yang kosong kegiatan dan personibya.

b. **Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM**

Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM pada tahun 2011 mencapai 20.843 unit mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 22.013 unit. Berikut capaian indikator jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM secara lengkap disajikan

sebagaimana tabel berikut:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.97
Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM	20.843	21.114	21.326	21.671	22.013

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/LKM pada tahun 2011 mencapai 5.369 unit mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 5.534 unit. Berikut adalah tabel jumlah BPR/LKM di kabupaten pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.98
Jumlah BPR/LKM (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah BPR/LKM	5.369	5.371	5.371	5.443	5.534

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dari 20.838 unit pada tahun 2011, meningkat menjadi 22.206 unit pada tahun 2015.

Tabel 2.99
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Usaha Mikro dan Kecil	20.838	21.109	21.321	21.665	22.206

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.16 Penanaman Modal

Penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Investasi dan penanaman modal yang dilakukan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu. Investasi lebih banyak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.100
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	15	16	110	115	129

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA pada tahun 2011 mencapai 15 perusahaan, mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 129 perusahaan.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Jumlah nilai investasi berskala nasional pada tahun 2011 indikator awal tahun 2011 mencapai 3,50 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,693. Berikut adalah tabel jumlah nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.101
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Trilyun) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	3,50	2,44	0,512	0,547	0,693

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Indikator awal tahun 2011 mencapai 82,5 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 dimana rasio daya serap tenaga kerja mencapai 329,85, akan tetapi pada tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja menurun drastis menjadi 3,68. Hal ini terjadi disebabkan oleh perubahan kriteria yang masuk PMDN menjadi 200 juta rupiah ke atas sehingga jumlah PMDN yang ada di Kabupaten Pacitan bertambah yang akhirnya berpengaruh pada perhitungan rasio daya serap tenaga kerja. Berikut adalah tabel rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.102
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

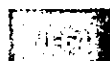
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	82,5	85,4	329,85	102,11	3,68

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 mencapai 0,9%, meningkat setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 26,84%. Berikut adalah tabel kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Eksekutif		2. _____	
		3. _____	



Tabel 2.103
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi FMDN (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	0,9	5,2	21,17	21,05	26,84

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.17 Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni, Budaya dan Agama

Jumlah penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama pada tahun 2011 mencapai 18 kali dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 30 kali. Berikut adalah tabel jumlah penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.104
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	24	36	29	30

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Jumlah sarana festival seni dan budaya pada tahun 2011 mencapai 40 sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pacitan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 68 sarana. Berikut adalah tabel jumlah sarana festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.105
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	40	44	44	67	68

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2011 mencapai 266 buah situs dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 268 buah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama 4 tahun hanya bertambah 2 item yang dilestarikan. Berikut adalah tabel jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

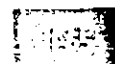
Tabel 2.106
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	266	266	267	267	268

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2011 mencapai 12 organisasi pemuda dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 23 organisasi kepemudaan. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.107
Jumlah Organisasi Pemuda (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Organisasi Pemuda	12	16	20	23	23

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2011 mencapai 17 organisasi olahraga dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 24 organisasi olahraga. Berikut adalah tabel jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.108
Jumlah Organisasi Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Organisasi Olahraga	17	17	18	23	24

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2011 mencapai 21 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 46 kegiatan kepemudaan. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.109
Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	21	25	30	41	46

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2011 mencapai 26 kegiatan olahraga mengalami penurunan menjadi 24 kegiatan olahraga pada tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 25 kegiatan. Peningkatan jumlah kegiatan olahraga dilanjutkan di tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 28 dan 29 kegiatan olahraga. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Tabel 2.110
Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Olahraga	26	24	25	28	29

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2011 mencapai 176 buah dan mengalami peningkatan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten Pacitan untuk setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 185 buah. Berikut adalah tabel jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.111
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	176	178	182	183	185

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 162 buah, sempat mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 160 buah, akan tetapi kembali meningkat menjadi 162 buah di tahun 2013, dan bertambah 7 buah menjadi 169 buah di tahun 2014. Pada tahun 2015 bertambah 2 buah menjadi 171 buah. Informasi lebih lengkap disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.112
Lapangan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Lapangan Olahraga	162	160	162	169	171

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Selain indikator-indikator di bidang kepemudaan dan olahraga yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator lainnya, sebagaimana disajikan berikut ini :

Tabel 2.113
Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pemuda Pelopor	100	110	130	140	156
2	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (%)	35	40	45	50	60

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Hakim	

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kinerja pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik pada tahun 2011 mencapai 100% dan selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini berarti dari jumlah LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik di Kabupaten Pacitan, semua telah dilakukan pembinaan.

Tabel 2.114
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Persentase Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun 2011 mencapai 20% dan meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%. Berikut adalah tabel capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.115
Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%)	20	40	60	80	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Tabel 2.116
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak berubah, yaitu 0,99.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPEDA	
SKPD/Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



b. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Tabel 2.117
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,93, hal ini masih tetap sama selama 4 tahun dimana pada tahun 2015 rasio linmas per 10.000 penduduk tidak berubah, masih diangka 0,93.

c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan.

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masih tetap 11,35. Berikut adalah tabel rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.118
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

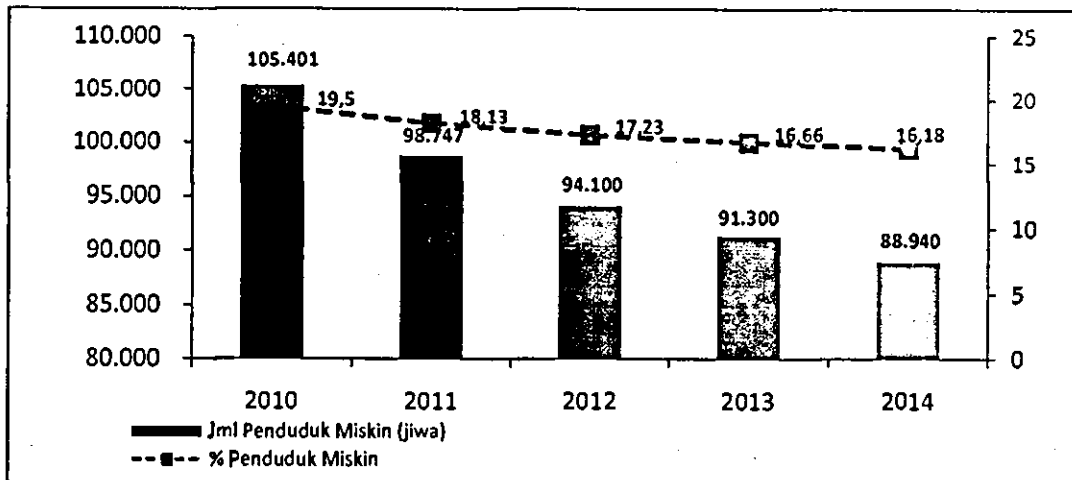
d. Kemiskinan

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya kemakmuran yang berkolerasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat.

Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah dengan mengurangi penduduk miskin.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa DARPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
HuAUM		2. _____	
		3. _____	

Grafik 2.33
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014
Kabupaten Pacitan



Sumber BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Pada Tahun 2013 persentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan turun 0,57% atau menjadi 16,66% dari persentase tahun 2012 sebesar 17,23%. Penurunan tersebut menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2013 menjadi 91.300 jiwa atau menurun 2.800 jiwa dari tahun 2012 sejumlah 94.100 jiwa. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2014, dimana persentase penduduk miskin turun menjadi 16,18% atau sebanyak 88.940 jiwa atau turun 2.360 jiwa. Penurunan penduduk miskin tersebut sebagai dampak dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi terjadinya kesenjangan kesejahteraan melalui berbagai program dan kegiatan baik yang bersumber dari anggaran pemerintah, swasta dan juga masyarakat.

e. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

Penerapan Sistem Informasi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Pacitan telah terintegrasi melalui program SPIPISE yang bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan serta akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan integrasi data dan layanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan di Kabupaten Pacitan sudah mendapatkan hak akses dari BKPMRI sehingga SPIPISE sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk sistem pelayanan perizinan telah terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

f. Penegakan PERDA

Indikator berikut memberikan informasi tentang sudah bagaimanakah status penegakan perda di Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Persentase Penegakan PERDA pada tahun 2011 sebesar 70, meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 90. Berikut adalah tabel penegakan PERDA di tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.119
Penegakan PERDA Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penegakan PERDA	70	80	80	89	90

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

g. Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam

Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam pada tahun 2011 terealisasi tetap di angka 2 sampai dengan tahun 2015. Berikut adalah tabel jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.120
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam	2	2	2	2	2

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

h. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pacitan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 80%, capaian ini meningkat pada tahun 2013 yaitu 89%, dan pada tahun 2015 menjadi 90%. Berikut adalah capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.121
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	80	80	89	90	90

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

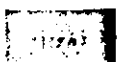
i. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 0,001 tidak mengalami penurunan atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 masih tetap mencapai 0,001.

j. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator kinerja tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada tahun 2011 mencapai 10 menit, dan mengalami penurunan respon waktu menjadi 7 menit pada tahun 2013. Kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	



Tabel 2.122
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	10	10	7	7	7

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

k. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Indikator kinerja sistem informasi manajemen pemda pada awal periode tahun 2011 mencapai 4 SIM mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2015 mencapai 25 SIM Pemda. Berikut perkembangan mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.128.

Tabel 2.123
Sistem Informasi Manajemen Pemda (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sistem Informasi Manajemen Pemda	4	5	6	7	25

Sumber: Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, tahun 2016

l. Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik

Penghitungan Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik tahun 2011-2015 menggunakan perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Selanjutnya mulai tahun 2016 perhitungannya menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berikut tabel Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.124
SKPD Dengan Hasil Survey IKM Minimal Baik (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik (%)	39,58	41,67	81,25	97,92	95,83

Sumber: Laporan IKM 2011 - 2015

2.3.1.21 Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah rata-rata ketersediaan beras per 1000 penduduk dalam setahun. Indikator kinerja ketersediaan pangan utama pada tahun 2011 mencapai 182,40 kg/jiwa dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sempat mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 (183,91 kg/jiwa menjadi 204,52 kg/jiwa) dan menurun pada tahun 2014, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 menjadi 194,55 kg/jiwa. Berikut adalah tabel ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
M. Hum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.125
Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan Pangan Utama	182,40	183,91	204,52	192,52	191,55

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2011 mencapai 73,03 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2015 menjadi 79,84. Berikut adalah tabel Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.126
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	73,03	73,2	76,4	79,6	79,84

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM.

Berikut tabel rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) pada tahun 2011-2015:

Tabel 2.127
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	33,33	39,18	66,66	5,08	6,06

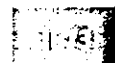
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Indikator kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2011 mencapai 100, kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing menjadi 87,97 dan 87,07. Berikut adalah tabel rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Tabel 2.128
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100	100	100	87,97	87,07

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM.

LPM berprestasi pada tahun 2011 mencapai 0,05 mengalami peningkatan tiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,29. Berikut adalah tabel LPM berprestasi di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.129
LPM Berprestasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
LPM Berprestasi	0,05	0,11	3,51	0,15	0,29

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. PKK Aktif

PKK aktif pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Hal ini berarti selama 5 tahun terakhir, dari semua PKK di Kabupaten Pacitan semuanya aktif. Berikut adalah tabel persentase PKK aktif di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.130
Persentase PKK Aktif (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan




URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100


Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Posyandu Aktif

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam layanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Posyandu aktif pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Berikut adalah tabel persentase posyandu aktif di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.131
 Persentase Posyandu Aktif (%) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Posyandu Aktif (%)	100	100	46,2	100	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 sebesar 18,93% mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014 mencapai 28,47% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 26,99%. Berikut adalah tabel persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.132
 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	18,93	26,52	24,2	28,47	26,99

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

g. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Berikut adalah tabel persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.133
 Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.23 Kearsipan

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

SKPD dan desa/kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2011 mencapai 35,80% mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 65,80%. Berikut adalah tabel persentase pengelolaan arsip secara berkala di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

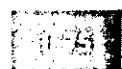
Tabel 2.134
 Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pengelolaan Arsip Secara Baku	35,80	41,71	47,58	53,53	65,80

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



b. Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan secara baku pada tahun 2011 mencapai 106 SKPD, kecamatan, kelurahan dan desa. Kondisi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana sampai dengan tahun 2015 mencapai 192 SKPD, kecamatan, kelurahan dan desa. Data secara rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.135
Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	106	130	154	178	192

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.24 Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah media yang digunakan untuk komunikasi oleh masyarakat, antar masyarakat dan lembaga pemerintah. Jaringan komunikasi dihitung berdasarkan jumlah kelompok informasi masyarakat yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Tabel 2.136
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Jaringan Komunikasi	34	171	108	88	118

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 telah tersedia sebanyak 34 jaringan, meningkat menjadi 171 jaringan pada tahun 2012, namun dalam perkembangannya pada tahun 2013 telah dilakukan koreksi sehingga terjadi perubahan pada indikator capaian jumlah jaringan komunikasi yang berorientasi pada kelompok informasi masyarakat dan menara yang ada, oleh karena itu pada tahun 2014 diadakan penertiban dan pembinaan sehingga diperoleh 88 menara yang telah berizin. Dan pada tahun 2015 yang mengurus perizinan sudah mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 diperoleh 118 kelompok informasi masyarakat dan menara.

b. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, *feature*, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 5. Data selengkapnya disajikan sebagaimana tabel berikut :

Paraf Hiararki	
Sekda	8
Asisten	7
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	6
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.137
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	3	3	3	3	5

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 6, mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 28. Dari data tersebut yang telah memiliki Izin Penyiaran Publik (IPP) sejumlah 6 yang terdiri dari 5 Radio Siaran dan 1 TV lokal. Sedangkan lainnya masih dalam tahap proses perijinan/pembinaan. Berikut adalah tabel jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.138
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	19	20	20	28

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Website Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah memiliki website resmi pemerintah dengan alamat www.pacitankab.go.id yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

2.3.1.25 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

a. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pacitan terdapat 115 perpustakaan pada tahun 2011, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 162 perpustakaan. Berikut adalah tabel jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.139
Jumlah Perpustakaan (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perpustakaan	115	125	134	140	162

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

b. Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2011 mencapai 17.560 orang dan meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 59.040 orang pengunjung, telah terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 97%. Berikut adalah tabel jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.140
Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun (Pengunjung) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun	17.560	27.942	38.310	48.666	59.040

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2011 mencapai 21.550 buku, mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 25.316 buku. Berikut adalah tabel jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.141
Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Koleksi buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	21.550	22.002	22.780	24.163	25.316

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.

2.3.2.1 Pertanian

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 182,4 ton beras dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana tahun 2012 ke 2013 (184 ton menjadi 111,68 ton) dan meningkat kembali pada 2014 sehingga pada tahun 2015 menjadi 160 ton. Berikut adalah tabel produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton) Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

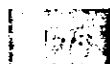
Tabel 2.142
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	182,4	184	111,68	210,23	160

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Penrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Untuk mendukung data diatas, maka berikut ini disajikan data produksi komoditas pertanian unggulan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.143
Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

No.	Tahun	Produksi (Ton)			
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
1	2011	170,257	107.449	4.155	564.430
2	2012	178,767	138.297	4.426	499.730
3	2013	198,169	101.683	4.347	361.432
4	2014	180,662	111.640	4.764	539.420
5	2015	202.619	115.512	6.467	451.265

Sumber Data : Dinas Tanaman pangan dan Peternakan Kab. Pacitan

Tabel berikut ini menyajikan produktifitas komoditas pertanian unggulan.

Tabel 2.144
Produktifitas Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

No.	Tahun	Produktifitas (Kw/Ha)			
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
1	2011	50,13	50,35	10,80	189,03
2	2012	50,79	64,21	10,27	210,21
3	2013	53,82	50,66	13,65	204,26
4	2014	52,65	54,72	12,64	236,17
5	2015	54,57	57,23	13,17	234,24

Sumber Data :Dinas Tanaman pangan dan Peternakan Kab. Pacitan

Selain peternakan, potensi peternakan unggulan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.145
Produksi Peternakan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

No.	Tahun	POPULASI TERNAK BESAR (Ekor)			
		KUDA	SAPI	SAPI PERAH	KERBAU
1	2011	74	86.138	500	99
2	2012	74	94.735	553	106
3	2013	61	76.615	119	107
4	2014	76	81.954	117	113
5	2015	76	83.659	107	116

Sumber Data : Profil statistik 2016

b. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urisan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan, pertanian buah, palawija dan peternakan. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pacitan dari tahun 2013 dan tahun 2014 :

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.146
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB	30,3	30,54
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHK 2010	28,28	27,89

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.3.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pacitan diperoleh dari buku PDRB Kabupaten Pacitan Menurut Lapangan Usaha 2000-2011.

a. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2013 dan tahun 2014 :

Tabel 2.147
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHB	5,77	6,58
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHK 2010	6,10	6,33

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.3.2.3 Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 512.274 wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Pariwisata merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan, sehingga sangat dibutuhkan perencanaan yang baik dalam pengembangannya. Kunjungan wisata pada tahun 2015 telah mencapai 1.556.000 wisatawan. Berikut adalah tabel kunjungan wisata di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

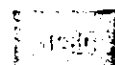
Tabel 2.148
Kunjungan Wisata (orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kunjungan wisata (orang)	512.274	537.859	655.000	1.089.961	1.556.000

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp.1.802.458.500,00 dengan pengembangan yang terarah maka kontribusinya meningkat sampai pada tahun 2015 menjadi Rp.6.500.000.000,00. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.149
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (milyar) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	1.802	2.074	1.841	2.549	6.500

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, *amfibi* dan berbagai *avertebrata* penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1985 dan UU RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 mencapai 6.286.814 ton, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 menjadi 10.815.603 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2011 mencapai 814.942 ton meningkat sampai dengan tahun 2014 menjadi 919.373 ton kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 811.041 ton. Berikut adalah tabel produksi perikanan di tangkap dan budidaya Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.150
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015*
Produksi Perikanan Tangkap	6.286.814	6.252.175	7.822.760	7.999.500	10.815.603
Produksi Perikanan Budidaya	814.942	816.810	872.056	919.373	811.041

Sumber Data: Database Kelautan Perikanan 2015

b. Konsumsi ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 11,54 kg/kap/th, ada peningkatan konsumsi ikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 16,26 kg/kap/th. Berikut adalah tabel perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.151
Konsumsi Ikan (kg/kap/th) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	11,54	12,09	13,8	14,63	16,26

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran
Cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/pengolahan dan pemasaran pada tahun 2011 mencapai 54,39%, mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 94,75%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/pengolahan dan pemasaran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.152
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran	54,39	64,91	75	86,4	94,75

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 6.244,07 ton, mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 6.252,18 ton, akan tetapi di tahun 2013 menurun menjadi 6.003,29 ton dan kembali meningkat menjadi 8.419,00 ton dan 10.891,42 ton di tahun 2015. Berikut adalah tabel produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.153
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi perikanan Kelompok Nelayan (ton)	6.244,07	6.252,18	6.003,29	8.419,00	10.891,42

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

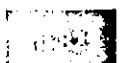
2.3.2.5 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Giatnya aktivitas perdagangan suatu daerah menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian daerah itu sendiri.

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB tahun 2013 sebesar 16,13% dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 17,73%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2013 sebesar 16,76% dan tahun 2014 naik menjadi 17,87%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Pacitan tahun 2013 - 2014 :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	



Tabel 2.154
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB	16,13	17,73
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK 2010	16,76	17,87

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2011 sebesar 5%, meningkat 150% sehingga pada tahun 2015 menjadi 12,5%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.155
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok / Pedagang/usaha Informal	5	6,25	13,75	10	12,5

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.3.2.6 Perindustrian

Industri adalah bidang ekonomi yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel 2.156
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB	6,79	7,48
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK 2010	6,93	7,24

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 1,99% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel pertumbuhan industri di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.157
Pertumbuhan Industri Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Industri	1,99	2,5	2,03	2,56	3,95

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

c. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 2,2% sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.158
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,2	3,32	2,92	5,6	3,95

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.3.2.7 Ketransmigrasian

a. Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa pada tahun 2011 sebanyak 10 orang, mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 135 orang. Berikut adalah tabel perkembangan transmigrasi swakarsa tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.159
Transmigrasi Swakarsa (orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Transmigrasi Swakarsa (orang)	10	35	90	130	135

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan berkembang.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sisi ekonomi dalam rangka mendukung investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	2. _____	
		3. _____	

untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Tabel 2.160
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	636,07	636,66	408,58	638,38	641,12

(ribu)

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 (Data Diolah)

Capaian kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2011 mencapai 636,07 ribu sempat mengalami penurunan menjadi 408,58 ribu pada tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2015 meningkat menjadi 641,12 ribu.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Kinerja pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada tahun 2011 mencapai 1.244.059 rupiah, mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 1.372.651 rupiah. Berikut adalah tabel pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.161
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	1.244.059	1.250.248	1.256.437	2.929.176	1.372.651

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 (Data Diolah)

2.4.1.2 Pertanian

a. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani pada tahun 2013 mencapai 116,71%, meningkat di tahun 2014 menjadi 134,60%, akan tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 103,53%. Berikut adalah nilai tukar petani di Kabupaten Pacitan tahun 2013 - 2015:

Tabel 2.162
Persentase Nilai Tukar Petani Tahun 2013 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014	2015
Nilai Tukar Petani (%)	116,71	134,60	103,53

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2011 mencapai 0,00895 sedangkan tahun 2015 mencapai 0,01219. Ada peningkatan 36,2% dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berikut adalah tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Tabel 2.163
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,00895	0,00888	0,00896	0,00788	0,01219

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Tabel Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas, pada perhitungan selanjutnya akan dihitung dengan metode perhitungan baru.

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Kinerja jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2011 mencapai 11.849.010 penumpang, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 11.857.260 penumpang. Pada tahun 2013 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menurun menjadi 11.871.100, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 meningkat berturut-turut menjadi masing-masing 10.683.990 dan 10.874.146 penumpang. Berikut adalah tabel jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.164
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum (Penumpang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah orang/barang Yang Terangkut Angkutan Umum	11.849.010	11.857.260	11.871.100	10.683.990	10.874.146

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun

Kinerja jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun pada tahun 2011 mencapai 448.871 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2011 mencapai 526.674. Berikut adalah jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun pada tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.165
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun (Penumpang/Buah)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	448.871	473.075	666.295	342.102	526.674

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.4.2.2 Penataan Ruang

a. Ketaatan terhadap RTRW

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen realisasi rencana tata ruang dan wilayah dengan rencana peruntukannya di Kabupaten Pacitan. Kinerja ketaatan terhadap RTRW pada awal periode tahun 2011 mencapai 53,42% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 77,00%. Berikut adalah tabel ketaatan terhadap RTRW tahun

2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

Tabel 2.166
Ketaatan terhadap RTRW (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Ketaatan terhadap RTRW	53,42	56,8	65,00	72,50	77,00

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Persentase Luas Wilayah Produktif

Indikator kinerja persentase luas wilayah produktif pada tahun 2011 mencapai 20,22% tidak mengalami penurunan atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 tetap 20,22%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah produktif di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.167
Luas Wilayah Produktif (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah Produktif	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Persentase Luas Wilayah Industri

Kinerja persentase luas wilayah industri pada tahun 2011 mencapai 10,8% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 17,01%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah industri di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.168
Luas Wilayah Industri (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah Industri	10,8	12,19	13,86	15,70	17,01

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Luas Wilayah Kebanjiran

Persentase luas wilayah banjir pada tahun 2011 mencapai 9,65%. Seiring dengan rehabilitasi dan peningkatan saluran air atau sungai, persentase luasan wilayah banjir dapat ditekan, sehingga persentasenya dapat diturunkan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 turun menjadi 7,38%. Capaian ini berdasarkan perhitungan luas wilayah banjir sebesar 5.279 ha dibanding luas seluruh wilayah budidaya banjir sebesar 70.297 ha. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah banjir di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

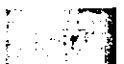
Tabel 2.169
Luas Wilayah Kebanjiran (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah Kebanjiran	9,65	8,43	8,06	7,61	7,38

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



e. Luas Wilayah Kekeringan

Persentase luas wilayah kekeringan pada tahun 2011 mencapai 21,38% mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 19,05%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah kekeringan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.170
Luas Wilayah Kekeringan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah Kekeringan	21,38	19,06	19,58	19,40	19,05

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Luas Wilayah Perkotaan (%)

Indikator kinerja persentase luas wilayah perkotaan pada tahun 2011 mencapai 9,5% tidak mengalami penurunan atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 tetap 9,5%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah perkotaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.171
Luas Wilayah Perkotaan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah Perkotaan	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan dan menghitung jenis bank dan cabang-cabangnya yang ada di Kabupaten Pacitan.

Indikator kinerja jumlah bank dan cabang pada tahun 2011 mencapai 8 unit mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 10 unit, antara lain Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI-46), Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, PNM, Bank Usaha Mikro dan Bank Mandiri.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.172
Jumlah Bank dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Bank dan Cabang	8	9	10	10	10

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Indikator kinerja jumlah perusahaan asuransi dan cabang pada tahun 2011 mencapai 2 unit mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 menjadi 3 unit. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang yang ada di Kabupaten Pacitan terdapat 3 kantor asuransi yaitu PT. Asuransi Jiwa Sraya (Persero) dan AJB Bumiputera 1912 dan Asuransi Axa Mandiri.

Tabel 2.173
Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	2	2	2	3	3

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah Restoran

Capaian jumlah restoran pada tahun 2011 tercatat sebanyak 12 restoran, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 sebanyak 21 restoran. Capaian ini merupakan dampak dari Kabupaten Pacitan sebagai tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang wisatawannya semakin lama semakin meningkat, hal tersebut mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha informal berupa pembangunan restoran, disamping itu kemudahan ijin pendirian restoran kepada masyarakat yang semakin dipermudah. Berikut adalah tabel jumlah restoran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.174
Jumlah Restoran (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Restoran	12	12	14	19	21

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel pada tahun 2011 mencapai 15 buah, meningkat di tahun 2012 menjadi 21 buah, kemudian menurun menjadi 19 buah pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 mulai meningkat lagi menjadi 28 dan 29 buah. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha-usaha di bidang penginapan/perhotelan yang menunjang investasi kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, serta keseriusan pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan pengelolaan obyek-obyek wisata di Kabupaten Pacitan yang berdampak kepada peningkatan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara, selain itu adanya investor-investor luar yang ikut mempromosikan keindahan kekayaan alam yang menarik. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.175
Jumlah Penginapan/Hotel (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penginapan/Hotel	15	21	19	28	29

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.4.2.4 Lingkungan Hidup

a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali dengan 100%.

Tabel 2.176
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Perkotaan	50,3	51,8	60,40	64,48	69,02
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Perdesaan	33,3	33,9	36,21	37,51	37,92

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih perkotaan pada tahun 2011 mencapai 50,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 69,02%. Sedangkan kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih perdesaan pada tahun 2011 mencapai 33,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 37,92%.

Tabel Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas terdiri dua indikator yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pedesaan, untuk perhitungan kedepan kedua indikator tersebut akan disatukan dalam indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.

2.4.3 Fokus iklim Investasi

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Jumlah Demo

Jumlah demo pada tahun 2011 sebanyak 2 kah, meningkat menjadi 4 kali pada tahun 2012. Pada tahun 2013 tidak terjadi demo, sedangkan tahun 2014 terjadi demo sebanyak 5 kali dan 2015 sebanyak 7 kali demo. Peningkatan jumlah demo dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena eskalasi politik lokal menjelang PILKADA serta perlambatan ekonomi yang memicu kenaikan kebutuhan barang pokok sehari-hari. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah demo di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	7
Kabag Hukum	7

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	7
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 2.177
Jumlah Demo Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Demo	2	4	0	5	7

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Lama Proses Perijinan

Lamanya proses perizinan tahun 2011 mencapai 5,3 hari, menurun setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan, dimana sampai dengan tahun 2015 mencapai 5 hari. Lama proses perizinan berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian izin sehingga semakin rendah angkanya menunjukkan kinerja semakin baik. Indikator ini mempunyai kaitan erat dengan SOP maupun SPP yang telah ditetapkan.

Tabel 2.178
Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja)	5,3	5,35	5,24	5,14	5

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Sejak diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka pada tahun 2015 ini bertambah 1 jumlah pajak yang diserahkan yaitu pajak PBB, sehingga ada 11 pajak dan 1 retribusi daerah. Berikut adalah tabel jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.179
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	11	11	11	12	12

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha

Pemerintah daerah memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan menerbilkan regulasi berupa peraturan daerah. Berikut jumlah PERDA yang mendukung iklim investasi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.180
Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha	3	3	4	7	5

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kaog Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Ketenagakerjaan

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Capaian rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2011 adalah sebesar 138, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014 menjadi 622, namun di tahun 2015 menurun menjadi 552. Berikut adalah tabel rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.181
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Lulusan S1/S2/S3	138	369	448	662	552

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rasio Ketergantungan


Rasio ketergantungan pada tahun 2011 mencapai 0,50, berhasil diturunkan sampai dengan tahun 2015 menjadi 0,49. Berikut adalah tabel perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

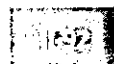
Tabel 2.182
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Ketergantungan	0,50	0,49	0,42	0,49	0,49

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN


3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan. Sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Daerah berkewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan, dijabarkan sebagai berikut:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPE DA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Tata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN	858,236,946,103	958,677,538,873	1,061,597,988,548	1,260,505,596,064	1,426,596,968,533	13.6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48,559,915,661	57,298,239,683	62,988,926,126	101,276,945,022	126,449,078,417	28.5
1.1.1	Pajak Daerah	6,006,625,272	7,954,645,819	9,053,156,097	20,684,068,973	21,789,927,222	45.0
1.1.2	Retribusi Daerah	11,626,055,798	14,033,372,250	18,399,845,514	20,455,509,921	20,411,292,110	15.7
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,903,227,592	3,139,175,330	2,259,920,570	2,333,710,205	2,421,047,544	-3.2
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27,524,006,899	32,171,046,283	33,276,003,947	57,803,655,923	81,826,811,541	33.6
1.2	Dana Perimbangan	583,216,975,459	703,480,864,661	756,537,409,646	808,252,090,951	863,523,504,516	10.5
1.2.1	Dana Bagi hasil Pajak /bagi hasil bukan Pajak	48,580,538,459	61,926,220,661	57,606,486,646	55,639,206,951	53,312,201,816	3.2
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480,580,537,000	589,829,914,000	647,293,403,000	700,743,024,000	714,847,233,000	10.7
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	54,055,900,000	51,724,730,000	51,937,520,000	51,869,860,000	95,364,070,000	20.0
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	226,660,054,983	197,598,434,529	241,571,653,876	350,976,360,091	436,524,585,100	19.8
1.3.1	Hibah	986,005,745	842,483,627	1,925,000	2,100,000	1,050,000	-38.8
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemda Lainnya	29,581,537,578	27,659,934,902	34,123,870,076	63,881,618,091	60,742,249,100	24.8
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Khusus	175,238,937,160	145,874,996,000	172,525,413,000	182,420,105,000	281,230,973,000	15.4
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi Pemerintah lainnya	20,853,574,500	23,521,020,000	34,920,445,000	104,672,537,000	94,650,113,000	62.9

Parat hierarki

Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

SKPD/ Bagian Pemrakarsa
BAPPEDA

SKPD/ Bagian Terkait:

1. _____
2. _____
3. _____

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 13,6%.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011-2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,5%, yang secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Pacitan berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Perimbangan Kabupaten Pacitan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2011-2015 terakhir sebesar 10,5%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 20%, Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan 19,8%.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

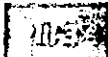
Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2011-2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA	847,653,877,678	964,961,884,990	1,036,980,098,890	1,202,651,876,766	1,408,458,278,765	13.6
2.1	Belanja Tidak Langsung	570,148,800,482	656,008,622,770	724,455,198,735	804,818,701,450	921,154,743,893	12.8
2.1.1	Belanja Pegawai	497,212,770,319	562,704,319,406	607,673,757,744	667,847,218,506	675,833,545,402	8.1
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Dana Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7,773,449,671	8,342,808,231	24,769,472,900	25,308,799,701	31,487,862,975	56.6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,519,575,625	16,163,946,000	4,544,127,410	6,617,811,731	6,480,899,867	3.0
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,862,351,917	2,736,168,297	3,300,666,461	3,376,307,901	3,655,296,219	6.7
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	47,210,287,150	65,097,837,035	82,534,550,520	100,342,199,110	203,123,076,430	47.1
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,370,165,800	763,543,800	1,632,623,700	1,126,164,500	574,063,000	-11.2

Paraf Hierarki	
Sekds	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Belanja Langsung	277,804,777,196	308,953,262,221	312,824,900,155	397,832,875,316	487,303,834,872	15.6
2.2.1	Belanja Pegawai	26,501,880,289	33,986,089,151	36,427,365,750	35,969,228,877	44,415,456,398	14.4
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106,747,844,724	121,427,491,610	143,242,808,806	161,434,465,274	174,736,431,037	13.2
2.2.3	Belanja Modal	144,255,052,183	153,539,681,459	132,854,725,599	200,429,181,165	268,151,647,437	19.4

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 2011-2015

Berdasarkan tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011-2015 bahwa realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 13,6%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,8%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,1%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 15,6%. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,4%.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Pacitan.

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN	46,863,870,122	54,723,738,847	47,316,292,447	71,871,982,405	128,275,801,703	33.8
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,863,870,122	57,223,738,847	48,768,292,447	72,121,982,405	129,225,801,703	32.1
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	49,040,415,122	56,947,238,547	48,439,392,447	71,734,182,405	129,225,801,703	32.4
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	323,455,000	276,500,000	328,900,000	387,800,000	-	-19.4
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000	2,500,000,000	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000	-20.1

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1 _____	
		2 _____	
		3 _____	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					PERUBAHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	
	Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	2,750,000,000	2,250,000,000	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000.00	-18.8
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 2011-2015

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 33,8%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 32,1%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar -20,1%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 18,8%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Pacitan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	TAHUN (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
ASET	1,653,062,450,817	1,638,738,722,308	1,548,126,482,775	1,752,626,886,071	1,858,482,700,749	3.21
ASET LANCAR	68,128,048,694	65,335,004,027	95,167,981,968	150,611,820,944	180,782,642,221	29.96
KAS	56,947,238,547	48,439,392,447	71,734,182,405	129,225,801,703	130,227,114,176	28.52
Piutang	3,154,719,856	6,902,184,465	14,710,036,606	12,080,607,498	26,417,042,204	83.18
Penyisihan Piutang	-	(247,934,122)	(357,483,634)	(1,244,595,619)	(2,197,317,935)	19.14
Persediaan	8,026,090,291	9,874,843,356	8,723,762,957	9,305,411,743	7,943,469,848	0.85
INVESTASI JANGKA PANJANG	18,365,716,547	22,982,895,932	23,815,534,538	24,823,801,925	25,666,828,926	9.10
Investasi Non Permanen	7,477,333,800	7,155,279,486	7,282,136,010	7,913,822,896	-	-23.46
Investasi Non Permanen Lainnya	7,477,333,800	7,827,333,800	8,099,133,800	8,449,133,800	8,799,133,800	4.15
Dana Bergulir	-	(672,054,314)	(816,997,790)	(535,310,904)	(639,465,465)	4.86
Investasi Permanen	10,888,382,747	15,827,616,446	16,533,398,528	16,909,979,029	17,507,160,392	13.91
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,888,382,747	15,827,616,446	16,333,398,328	16,909,979,029	17,507,160,592	13.91
ASET TETAP	1,522,483,663,599	1,531,491,787,031	1,393,875,086,735	1,539,966,862,920	1,618,792,368,770	1.80
Tanah	432,121,459,483	477,338,791,151	465,613,335,690	464,008,995,264	459,992,974,889	1.70
Peralatan dan Mesin	173,576,532,899	205,103,308,872	237,453,300,118	273,145,128,219	317,117,388,282	16.27
Gedung dan Bangunan	331,492,774,218	395,092,460,497	443,474,263,768	575,481,185,124	658,478,379,572	18.91
Jalan, Jaringan dan Irigasi	538,987,772,094	581,353,991,888	639,400,016,080	749,083,668,790	907,837,093,710	14.05

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

URAIAN	TAHUN (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Aset Tetap Lainnya	31,385,551,056	36,216,123,666	39,733,285,747	45,765,990,136	48,141,963,685	11,37
Konstruksi dalam Pengerjaan	14,919,573,850	4,274,374,905	10,382,389,233	11,111,431,879	5,514,630,780	7,05
Akumulasi Penyusutan		(168,087,263,949)	(442,181,503,902)	(578,629,536,493)	(778,289,862,149)	8,63
Akumulasi Penyusutan		(168,087,263,949)	(442,181,503,902)	(578,629,536,493)		-25,00
ASET LAINYA	44,085,021,977	18,929,035,319	35,267,879,535	37,224,400,282	33,240,660,831	6,02
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	42,168,609,800	2,306,810,800	25,453,277,700	25,453,277,700	25,453,277,700	227,22
Aset Tidak Berwujud	876,500,000	1,430,610,065	1,430,610,065	1,779,827,765	2,244,930,240	28,44
Aset lain - lain	1,039,912,177	13,416,158,549	8,383,991,770	9,991,294,817	7,102,421,634	285,72
Dana yang dibatasi Penggunaannya		1,775,455,905				
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud					(1,559,968,743)	
JUMLAH ASET	1,548,126,482,775	1,638,738,722,308	1,548,126,482,775	1,752,626,886,071	1,858,482,700,749	1,51
KEWAJIBAN	1,020,066,792	1,660,971,118	1,397,676,555	1,065,572,011	4,026,565,028	75,27
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,020,066,792	1,660,971,118	1,397,676,555	1,065,572,011	4,026,565,028	75,27
Pendapatan diterima dimuka	229,300,000	229,300,000	229,300,000	229,300,000	569,271,404	37,07
Utang jangka Pendek	790,766,792	1,431,671,118	1,168,376,555	836,272,011		-16,44
JUMLAH KEWAJIBAN	1,020,066,792	1,660,971,118	1,397,676,555	1,065,572,011	4,026,565,028	75,27
EKUITAS DANA	1,652,042,384,025	1,637,077,751,190	1,546,728,806,220	1,751,561,314,060	1,854,456,135,721	3,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,653,062,450,817	1,638,738,722,308	1,548,126,482,775	1,752,626,886,071	1,858,482,700,749	3,21

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Pacitan 2011-2015

a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,21%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami tren pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 29,96%. Kas mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2011 sebesar Rp.56.947.238.547 dan sebesar Rp.130.227.114.176 di periode tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,52%. Investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami *trend* pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 9,1%, total aset tetap Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 adalah Rp.1.522.483.663.599 dan meningkat menjadi Rp.1.618.792.568.770 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 1,51%.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata 75,27%, yaitu di tahun 2011 kewajiban jangka pendek sebesar Rp.1.020.066.792 dan di periode tahun 2015 kewajiban jangka pendek sebesar Rp.4.026.565.028

c) Ekuitas Dana

Perkembangan *ekuitas* dana Kabupaten Pacitan selama tahun 2011-2015 tumbuh rata-rata sebesar 3,17%, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp.1.652.042.384.025 dan tahun 2015 sebesar

Rp.1.854.456.135.721

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Pacitan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka hasil analisa perhitungan rasio *likuiditas* dan rasio *solvabilitas*, dapat disajikan sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio lancar (current ratio)	66.8	39.3	68.1	141.3	44.9
2.	Rasio quick (quick ratio)	58.9	33.4	61.8	132.6	42.9
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0.062	0.101	0.090	0.061	0.0022
2	Rasio hutang terhadap modal	0.0617	0.1015	0.0904	0.0608	0.00217

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio *likuiditas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio *likuiditas* yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Pacitan yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2011 adalah sebesar 66,8 dan tahun 2015 sebesar 44,9. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 44 kali lebih.

2. Quick Rasio

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan *quick* rasio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang *likuiditasnya* rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi *likuiditas*. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling *likuid* mampu

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa DAPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

menutupi hutang lancar. *Quick* rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*. Berdasarkan tabel diatas, *quick* rasio pada tahun 2011 sebesar 58,9 serta periode tahun 2015 *quick* rasio sebesar 42,9 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Pacitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2011 sebesar 0,062 dan pada tahun 2015 sebesar 0,0022. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.





2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 0,0617 serta periode tahun 2015 sebesar 0,00217. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Pacitan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang terpetakan akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa DAPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dalam penyajian laporan keuangannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

A) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun kontribusi terhadap pendapatan daerah masih cukup rendah dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Sumbangan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, baik Bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan terdiri dari:


- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan yang relatif besar. Pemanfaatan dana perimbangan menganut prinsip *money follows function* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pemerintah daerah termasuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, termasuk didalamnya adalah dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa DARPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:


- a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- e. Koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Sumber-sumber belanja daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah serta dengan terbitnya Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang tersebut telah diikuti oleh peraturan penmdang-undangan yang dibawahnya, dengan harapan ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan. Dalam rangka memenuhi target pendapatan daerah terus diupayakan agar semakin meningkat, berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan fasilitas dan keamanan terhadap obyek retribusi;
3. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan retribusi pada masyarakat;
4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan serta meningkatkan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Untuk dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah, terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat, pengajuan proposal maupun surat sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK dan Dana Insentif Daerah;
7. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BARPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

B) Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, pemenuhan SPM, pemenuhan SDGs, ketentuan *sharing* dari pusat maupun provinsi yang dituangkan pada program kegiatan baik pada Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Hibah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. Belanja Bagi Hasil;
5. Belanja Bantuan Keuangan;
6. Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan perencanaan belanja langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 meliputi :

1. Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD yang diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten baik, urusan wajib maupun urusan pilihan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi jangka panjang dibidang pendidikan;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.


Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Sedangkan kebijakan perencanaan belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 meliputi :

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan diproyeksikan ada penyesuaian gaji pokok PNS sebesar 6% sampai dengan 10%, sementara dalam perencanaan belanja pegawai diperhitungkan *accres* gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga;
3. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
4. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
5. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan;
7. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C) Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :





1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sementara itu kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
2. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan *likuiditas* keuangan daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pacitan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pacitan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Pacitan, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Penrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015			RATA - RATA
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		
2.1	Belanja Tidak Langsung	583.072,765,827	570,148,500,482	97.8	674,545,396,897	656,008,622,770	97.3	773,453,795,429	724,455,198,735	93.7	867,300,566,124	804,818,701,450	92.8	1,043,151,386,439	921,154,743,893	88.3	94.0
2.1.1	Belanja Pegawai	506,826,605,259	497,212,770,319	98.1	578,457,293,697	562,704,319,406	97.3	653,082,680,244	607,673,757,744	93.0	725,550,962,660	667,847,218,506	92.0	785,576,121,320	675,833,545,402	86.0	93.3
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Dana Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7,927,956,868	7,773,449,671	98.1	8,711,542,000	8,542,808,231	98.1	25,912,432,500	24,769,472,900	95.6	26,335,801,642	25,308,799,701	96.1	35,989,451,296	31,487,862,975	87.5	95.1
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,775,430,000	11,319,575,625	97.8	16,734,274,000	16,163,946,000	96.6	5,816,223,535	4,344,127,410	78.1	8,462,084,376	6,617,511,731	78.2	7,558,543,816	6,480,899,867	85.7	87.3
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,006,913,700	2,862,551,917	95.2	2,953,430,200	2,736,168,297	92.6	3,615,549,150	3,300,666,461	91.3	3,673,273,446	3,376,507,901	91.9	4,401,653,442	3,655,296,219	83.0	90.8
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	48,435,860,000	47,210,287,150	97.5	65,520,620,000	65,097,837,035	99.4	82,826,910,000	82,534,550,520	99.6	101,578,444,000	100,542,199,110	99.0	205,213,530,065	203,123,076,430	99.0	98.9
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,100,000,000	3,570,165,800	70.0	2,167,937,000	763,343,800	35.2	2,200,000,000	1,632,623,700	74.2	1,900,000,000	1,126,164,500	59.3	4,411,686,500	574,063,000	13.0	50.2
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	583,072,765,827	570,148,800,482	97.8	674,345,396,897	656,008,622,770	97.3	773,453,795,429	724,455,198,735	93.7	867,300,566,124	804,818,701,450	92.8	1,043,151,586,439	921,154,743,893	88.3	94.0
2.2	Belanja Langsung	306,137,284,332	277,504,777,196	90.6	321,238,171,748	308,953,262,221	96.2	325,184,153,535	312,524,900,155	96.1	416,820,198,858	397,832,575,316	95.4	498,292,606,313	487,303,534,872	97.8	95.2
2.2.1	Belanja Pegawai	27,271,317,905	26,501,880,289	97.2	34,904,577,000	33,986,089,151	97.4	38,463,893,567	36,427,365,750	94.7	36,588,711,500	35,969,228,877	98.3	43,795,679,100	44,415,456,398	101.4	97.8
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110,618,376,969	106,747,544,724	96.5	126,372,226,244	121,427,491,610	96.1	148,986,933,983	143,242,808,506	96.1	174,943,303,340	161,434,465,274	92.3	188,351,226,146	174,736,431,037	92.8	94.8
2.2.3	Belanja Modal	168,247,589,458	144,255,052,183	85.7	159,961,368,504	153,539,681,459	96.0	137,733,325,985	132,854,725,599	96.5	203,288,181,018	200,429,181,165	97.6	266,145,701,067	268,151,647,437	100.8	95.3
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	306,137,284,332	277,504,777,196	90.6	321,238,171,748	308,953,262,221	96.2	325,184,153,535	312,524,900,155	96.1	416,820,198,858	397,832,875,316	95.4	498,292,606,313	487,303,534,872	97.8	95.2

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015

Paraf hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Mukam	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Penrakarsa	✓
BARPEPA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1	
2	
3	

Berdasarkan Tabel 3.6, dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat mengalami kenaikan periode tahun 2011 sebesar Rp 570.148.800.482 hingga pada tahun 2015 sebesar Rp.921.154.743.893, namun penyerapan Belanja Tidak Langsung dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan, rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 94%. Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar Rp.277.504.777.196 atau 90,6% sampai dengan tahun 2015 besaran belanja langsung sebesar Rp.487.303.534.872 atau 97,8%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 95,2% atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

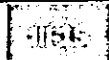
b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pacitan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

KODE	URAIAN	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	BELANJA	752,430,525,680	828,429,659,384	845,879,055,553
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	605,938,226,247	666,613,158,843	674,241,352,867
5.1.1	Belanja Pegawai	605,938,226,247	666,613,158,843	674,241,352,867
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	598,354,363,747	660,141,808,843	667,145,897,867
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	5,315,862,500	4,287,350,000	4,693,175,000
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2,268,000,000	2,184,000,000	2,402,280,000
5.2	BELANJA LANGSUNG	146,492,299,433	161,816,500,541	171,637,702,686
5.2.1	Belanja Pegawai	35,279,233,250	35,966,853,877	44,415,456,398
5.2.1.01	Honorarium PNS	14,382,271,000	16,298,827,500	19,497,018,800
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,686,349,500	2,535,562,000	3,273,690,450
5.2.1.03	Uang Lembur	3,779,078,950	3,988,964,000	4,038,045,300
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	10,431,533,800	13,143,500,377	17,606,701,848
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,915,708,331	109,224,418,451	107,827,899,101
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,727,527,514	10,228,994,862	11,580,062,028
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,884,382,366	32,178,441,261	36,726,472,646
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	83,500,000		
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,935,466,476	6,427,603,966	6,304,168,657
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,481,763,692	7,517,066,023	8,104,894,192
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	776,322,450	607,542,300	706,893,450
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	489,806,800	712,694,000	991,302,200
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	706,521,200	798,360,120	769,195,050
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,167,057,785	10,381,279,255	11,564,184,297
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	291,311,125	1,030,221,525	951,200,900
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	255,714,045	308,851,840	549,077,800
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	480,440,820	851,988,950	1,682,613,945
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,294,073,359	35,621,394,749	38,089,727,465
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	146,150,000	103,550,000	67,550,000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,181,470,500	2,421,429,600	1,278,618,500
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	14,000,000	35,000,000	42,000,000
5.2.3	Belanja Modal	12,297,357,852	16,625,228,213	19,394,317,187

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021



Parat hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Parat Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	✓
BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

KODE	URAIAN	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan tanah (kantor)	4,001,800		
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	2,579,820,100	4,864,082,250	1,398,760,000
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	297,955,500	247,720,000	3,814,084,000
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	46,464,000	99,000,000	-
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	281,118,730	255,970,910	340,747,550
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,129,208,035	1,286,512,895	2,539,810,364
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,081,073,867	3,822,976,433	3,016,133,614
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,028,233,700	2,584,913,655	2,145,486,429
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	58,086,900	306,799,560	263,735,000
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	345,665,080	443,068,610	710,857,560
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	825,856,350	822,415,000	1,440,717,525
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	227,697,660	419,257,900	376,071,295
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	124,190,000	170,164,300	200,062,500
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	1,218,434,100	1,265,415,700	3,059,366,750
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	49,552,030	36,931,000	88,515,000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013-2015

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Selanjutnya disajikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	BELANJA	TOTAL PENGELUARAN	PERSENTASE
		(UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)	(BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2013	752,430,525,680	1,038,432,098,890	72,5%
2	Tahun Anggaran 2014	834,548,852,059	1,203,401,576,766	69,3%
3	Tahun Anggaran 2015	854,458,936,619	1,409,408,278,765	60,6%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 persentasenya sebesar 72,5% dan tahun 2015 persentasenya menurun menjadi sebesar 60,6%.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada waktu yang akan datang perlu efisiensi dalam penganggaran belanjanya. Sehingga proporsi belanja pembangunan dan belanja aparatur dapat seimbang.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, maka pemerintah Kabupaten Pacitan harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Gambaran defisit riil anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)		
		2013	2014	2015
1	Pendapatan Daerah	1,061,597,988,848	1,260,505,596,064	1,426,596,968,333
2	Belanja Daerah	1,036,980,098,890	1,202,651,376,766	1,408,458,278,765
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000
A.	Defisit Riil	22,965,889,958	57,103,819,298	17,188,689,567
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	48,439,592,447	71,734,182,405	129,225,801,703
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	328,900,000	387,800,000	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	48,768,292,447	72,121,982,405	129,225,801,703
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		71,734,182,405	129,225,801,703	146,414,491,271

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Jumlah SiLPA	71,734,182,405	129,225,801,703	146,414,491,271	13.3
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-
SiLPA riil (1-2-3)		71,734,182,405	129,225,801,703	146,414,491,271	13.30

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
I.	BELANJA	726,348,610,103	804,462,864,319	919,886,549,174	12,54
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	688,472,776,767	767,155,357,953	877,364,429,297	12,90
1	Gaji Dan Tunjangan	598,354,363,747	660,141,808,843	667,145,897,867	5,69
2	Tambahan Penghasilan PNS	5,315,862,500	4,287,350,000	4,693,175,000	-4,94
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2,268,000,000	2,184,000,000	2,402,280,000	3,15
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	856,951,920	899,205,110	931,626,100	4,27
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	81,677,598,600	99,642,994,000	202,191,450,330	62,46
B.	BELANJA LANGSUNG	38,075,833,336	37,307,506,566	42,522,119,877	5,98
1	Honorarium PNS	14,382,271,000	16,298,827,500	19,497,018,800	16,47
2	Honorarium Non PNS	6,686,349,500	2,535,562,000	3,273,690,450	-16,48
3	Belanja Jasa Kantor	8,952,945,910	9,823,366,680	10,912,301,270	10,40
	Belanja telepon	971,220,319	949,729,113	998,122,558	1,44
	Belanja air	136,311,803	137,022,122	204,447,926	24,86
	Belanja listrik	7,664,706,139	8,542,387,904	9,478,588,049	11,21
	Belanja kawat/faksimili/internet	180,707,649	194,227,341	231,142,737	13,24

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021



Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,935,466,476	6,427,603,966	6,304,168,657	3.19
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	776,322,450	607,542,300	706,893,450	-2.69
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	489,806,800	712,694,000	991,302,200	42.30
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	706,521,200	798,360,120	769,195,050	4.67
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	146,150,000	103,350,000	67,550,000	-31.96
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,452,000,000	750,000,000	950,000,000	-10.84
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	720,000,000	750,000,000	950,000,000	15.42
	Dana Bergulir	732,000,000			-50.00
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	JUMLAH (I + II)	728,000,610,103	805,212,864,319	920,836,549,174	12.48

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan PNS, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD Perubahan Kabupaten Pacitan 2011- 2016 yaitu realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 10,86% per tahun sebagaimana pada Tabel 3.12 berikut ini:

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021



Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPDA	
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Tabel 3.12
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Dalam RPJMD 2011-2016

URAIAN	REALISASI 2011	REALISASI 2012	P-APBD 2013	PERTUMBUHAN	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015	PROYEKSI 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH	48,559,915	57,298,239	59,955,764	9,26	67,334,101	76,556,573	82,483,608
Pajak Daerah	6,006,625	7,954,645	8,230,500	16,23	14,866,500	17,576,663	20,780,589
Retribusi Daerah	11,626,055	14,058,542	16,602,154	10,55	17,133,828	19,601,086	22,541,249
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,903,227	3,139,175	2,235,917	-0,14	4,354,910	4,572,656	4,801,288
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27,824,006	32,145,876	32,887,192	7,78	30,978,863	34,806,169	34,360,182
DANA PERIMBANGAN	583,216,975	703,480,864	755,533,057	10,35	807,131,276	899,916,896	978,134,647
Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak	48,580,538	61,926,220	56,602,134	13,69	54,518,392	62,696,151	65,830,958
Dana Alokasi Umum	480,580,537	589,829,914	647,293,403	11,42	700,743,024	784,832,187	859,391,245
Dana Alokasi Khusus	54,055,900	51,724,730	51,937,520	-2,15	51,869,860	52,388,559	52,912,444
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	226,660,054	197,898,434	236,111,734	13,69	247,412,234	251,575,030	255,813,816
Hibah	986,005	842,483	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	29,581,537	27,659,934	36,729,718	-3,08	37,167,595	37,725,109	38,290,986
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	175,238,937	145,874,996	172,511,571	-8,29	180,137,150	182,839,207	185,581,795
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20,853,574	23,521,020	26,870,445	6,47	30,107,489	31,010,714	31,941,035
PENDAPATAN DAERAH	858,236,946	958,677,537	1,051,900,556	10,86	1,121,877,611	1,228,048,500	1,516,432,071

Sumber: RPJMD Perubahan Kab.Pacitan 2011- 2016

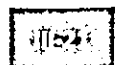
Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BARUDA	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 terjadi pengurangan pendapatan karena adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, diantaranya penarikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang merupakan bagian urusan pendidikan menjadi kewenangan provinsi, urusan pertambangan dan urusan kehutanan sehingga mengakibatkan penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana Tabel 3.13 sebagai berikut:



Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021
Kabupaten Pacitan

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.575.856.624.605	1.671.863.194.083	1.763.146.790.925	1.850.295.277.746	1.937.095.670.527
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.620.203.065	147.830.084.784	160.067.836.606	171.569.157.809	185.388.736.104
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	25.610.000.000	27.313.000.000	28.056.000.000	28.843.000.000	29.673.000.000
4 1 1 1	Pajak Hotel	350.000.000	360.000.000	370.000.000	380.000.000	400.000.000
4 1 1 2	Pajak Restoran	1.055.000.000	1.070.000.000	1.085.000.000	1.105.000.000	1.120.000.000
4 1 1 3	Pajak Hiburan	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	75.000.000
4 1 1 4	Pajak Reklame	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	500.000.000
4 1 1 5	Pajak Penerangan Jalan	8.160.000.000	8.300.000.000	8.460.000.000	8.640.000.000	8.840.000.000
4 1 1 6	Pajak Parkir	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	25.000.000
4 1 1 7	Pajak Air Tanah	50.000.000	52.000.000	54.000.000	55.000.000	58.000.000
4 1 1 8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000	620.000.000	630.000.000	640.000.000	650.000.000
4 1 1 9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.025.000.000	15.500.000.000	16.000.000.000	16.500.000.000	17.000.000.000
4 1 1 10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	850.000.000	875.000.000	905.000.000	955.000.000	1.005.000.000
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	24.207.802.959	25.958.066.322	29.526.061.966	32.247.004.162	37.198.277.445
4 1 2 1	Retribusi Jasa Umum	11.525.122.270	11.946.622.625	12.383.024.381	12.847.221.225	13.335.102.911
4 1 2 1 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.777.034.770	7.118.035.125	7.473.936.881	7.547.633.725	8.240.015.411
4 1 2 1 2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.420.000	38.920.000	39.420.000	39.920.000	40.420.000
4 1 2 1 3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.722.537.500	1.772.537.500	1.822.537.500	1.872.537.500	1.922.537.500
4 1 2 1 4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.150.000.000	2.175.000.000	2.200.000.000	2.235.000.000	2.275.000.000
4 1 2 1 5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	435.000.000	440.000.000	445.000.000	450.000.000	455.000.000

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	1	2	1	6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4	1	2	1	7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha	11.734.685.689	13.043.068.747	16.149.278.886	18.380.636.651	22.818.636.785
4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	789.515.000	81.664.337	777.353.537	770.500.300	772.082.581
4	1	2	2	2	Retribusi Tempat Pelelangan	720.720.189	727.779.827	727.779.827	734.909.425	742.110.319
4	1	2	2	3	Retribusi Terminal	144.330.500	145.330.500	146.330.500	147.330.800	148.330.500
4	1	2	2	4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.200.000	9.292.000	9.384.920	9.478.769	9.573.356
4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	18.000.000	18.485.886	19.110.000	19.500.000	20.490.000
4	1	2	2	6	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.220.000	17.836.197	17.895.102	17.017.657	17.169.829
4	1	2	2	7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.035.700.000	12.042.680.000	14.451.225.000	16.681.900.000	21.108.880.000
4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu	947.995.000	968.374.950	993.758.699	1.019.146.286	1.044.537.749
4	1	2	3	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	355.000.000	375.000.000	400.000.000	425.000.000	450.000.000
4	1	2	3	2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
4	1	2	3	3	Retribusi Izin Gangguan	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000
4	1	2	3	4	Retribusi Izin Trayek	37.995.000	38.374.950	38.758.699	39.146.286	39.537.749
4	1	3			Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.482.060.653	2.482.060.653	2.559.693.941	2.631.543.914	2.672.293.441
4	1	3	1		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.482.060.653	2.482.060.653	2.559.693.941	2.631.543.914	2.672.293.441
4	1	3	1	1	Bank Pembangunan Daerah	2.301.371.653	2.301.371.653	2.379.004.941	2.450.854.914	2.491.604.441
4	1	3	1	2	Bank Perkreditan Rakyat	180.689.000	180.689.000	180.689.000	180.689.000	180.689.000

Struktur Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Pusat Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

KODE BEKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	85.320.339.453	92.076.957.809	99.926.080.699	107.847.609.733	115.845.165.218
4	1	4	1		Jasa Giro	1.203.382.725	1.263.761.861	1.326.949.954	1.393.297.451	1.462.962.323
4	1	4	2		Pendapatan Bunga Deposito	10.079.867.602	10.583.860.982	11.113.054.031	11.668.706.732	12.252.142.068
4	1	4	3		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000	501.000.000	502.000.000	503.000.000	504.000.000
4	1	4	4		Pendapatan dari BLUD	57.200.000.000	62.600.000.000	69.000.000.000	75.400.000.000	81.800.000.000
4	1	4	5		Pendapatan Lain-lain	35.000.000	13.500.000	13.300.000	13.300.000	13.500.000
4	1	4	6		Pendapatan JKN	16.301.889.126	17.114.834.966	17.970.576.714	18.869.105.550	19.812.560.827
4	2				DANA PERIMBANGAN	1.122.061.900.183	1.176.565.730.536	1.235.640.267.417	1.297.659.101.835	1.361.086.182.459
4	2	1			Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.596.542.451	56.621.542.451	57.364.449.641	56.631.735.414	57.559.817.487
4	2	1	1		Bagi Hasil Pajak	32.489.746.743	32.489.746.743	32.912.008.989	32.330.844.956	33.305.386.856
4	2	1	1	1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.101.150.201	10.101.150.201	9.929.298.980	9.815.399.845	9.986.749.806
4	2	1	1	2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	11.000.258.647	11.000.258.647	11.600.238.379	11.263.170.324	11.965.981.499
4	2	1	1	3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	11.388.337.895	11.388.337.895	11.382.471.630	11.252.274.787	11.352.855.551
4	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.106.795.708	24.131.795.708	24.452.440.652	24.300.890.458	24.254.230.631
4	2	1	2	1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	265.218.663	265.218.663	250.313.018	269.905.070	262.663.853
4	2	1	2	2	Bagi Hasil dari Iuran Tanah (Land-Rent)	62.741.422	62.741.422	66.144.608	52.854.132	61.120.396
4	2	1	2	3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	160.617.920	160.617.920	98.105.405	114.729.851	133.517.774
4	2	1	2	4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	476.810.887	476.810.887	500.218.006	449.456.466	475.824.061
4	2	1	2	5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	21.861.405.549	21.861.405.549	22.255.811.107	21.938.668.605	21.979.322.703
4	2	1	2	6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.257.280.267	1.282.280.267	1.259.127.508	1.452.555.334	1.319.060.844

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021

11/2/21

Paral Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Muband	

Paral Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA ✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	2	1	2	7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	22.721.000	22.721.000	22.721.000	22.721.000	22.721.000
4	2	2			Dana Alokasi Umum	750.855.591.580	787.789.921.523	827.113.985.529	869.255.881.306	909.390.397.821
4	2	2	1		Dana Alokasi Umum	750.855.591.580	787.789.921.523	827.113.985.529	869.255.881.306	909.390.397.821
4	2	3			Dana Alokasi Khusus	314.609.766.152	332.154.266.562	351.161.832.247	371.771.485.115	394.135.967.151
4	2	3	1		DAK FISIK	136.593.702.000	150.253.072.200	165.278.379.420	181.806.217.362	199.986.839.098
4	2	3	1	1	Reguler	91.498.190.000	100.648.009.000	110.712.809.900	121.784.090.890	133.962.499.979
4	2	3	1	2	IPD	45.095.512.000	49.605.063.200	54.565.569.520	60.022.126.472	66.024.339.119
4	2	3	2		DAK NON FISIK	178.016.064.152	181.901.194.362	185.883.452.827	189.965.267.753	194.149.128.053
4	2	3	2	01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10.992.000.000	10.992.000.000	10.992.000.000	10.992.000.000	10.992.000.000
4	2	3	2	02	Tunjangan Profesi Guru	155.405.208.400	159.290.338.610	163.272.597.073	167.354.412.001	171.538.272.301
4	2	3	2	03	Tambahan Penghasilan Guru	2.309.000.012	2.309.000.012	2.309.000.012	2.309.000.012	2.309.000.012
4	2	3	2	04	Bantuan Operasional Kesehatan	5.568.000.000	5.568.000.000	5.568.000.000	5.568.000.000	5.568.000.000
4	2	3	2	05	Jaminan Persalinan	3.172.455.740	3.172.455.740	3.172.455.740	3.172.455.740	3.172.455.740
4	2	3	2	06	Bantuan Operasional KB	569.400.000	569.400.000	569.400.000	569.400.000	569.400.000
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	316.174.521.357	347.467.378.763	367.438.686.902	381.067.018.102	390.620.751.964
4	3	1			Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4	3	2			Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-	-
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	70.879.971.657	73.207.714.601	75.217.649.379	78.518.898.354	82.821.892.102

Pusat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Pusat Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	✓
BAPPEDA	
SKPD/Bagian terkait:	
1.	
2.	
3.	

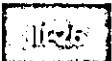
**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

KODE REKENING					URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
4	3	3	1		Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.988.095.313	24.137.500.078	25.223.687.581	26.232.635.084	27.150.777.311
4	3	3	2		Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.375.820.858	11.489.579.066	11.604.474.856	11.720.519.604	11.837.724.800
4	3	5	5		Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.049.176.308	22.101.635.123	23.096.208.703	24.020.057.051	24.860.759.047
4	3	3	4		Bagi Hasil dari Pajak Air Tanah	242.423.122	254.544.278	265.998.770	276.638.720	286.321.075
4	3	3	5		Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.224.456.056	15.224.456.056	15.027.279.469	16.269.047.895	18.686.309.869
4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	181.654.693.500	209.983.409.400	226.980.638.940	236.329.115.187	240.255.475.210
4	3	4	1		Dana Penyesuaian	40.011.114.000	40.011.114.000	40.011.114.000	40.011.114.000	40.011.114.000
4	3	4	2		Dana Desa	141.643.579.500	169.972.295.400	186.969.524.940	196.318.001.187	200.244.361.210
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	63.639.856.200	64.276.254.762	65.240.398.583	66.219.004.361	67.543.384.652

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tahun 2016

Tingkat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Divisi Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



b. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA sesuai Tabel 3.14 direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA sebesar minus 6,42%, hal ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.14
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

URAIAN	PROYEKSI				
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	27.344.361.419	25.914.586.873	25.588.275.922	24.397.099.558	20.846.998.757

c. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

URAIAN	PROYEKSI				
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan	1.575.856.624.605	1.671.863.194.083	1.763.146.790.925	1.850.295.277.746	1.937.095.670.527
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	27.344.361.419	25.914.586.873	25.388.275.922	24.397.099.358	20.846.998.757
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA	1.603.200.986.024	1.697.777.780.956	1.783.735.066.847	1.874.692.377.304	1.957.942.669.284

d. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

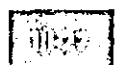
Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat periode tahun sebelumnya. Adapun hasil proyeksi untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat melalui Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
I	BELANJA	1,013,356,150,113	1,059,604,178,338	1,112,638,910,836	1,158,193,527,482	1,195,135,784,816
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,001,226,995,398	1,047,247,293,724	1,098,918,018,305	1,143,957,222,155	1,180,215,855,873

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Gaji Dan Tunjangan	712,312,043,162	742,430,992,063	772,199,929,250	802,706,690,227	830,143,868,612
2	Tambahan Penghasilan PNS	3,067,336,618	3,357,679,576	3,675,305,346	4,023,415,350	4,404,257,254
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,523,615,000	3,610,152,000	3,656,801,000	3,706,463,000	3,748,879,000
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983,679,735	983,679,735	983,679,735	983,679,735	983,679,735
5	Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	4,360,253,146	5,204,000,206	5,571,454,241	6,013,661,780	6,270,192,868
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,306,000,000	1,340,150,000	1,372,000,000	1,404,000,000	1,442,400,000
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	785,274,834	907,198,347	1,041,280,276	1,212,349,204	1,283,195,663
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	274,388,792,903	289,413,441,797	310,417,368,457	323,906,762,859	331,939,382,741
B	BELANJA LANGSUNG	12,129,154,715	12,356,884,614	13,720,592,531	14,236,305,327	14,919,928,943
1	Belanja Jasa Kantor	12,060,629,715	12,288,359,614	13,652,367,531	14,167,780,327	14,851,403,943
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68,525,000	68,525,000	68,325,000	68,525,000	68,525,000
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000
2	Dana Bergulir	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
	I + II	1,016,306,150,113	1,062,354,178,338	1,115,588,910,836	1,161,143,527,482	1,198,085,784,816

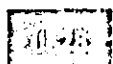
e. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat melalui Tabel 3.17 berikut ini:

**Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.603.200.986.024	1.697.777.780.956	1.788.735.066.847	1.874.692.377.304	1.957.942.669.294
1	PENDAPATAN	1.575.856.624.605	1.671.863.194.083	1.763.146.790.925	1.850.295.277.746	1.937.095.670.527
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	27.344.361.419	25.914.586.873	25.588.275.922	24.397.099.558	20.846.998.757

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____



GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
B	BELANJA DAERAH	1.600.250.986.024	1.694.827.780.956	1.785.785.066.848	1.871.742.377.303	1.954.992.669.284
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.019.162.753.574	1.065.183.051.900	1.116.853.776.481	1.161.892.980.330	1.198.151.614.048
	PRIORITAS I	1.001.226.995.398	1.047.247.293.724	1.098.918.018.305	1.143.957.222.154	1.189.215.855.872
a	Gaji Dan Tunjangan	712.312.043.162	742.430.992.063	772.199.929.250	802.706.690.227	830.143.868.612
b	Tambahan Penghasilan PNS	3.067.336.618	3.357.679.576	3.675.505.346	4.023.415.350	4.404.257.254
c	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3.523.615.000	3.610.152.000	3.656.801.000	3.706.463.000	3.748.879.000
d	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983.679.735	983.679.735	983.679.735	983.679.735	983.679.735
e	Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemd	4.860.253.146	5.204.000.206	5.571.454.241	6.013.661.780	6.270.192.868
f	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.306.000.000	1.340.150.000	1.372.000.000	1.404.000.000	1.442.400.000
g	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	785.274.834	907.198.347	1.041.280.276	1.212.549.204	1.283.195.663
h	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	274.388.792.903	289.413.441.797	310.417.368.457	323.906.762.859	331.939.382.741
	PRIORITAS III	17.935.758.176	17.935.758.176	17.935.758.176	17.935.758.176	17.935.758.176
a	Belanja Hibah	9.599.525.000	9.599.525.000	9.599.525.000	9.599.525.000	9.599.525.000
b	Belanja Bantuan Sosial	6.406.647.816	6.406.647.816	6.406.647.816	6.406.647.816	6.406.647.816
c	Belanja Tidak Terduga	1.929.585.360	1.929.585.360	1.929.585.360	1.929.585.360	1.929.585.360
2	BELANJA LANGSUNG	581.088.232.450	629.644.729.056	668.931.290.367	709.849.396.973	756.841.055.236
	PRIORITAS I	12.129.154.715	12.356.884.614	13.720.892.531	14.236.305.327	14.919.928.943
a	Belanja Jasa Kantor	12.060.629.715	12.288.359.614	13.652.367.331	14.167.780.327	14.851.403.943
b	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68.525.000	68.525.000	68.525.000	68.525.000	68.525.000
	PRIORITAS II	568.959.077.735	617.287.844.442	655.210.397.836	695.613.091.646	741.921.126.293
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000
	PRIORITAS I	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
b	Dana Bergulir	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+C)	-	-	-	-	-

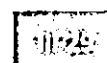
Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa rencana pengeluaran terbesar dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat pada gaji dan tunjangan PNS.

Untuk itu terus diupayakan dan didorong peningkatan belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro sehingga dapat memberikan pemicu atau stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	_____
2.	_____
3.	_____



berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program (*money follow program*). Selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belanja Daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatannya disertai dengan tolok ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sebagaimana tugas pokok dan fungsinya serta diharapkan dapat meningkatkan tingkat capaian terhadap indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan pada penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses *outcome* program serta keluaran dan hasil kegiatan.

f. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan kebijakan terhadap alokasi kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai:

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai:

Program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan dan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang telah diintegrasikan dengan RPJMN maupun RPJMD Propinsi. Program tersebut harus berdampak langsung pada masyarakat dengan daya ungkit pada capaian visi misi. Di samping itu,

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPEDA	✓
Asisten	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

prioritas II juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, dialokasikan untuk mendanai:

Prioritas ini untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, belanja tidak terduga serta didalamnya untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok prioritas dan secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

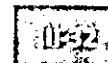
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Tabel 3.18
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

JENIS DANA	PROYEKSI									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	63,39	1.016.306.150.113	62,58	1.062.554.178.338	62,37	1.115.588.910.836	61,94	1.161.143.527.481	61,19	1.198.085.784.815
BELANJA TIDAK LANGSUNG	62,45	1.001.226.995.398	61,68	1.047.247.293.724	61,44	1.098.918.018.305	61,02	1.143.957.222.154	60,28	1.180.215.855.872
BELANJA LANGSUNG	0,76	12.129.154.715	0,73	12.356.884.614	0,77	13.720.892.531	0,76	14.236.305.327	0,76	14.919.928.943
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,18	2.950.000.000	0,17	2.950.000.000	0,16	2.950.000.000	0,16	2.950.000.000	0,15	2.950.000.000
PRIORITAS II	35,49	568.959.077.735	36,36	617.287.844.442	36,63	655.210.397.836	37,11	695.613.091.646	37,89	741.921.126.293
PRIORITAS III	1,12	17.935.758.176	1,06	17.935.758.176	1,00	17.935.758.176	0,96	17.935.758.176	0,92	17.935.758.176
JUMLAH	100	1.603.200.986.024	100	1.697.777.780.956	100	1.788.735.066.848	100	1.874.692.377.303	100	1.957.942.669.284

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BARPEDA	
SKPD/Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



BAB IV





ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

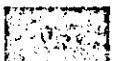
Dalam proses pembangunan, setiap kabupaten/kota akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan dan peluang serta prospek pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi daerah, namun demikian terdapat beberapa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan mewarnai pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan (RPJMD). RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 saat ini merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Dengan demikian, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Hasil identifikasi tersebut disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
30ag		1 _____	
		2 _____	
		3 _____	



Tabel 4.1
Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025


Sasaran RPJPD	Indikator Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya karakter masyarakat Pacitan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral yang menjunjung nilai-nilai agama dan budaya yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Pacitan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek. 2. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat Pacitan, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa. 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Angka Kemiskinan 2. Tingginya Angka Pengangguran 3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam. 4. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. 5. Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dan Pelayanan Publik. 6. Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur. 7. Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih. 8. Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam.
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain, dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. 2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri yang berdaya saing serta meningkatnya peranan sektor jasa. 	
3. Terwujudnya Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi, terpenuhinya pasokan energi sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. 2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. 3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat 4. Terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, aman, sejahtera. 	
4. Terwujudnya Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan masyarakat dari gangguan keamanan baik dari luar daerah maupun dalam daerah. 2. Terciptanya supremasi dan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, 	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian lerkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Sasaran RPJPD	Indikator Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah
	<p>pangkat dan jabatan dan terciptanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.</p> <p>3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.</p> <p>4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.</p>	
5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	<p>1. Semakin baiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi.</p> <p>2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.</p>	
6. Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	<p>1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.</p> <p>2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.</p> <p>3. Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif.</p> <p>4. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.</p>	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam membahas identifikasi permasalahan penentuan program pembangunan daerah ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kondisi yang dihadapi saat ini dengan target atau indikator yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Berikut ini disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi kinerja per urusan.

4.1.2.1. Pendidikan

Permasalahan yang terjadi juga adalah masih terdapatnya penduduk yang buta huruf, tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7,17% penduduk di atas umur 15 tahun yang masih buta huruf. Selain buta huruf, dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan kurang memadai. Pada tahun 2015 untuk jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 5,29% sekolah dalam kondisi bangunan rusak dan untuk jenjang sekolah menengah atas sebanyak 7,19% sekolah dalam kondisi bangunan rusak. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan, karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif.

Masalah lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan tingkat atas, hal ini terlihat pada tahun 2015 angka melanjutkan untuk jenjang SMA/SMK/MA mencapai 80,22% atau sebanyak 19,78% anak yang lulus SMP/MTS tidak melanjutkan.

Berkaitan dengan tenaga pengajar di Kabupaten Pacitan juga masih perlu ditingkatkan lagi kualitas guru yang ada dimana masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV tercatat pada tahun 2015 untuk jenjang sekolah dasar masih terdapat sebanyak 12,22% yang belum memenuhi kualifikasi, untuk jenjang SMP sebanyak 4,49% dan untuk jenjang pendidikan SMA sebanyak 1,08% yang belum memenuhi kualifikasi.

4.1.2.2. Kesehatan

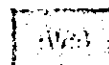
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar bagi setiap masyarakat, hal tersebut juga akan bermuara kepada kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan maka diharapkan secara langsung akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat golongan menengah ke atas lebih percaya berobat di luar Kabupaten Pacitan;
2. Tenaga medis dan paramedis masih kurang, hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga medis yang sudah pensiun, namun sampai sekarang belum ada penggantinya;
3. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum sesuai standart;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



4. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) masih rendah;
5. Pelaksanaan 5 pilar STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) belum optimal;
6. Angka kesakitan penyakit menular serta meningkatnya kasus penyakit yang tidak menular masih tinggi;
7. Kasus gizi buruk pada kelompok rentan di masyarakat;
8. Angka kematian ibu dan bayi masih terjadi.

4.1.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama yang sedang dihadapi adalah masih terdapatnya jalan dan jembatan dengan kondisi belum mantap, tercatat pada tahun 2015 jalan dengan kondisi belum mantap masih sangat tinggi yakni sebesar 43,85% dan jembatan sebesar 7,19%. Jaringan irigasi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 masih terdapat kondisi kurang baik sebesar 43,92%. Permasalahan lain yang sedang dihadapi adalah masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses air bersih. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi aksesibilitas air bersih pada tahun 2015 sebesar 50,05%.

Terkait tata ruang, permasalahannya adalah masih minimnya dokumen tata ruang yang dapat digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang. Untuk saat ini baru ada dokumen RTRW dan belum memiliki dokumen RDTR yang sudah dilegalisasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam tata ruang sebagai berikut:

1. Pesatnya pembangunan yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan;
2. Penanganan infrastruktur wilayah yang belum terpadu secara keruangan;
3. Mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang belum optimal;
4. Peran kawasan strategis di Kabupaten Pacitan belum optimal;
5. Pengembangan wilayah antara kawasan perkotaan dan perdesaan belum terpadu dan sinergis.

4.1.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tinggal yang belum terlayani MCK, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 12,44%. Selain itu di Kabupaten Pacitan juga masih terdapat rumah yang tidak layak huni sejumlah 3.472 unit dan diperkirakan masih ada penambahan. Selain itu di wilayah perkotaan masih terdapat drainase/pembuangan aliran air yang masih kurang baik, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 19,46% drainase yang kondisinya kurang baik.

4.1.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketentraman dan ketertiban yaitu:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
2. Jumlah personil Satpol PP yang kurang memadai (jumlah dan kualitas) mengakibatkan penanganan Peraturan Daerah tidak optimal;

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPDI Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

3. Kurang memadainya sarana dan prasarana, kondisi saat ini belum memiliki ruangan untuk menyimpan barang sitaan;
4. Masih rendahnya kesadaran pihak swasta untuk melakukan perizinan;
5. Ketidaksesuaian izin dari para pelaku usaha. Kondisi yang ada sekarang pelaku usaha mengajukan izin restoran, namun digunakan untuk hiburan dll.;
6. Masih belum terdapat Satuan Linmas untuk daerah-daerah wisata.

4.1.2.6. Sosial

Permasalahan di bidang sosial yang terjadi di Kabupaten Pacitan antara lain kurangnya fasilitas pelayanan PMKS, kurangnya SDM tenaga Tanma Siaga Bencana (TAGANA) dan kampung siaga bencana, kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana, masih rendahnya jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

4.1.2.7. Tenaga Kerja

Pada urusan ketenagakerjaan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pacitan adalah angka partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2014 masih mencapai 68,85%. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat juga tingkat pengangguran terbuka yang terjadi, pada tahun 2014 mencapai 1,08%. Selain itu, permasalahan lain yang juga dihadapi terkait ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya kualitas dan produktifitas angkatan kerja. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang ada memiliki akses yang sangat terbatas untuk memenuhi atau mengisi kebutuhan yang diinginkan lapangan kerja. Lebih lanjut, dengan kualitas tenaga kerja yang terbatas menyebabkan daya saing tenaga kerja tidak optimal.

4.1.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak, beberapa permasalahan di Kabupaten Pacitan adalah masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun sampai dengan tahun 2015 telah ditangani 100% dari seluruh kasus, akan tetapi *trend* tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.

4.1.2.9. Pangan

Dalam bidang ketahanan pangan, masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah semakin menurunnya ketersediaan jumlah pangan utama. Tercatat pada tahun 2015 hanya terdapat 194,55 (Kg/jiwa). Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 204,52 (Kg/jiwa).

4.1.2.10. Pertanian

Dalam bidang pertanian, permasalahan yang terjadi adalah masih tingginya kasus perselisihan tanah yang terjadi, pada tahun 2015 tercatat terdapat 80 kasus perselisihan tanah yang terjadi.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pamrakarsa <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Meskipun demikian seluruh kasus tersebut dapat ditangani seluruhnya dengan baik. Masih rendahnya kepastian hukum kepemilikan tanah di masyarakat yang memiliki lahan.

4.1.2.11. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup, permasalahan persampahan pada tahun 2015 masih terdapat 9,65% yang belum terlayani.

4.1.2.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapatnya penduduk 17 tahun yang belum memiliki KTP. Berdasarkan data yang ada, tercatat pada tahun 2015 terdapat 10,27% penduduk yang belum memiliki KTP. Begitupun dengan kepemilikan akta kelahiran, pada tahun 2015 masih terdapat 19,91% anak yang lahir dan belum memiliki akta lahir. Selain itu permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

1. Kondisi geografis yang menghambat warga untuk mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil;
2. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang;
3. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KIA-Kartu Identitas Anak).

4.1.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan desa juga masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Diperlukan penguatan kelembagaan pasca berakhimya PNPM-MPd untuk memelihara dan melestarikan asset yang dimiliki PNPM-MPd utamanya dana bergulir (SPP);
2. Peran lembaga LPMD belum maksimal;
3. Peran KPM belum optimal di desa;
4. Belum memfungsikan LPMD dalam perencanaan pembangunan di desa;
5. KPM belum diberdayakan;
6. Kurangnya pemahaman peran Pokja Posyandu desa di wilayah Kecamatan dalam mengembangkan tugas fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat akan pentingnya posyandu serta pengurus Pokja Posyandu belum berfungsi secara optimal;
7. Kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga desa dalam mendukung program PMT-AS bagi anak sekolah.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1 _____	
2 _____	
3 _____	

4.1.2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Masih banyak pasangan usia subur yang memerlukan pelayanan kontrasepsi;
2. Masih rendahnya kepesertaan ber KB dan metode kontrasepsi jangka panjang;
3. Terbatasnya jadwal pelayanan *mobile*.

4.1.2.15. Perhubungan

Dalam urusan perhubungan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan adalah rendahnya kualitas angkutan umum yang belum memenuhi SPM, pada tahun 2015 baru terdaftar sebesar 42% angkutan yang melakukan uji kendaraan. Sedangkan kelengkapan alat uji pada unit pelayanan pengujian sampai dengan tahun 2015 baru tercapai 60%, sehingga belum memenuhi persyaratan akreditasi. Selain itu sarana dan prasarana keselamatan transportasi masih sangat minim, ditandai dengan baru terpenuhinya 29,12% dari total kebutuhan. Permasalahan perhubungan juga tidak lepas dari turunnya jumlah penumpang yang dapat terangkut angkutan umum. Penurunan jumlah penumpang disebabkan karena penduduk beralih memilih kendaraan pribadi karena kemudahan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi angkutan umum banyak yang rusak dan terbatas jumlahnya juga menjadi penyebab turunnya jumlah penumpang, sedangkan turunnya jumlah penumpang menyebabkan pendapatan angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional.

4.1.2.16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika antara lain masih terdapat area *blank spot* yang sangat menghambat akses komunikasi ke wilayah tersebut. Selain itu infrastruktur komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Pacitan pun masih belum memadai serta belum memadainya infrastruktur jaringan data, sedangkan pengelolaan data dan informasi sendiri masih bersifat parsial.

4.1.2.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah masih banyaknya koperasi yang kurang aktif, kurangnya kemampuan administratif pengurus koperasi, penegakan marwah koperasi yang memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Permasalahan yang lain adalah masih rendahnya kemampuan wirausahawan dan masih kurangnya permodalan.

4.1.2.18. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Pacitan masih menemui permasalahan yaitu masih rendahnya investor yang masuk ke wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Infrastruktur belum memadai untuk standar nasional;
2. Lahan datar yang tersedia tidak memenuhi luasan area kebutuhan investor;
3. Tidak tersedianya kawasan industri.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPDI Bagian Ferkart:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

4.1.2.19. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang terjadi terkait pemuda dan olahraga adalah masih rendahnya jumlah organisasi pemuda yang ada saat ini. Tidak hanya itu, organisasi olahraga juga masih sangat rendah yakni pada tahun 2015 terdapat 23 organisasi pemuda dan 24 organisasi olahraga. Dengan rendahnya jumlah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya jumlah kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 sebanyak 46 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah ini hanya bertambah 5 kegiatan dari tahun sebelumnya sebanyak 41. Tidak hanya itu, jumlah kegiatan olahraga pun pada tahun 2015 mencapai 29 kegiatan, hanya bertambah 1 kegiatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 28 kegiatan.

4.1.2.20. Statistik

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang statistik adalah belum adanya koordinasi antar PD mengenai urusan statistik sektoral sehingga terjadi tumpang tindih/duplikasi kegiatan pendataan. Masing-masing PD belum mencantumkan program dan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Belum adanya aturan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan statistik sektoral.

4.1.2.21. Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan khususnya berkaitan dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih sangat rendah. Tercatat sampai pada tahun 2015 hanya terdapat 30 sarana saja dan jumlah tersebut mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

4.1.2.22. Perpustakaan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang perpustakaan antara lain adalah:

1. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan (fasilitas ruang baca dewasa dan anak) serta prasarana pendukung;
2. Masih terbatasnya koleksi pustaka yang sesuai kebutuhan pemustaka;
3. Kurangnya tenaga pustakawan dan IT.

4.1.2.23. Kearsipan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kearsipan adalah kurangnya sarana prasarana dan SDM pengelola kearsipan.

4.1.2.24. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kelautan dan perikanan adalah:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi nelayan, pembudidaya serta pengolah perikanan;
2. Penurunan potensi sumber daya ikan;

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

3. Rendahnya permodalan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah;
4. Masih terjadinya pelanggaran alur pelayaran dan penggunaan alat terlarang dalam penangkapan ikan;
5. Rendahnya SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan;
6. Rendahnya ketersediaan benih ikan;
7. Menurunnya ekosistem pesisir.

4.1.2.25. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan pariwisata antara lain:

1. Kebijakan kepariwisataan belum selaras antar sektor dan keruangan;
2. Sarana dan prasarana di daerah menuju tujuan wisata kurang memadai;
3. Jaringan promosi wisata masih kurang;
4. SDM kepariwisataan masih rendah.

4.1.2.26. Pertanian

Kabupaten Pacitan dalam bidang pertanian masih dihadapkan pada permasalahan yaitu semakin menurunnya produktivitas padi atau bahan pangan utama, tercatat pada tahun 2015 menghasilkan 160 ton, jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni sebesar 210,23 ton.

4.1.2.27. Perdagangan

Permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Pacitan meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi serta perlindungan konsumen.

4.1.2.28. Perindustrian

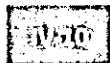
Perindustrian merupakan bidang yang mengedepankan adanya perkembangan dan perubahan ekonomi global yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di wilayah tertentu, sehingga harus dilakukan penataan secara rapi dari perencanaan pembangunan industri, perindustrian dan sistem informasi industri nasional.

4.2. Isu-Isu Strategis

4.2.1. Telaahan Isu/Kebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi

Penentuan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan pemetaan terlebih dahulu berkaitan dengan kebijakan pada tingkatan internasional, nasional maupun regional (provinsi). Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 4.2:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	Y	SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	1/
Asisten	Y	SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	1/	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	



Tabel 4.2
Pemetaan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Isu/Kebijakan Internasional,
Nasional dan Provinsi

Internasional	Nasional (RPJMN 2015-2019)	Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
1. Lingkungan Hidup. 2. Perkembangan Ekonomi. 3. Perkembangan Teknologi Informasi. 4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, Dan Industrialisasi. 3. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Dan Penataan Ruang. Meningkatkan Reformasi Birokrasi, Dan Pelayanan Publik. 4. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial Dan Harmoni Sosial.

Lebih lanjut uraian mengenai RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. RPJMN 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

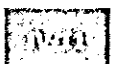
**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Untuk mewujudkan visi ini ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

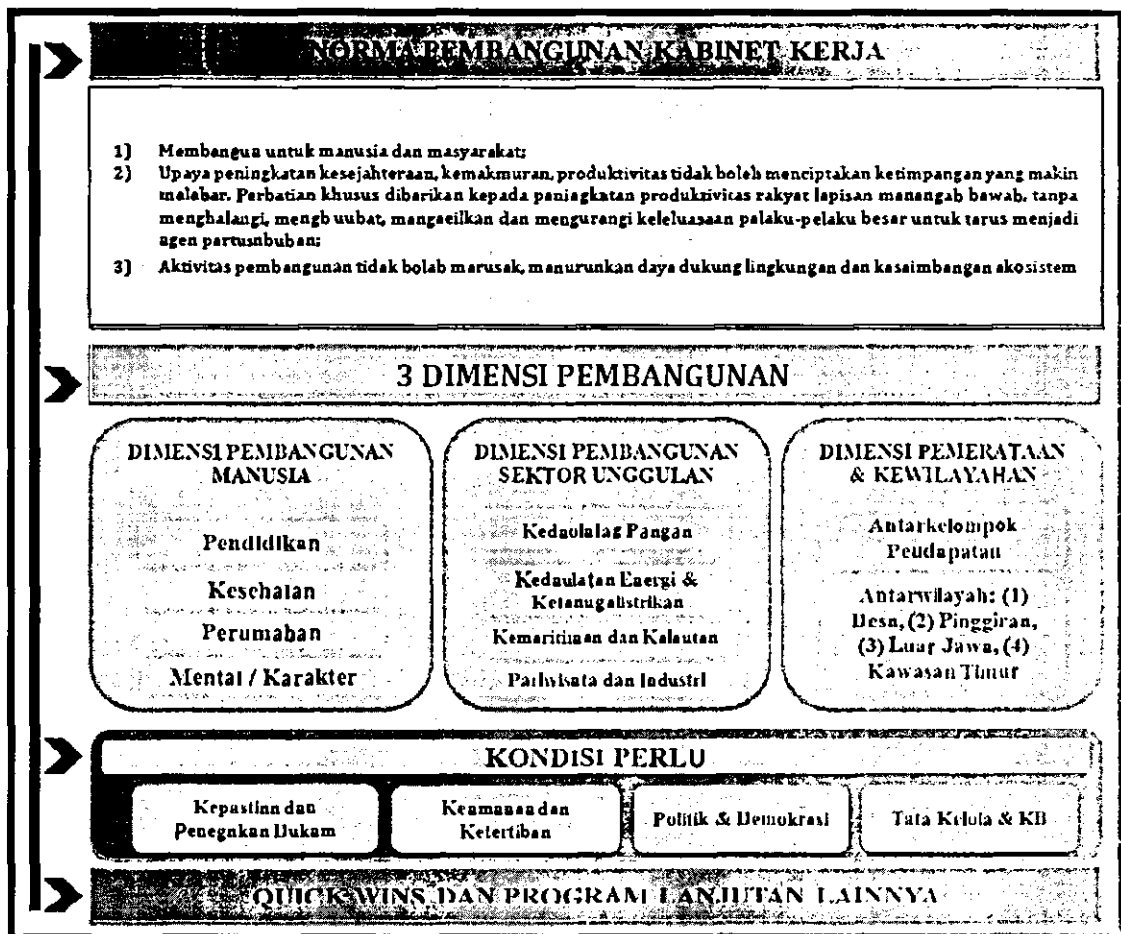
Materi Koordinasi	
SKPD/Bagian Penrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sebagaimana telah disajikan pada Tabel 4.2 diatas. Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan nawacita disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1.
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan diatas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Hal lain yang menjadi isu penting dalam menunjang pencapaian sebagian target nasional, yaitu mengenai *universal access* meliputi : akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) juga menjadi prioritas penanganan dalam RPJMD 2016-2021 ini.

Parat Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Dalam Buku III RPJMN 2015-2019 disusun perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan kewilayahan atau pulau. Berdasarkan hasil telaahan rencana pembangunan nasional untuk wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Pacitan, berikut ini disajikan beberapa arahan pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur.

1. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 36 kabupaten/kota sasaran yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. Adapun jenis bencana yang ada di Kabupaten Pacitan yaitu ancaman banjir dan tanah longsor;
2. Kegiatan strategis jangka menengah nasional di Provinsi Jawa Timur yang terkait sumber daya air salah satunya diprioritaskan untuk pembangunan Bendungan Wonodadi dan penyelesaian pembangunan Waduk Tukul di Pacitan.

2. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ditetapkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014. RPJMD ini merupakan pedoman bagi pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun. Adapun visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak".

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik".

Lima misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 yaitu:

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan Usaha Mikro dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri,

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.
4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.
5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” melalui 5 (lima) misi dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dilakukan berlandaskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat;
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*;
3. Pengarusutamaan gender.

4.2.2. Telaahan Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar.

Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
1. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
2. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
3. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
Mukum		2. _____	
		3. _____	

Tabel 4.3

Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi dan Misi
1	Kabupaten Trenggalek	2016-2021	<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan Taqwa.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan. 2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan. 3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur lain, termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek. 4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat.
2	Kabupaten Ponorogo	2016-2021	<p>Visi: mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah. 2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih daya guna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. 3. Mewujudkan pengelolaan instruktur strategis secara professional agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Membangun Pertanian, sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh. 5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan. 6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakkan hukum yang berkeadilan. 7. Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup, dan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya

Parat Hierarki	
Sekda	Y
Asisten	Y
Kabag Hukum	K

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi dan Misi dan berkepribadian.
3	Kabupaten Gunung Kidul	2016-2021	<p>Visi: Mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang professional. 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. 5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4	Kabupaten Wonogiri	2016-2021	<p>Visi: Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam Visi; 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat; 3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa; 4. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain; 5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat Wonogiri; 6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang; 7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi didalam jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri.

Sumber: website masing-masing kabupaten.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 4 (empat) kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan juga memiliki perodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Pacitan, yaitu 2016-2021. Dengan kondisi tersebut, maka keempat daerah tersebut juga bersamaan menyusun dokumen RPJMD 2016-2021, sehingga substansi yang diidentifikasi dari RPJMD adalah visi dan misi masing-masing

daerah. Hal ini akan mempertimbangkan bahwa visi dan misi tidak akan berubah, sedangkan

Paraf Hierarki	daerah. Hal ini akan mempertimbangkan bahwa visi dan misi tidak akan berubah, sedangkan
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Perakait:
Kabag Hukum	1. _____ 2. _____ 3. _____

informasi lainnya di dalam RPJMD memiliki kemungkinan berubah dalam berbagai tahapan pembahasan rancangan RPJMD menuju Perda RPJMD.

6.2.1. Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat pedoman pembangunan Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025.


Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2005–2025 adalah:

**“Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera
yang Menjunjung Nilai-Nilai Agama dan Budaya”**

Adapun Misi Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata, dicapai dengan cara peningkatan produksi pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya, serta menumbuh kembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan didukung antara lain oleh peningkatan peran Usaha Mikro dan usaha lainnya.
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya, dicapai dengan cara peningkatan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban, konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasaan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dicapai dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dicapai dengan cara membangun transparansi,

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur.

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan.

Saat ini pembangunan Kabupaten Pacitan memasuki tahap ketiga dari RPJPD. Untuk itu harus dilakukan telaah terhadap arah kebijakan tahap ketiga RPJPD. Pembangunan tahap III (2016-2021) diarahkan untuk Pemanjatan Kemandirian Masyarakat. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.

Adapun target setiap tahapan pencapaian indikator kinerja masing-masing misi disajikan pada uraian di bawah ini. Target indikator yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 disajikan berdasarkan misi.

Tabel 4.4
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
MISI I					
1	Angka melek huruf (%)	96,58	96,65	96,71	96,77
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	- APK PAUD	44	56	68	75
	- APK TK	45	56	67	80
	- APK SD/MI/PAKETA	103	103	103	103
	- APK SMP/MTs/PAKET B	97,4	98	99	100
	- APK SMA/SMK/MA/PAKET C	68	75	82	95
	- APM SD/MI/PAKET A	98,99	99	99,5	99,9
	- APM SMP/MTs/PAKET B	82	88	94	99,9
	- APM SMA/SMK/MA/PAKET C	54	64	76	90
3	Usia harapan hidup (tahun)	71,11	71,32	71,53	71,76
4	Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran)	< 4	< 4	< 4	< 4
5	Angka kematian bayi (per 100.000 kelahiran)	< 50	< 50	< 56	< 56
6	Jumlah PMKS (orang)	80.781	70.265	61.119	53.162
7	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,028	0,030	0,032	0,035
8	Tingkat Pengangguran Terhuka (%)	0,87	0,75	0,63	0,54
9	Produktifitas PDRB TK	12.420.273	39.632.860	126.467.719	403.556.134

Parat Hierarki		Produktifitas PDRB TK	
Sekda	2	SKPD/Bagian Penitaksira BAPPEDA	B
Asisten	1	SKPD/Bagian terkait:	
Kabag		1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
10	Angka Kemiskinan (%)	18,20	14,25	10,5	6,75
MISI II					
1	PDRB Perkapita (Rp)	5.781.065,28	6.311.155,60	6.841.245,92	7.371.336,24
2	NTP	116,71	120,61	124,50	128,40
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,52	7,38	8,24	9,10
MISI III					
1	Kondisi Jalan (m)				
	- Baik	760.970	1.095.322	1.576.578	2.269.288
	- Sedang	232.672	334.902	482.050	693.850
	- Rusak	103.746	149.330	214.942	309.382
	- Macadam	74.694	107.513	154.752	222.746
	- Tanah	52.284	75.256	108.322	155.916
2	Cakupan Pelayanan Air Bersih (jiwa)	218.100	313.928	451.860	650.396
3	Rtunah Layak Huni (rumah)	114.764	165.188	237.767	342.236
4	Cakupan Jaringan Listrik (SR)	79.801	114.864	165.332	237.975
MISI IV					
1	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	67,69% - 70%	70% - 73%	73% - 76%	76% - 80%
2	persentase jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda dan Organisasi Masyarakat lainnya yang dibina	7,19% - 14%	14% - 19%	19% - 26%,	26% - 33%.
3	rasio linmas inti per 10.000 penduduk	56,25%-61%	61% - 65%	65% - 68%	68% - 70%
MISI V					
1	Lahan kritis (Ha)	23.233,00	22.248,73	21.264,45	20.280,18
2	Lahan yang ditangani (Ha)	1.795	1.935	2.075	2.215
MISI VI					
1	PAD (Rp.D00)	34.384.121	41.030.501	54.908.066	73.479.378
2	Realisasi Investasi				
	- PMA (Rp.000)	74.659.500	124.075.750	173.492.000	222.908.250
	- PMDN (Rp.000)	21.600.000	39.600.000	57.600.000	75.600.000
3	Jumlah PNS	10.196	10.696	11.446	11.946
4	Tingkat pendidikan formal aparatur				
	- D3/D4/S1	4.541	6.226	7.911	9.596
	- S2	250	350	450	550
	- S3	1	2	3	4

Sumber Data: RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025

6.2.2. Telaahan RTRW Kabupaten Pacitan

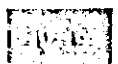
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan mengatur struktur dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur dan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, yaitu bahwa:

1. Memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang, yang memuat:
 - a. kebijakan dan strategi sistem perkotaan
 - b. kebijakan dan strategi sistem perdesaan
 - c. kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah
2. Memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yang memuat:
 - a. kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	7
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

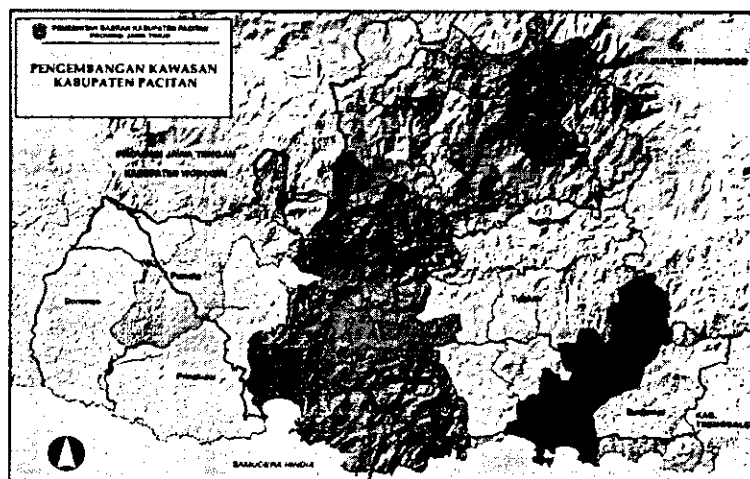


Berdasarkan hierarki dalam penataan ruang wilayah yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang diatas, maka pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Nawangan, Bandar dan Tegalombo
2. Sudimoro, Ngadirojo dan Tulakan
3. Pringkuku, Punung dan Donorojo
4. Arjosari, Pacitan dan Kebonagung

Gambar 4.2 menunjukkan pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan.

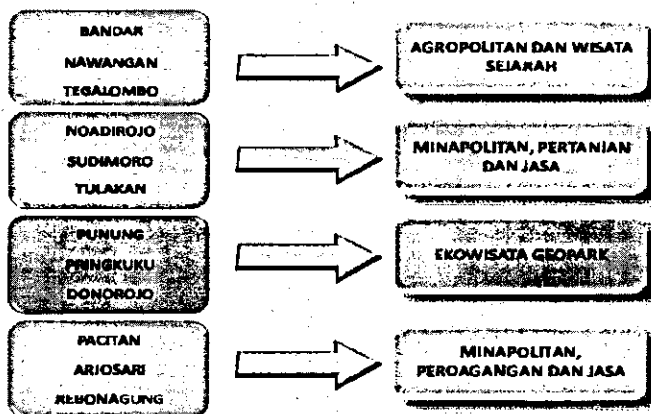
Gambar 4.2
Peta Pembagian Kawasan Pengembangan



Masing-masing kawasan pengembangan mempunyai karakteristik dan potensi unggulan yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah sebagaimana Gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3

Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo

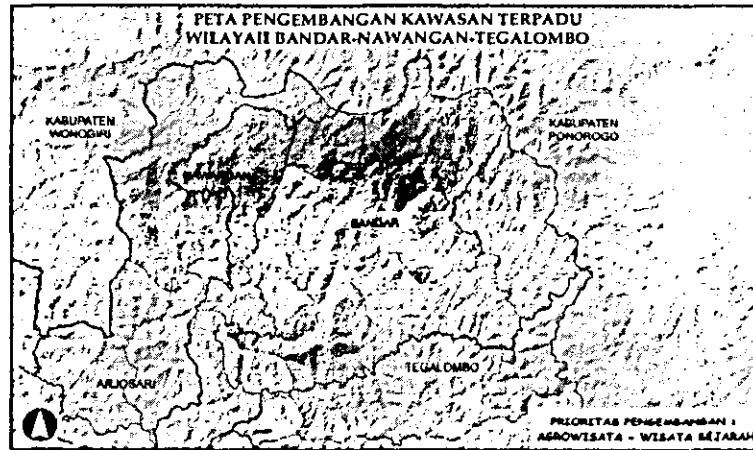
Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah agropolitan dan wisata sejarah. Agropolitan dikembangkan untuk komoditas unggulan antara lain perkebunan (kopi, cengkeh dan janggelan), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk, pisang dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung

Paraf Hierarki	
Sekda	Y
Asisten	9
Kabag Hukum	1

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	F.
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

aktifitas agropolitan juga dikembangkan industri berbasis pertanian antara lain industri sale pisang dan anyaman bambu. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan, khususnya agropolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan poros.

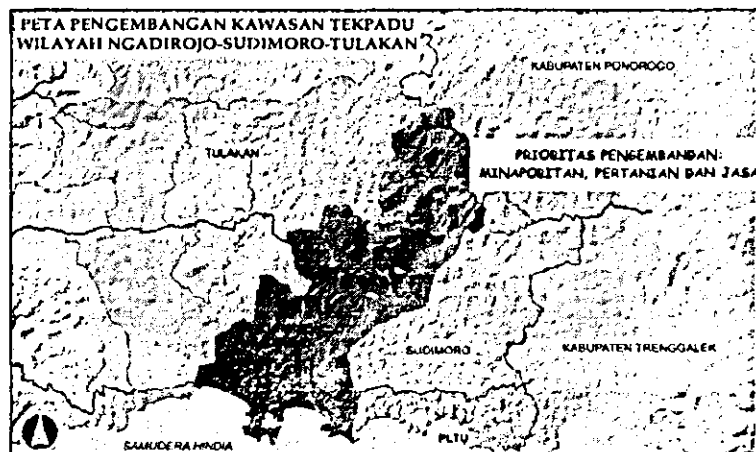
Gambar 4.4
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan

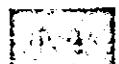
Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, pertanian dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Untuk komoditas pertanian unggulan antara lain perkebunan (melinjo, kelapa, kakao dan cengkeh), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (durian, sukma dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung aktifitas jasa juga dikembangkan industri kain batik tulis. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan khususnya minapolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur pelabuhan. Sedangkan sentra pertanian yang dibutuhkan adanya jaringan irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan kabupaten dan jalan poros.

Gambar 4.5
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan



Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

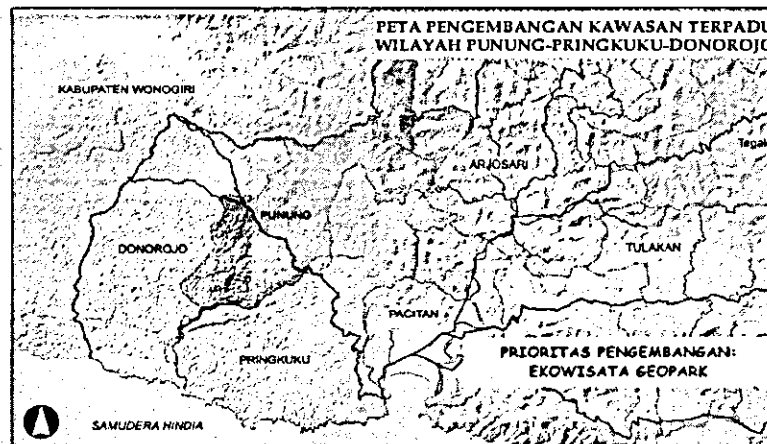
Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah ekowisata geopark. Ekowisata dikembangkan untuk pelestarian dan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, baik obyek wisata pantai, goa, situs sejarah dan budaya guna mendukung Gunung Sewu sebagai jaringan geopark internasional. Untuk destinasi wisata unggulan antara lain pantai Klayar, Goa Gong, Pantai Srau, Pantai Watukarung, Sungai Maron, Pantai Banyu Tibo. Untuk mendukung aktifitas pariwisata juga dikembangkan industri gula merah dan batu mulia. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan poros.

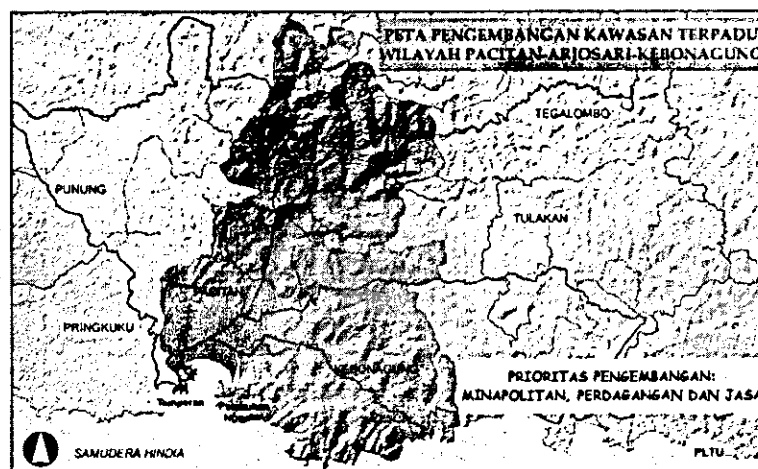
Gambar 4.6
Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, perdagangan dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang didukung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Untuk mendukung aktifitas perdagangan dan jasa dikembangkan pasar daerah dan pusat pengembangan perekonomian kabupaten.

Gambar 4.7
Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung



Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

6.2.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan langkah yang dipakai untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan yang akan datang, terutama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS menghasilkan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis KLHS, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan angkutan;
2. Belum meratanya pelayanan air bersih;
3. Okupansi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya;
4. Adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur antar kecamatan di Kabupaten Pacitan;
5. Kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masih rendah;
6. Minimnya upaya peningkatan mitigasi bencana;
7. Tingginya angka kemiskinan;
8. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
9. Penguatan daya saing ekonomi;
10. Penguatan ketahanan pangan daerah;
11. Belum terdapat sistem jaringan persampahan yang merata.

6.2.4. Kerjasama Antar Daerah

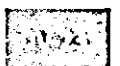
Kerjasama Antar Daerah dalam perspektif otonomi daerah adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menghendaki agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian daerah mempunyai *diskresi* atau keleluasaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah.

Kerjasama Antar Daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerjasama Antar Daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip : a. efisiensi, b. efektivitas, c. sinergi, d. saling menguntungkan, e. kesepakatan bersama, f. itikad baik, g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, h. persamaan kedudukan, i. transparansi, j. keadilan, dan k. kepastian hukum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pelaksanaan kerja sama yang berdampak pada lintas daerah dikelola bersama oleh

daerah terkait untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik,

Paraf Hierarki		
Sekda		SKPDI Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten		SKPDI Bagian Teknis
Kabag Hukum		1. _____ 2. _____ 3. _____



daerah wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan umum. Sedangkan istilah kerja sama daerah sesuai dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Wali kota atau antara Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan kerjasama dengan daerah lain yang diharapkan dapat mengurangi kerawanan sosial dan kesenjangan ekonomi daerah. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kerjasama antar daerah yang masih dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan, antara lain kerjasama dengan kabupaten-kabupaten di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari Gunung Kidul), yang menghasilkan beberapa bidang yang dikerjasamakan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang ketenagakerjaan, bidang kelautan, perikanan dan peternakan, bidang air bersih, bidang pekerjaan umum, bidang pariwisata, bidang ketertiban umum, bidang perkebunan, dan bidang kesejahteraan sosial. Untuk kerjasama antar daerah lintas perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAPAWIROGO (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Ponorogo), juga telah melakukan kerjasama dalam bidang: pelayanan kesehatan, pariwisata, pengembangan penanaman modal, penegakan perda (POL PP), pendidikan, pemadam kebakaran, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO. Selain itu ada juga kerjasama antar daerah yang masih berbentuk "Paguyuban GOLEKPAWON" (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Wonogiri). Dalam kerjasama lintas wilayah perbatasan baik wilayah PAWONSARI, KARISMAPAWIROGO maupun GOLEK PAWON tersebut masih terdapat kendala yaitu belum tertanganinya beberapa hal secara maksimal terutama bidang insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang masih butuh perhatian dari semua pihak.

6.2.5. Isu Strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021

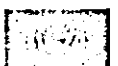
Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Kabupaten Pacitan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan;
5. Penguatan ketahanan pangan daerah;
6. Pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan;
7. Peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal;

pemerintahan yang efektif dan efisien.

Parat Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Parat Koordinator	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1	_____
2	_____
3	_____



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2016-2021, visi Kabupaten Pacitan adalah:

“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kata kunci visi:

Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

5.2. Misi

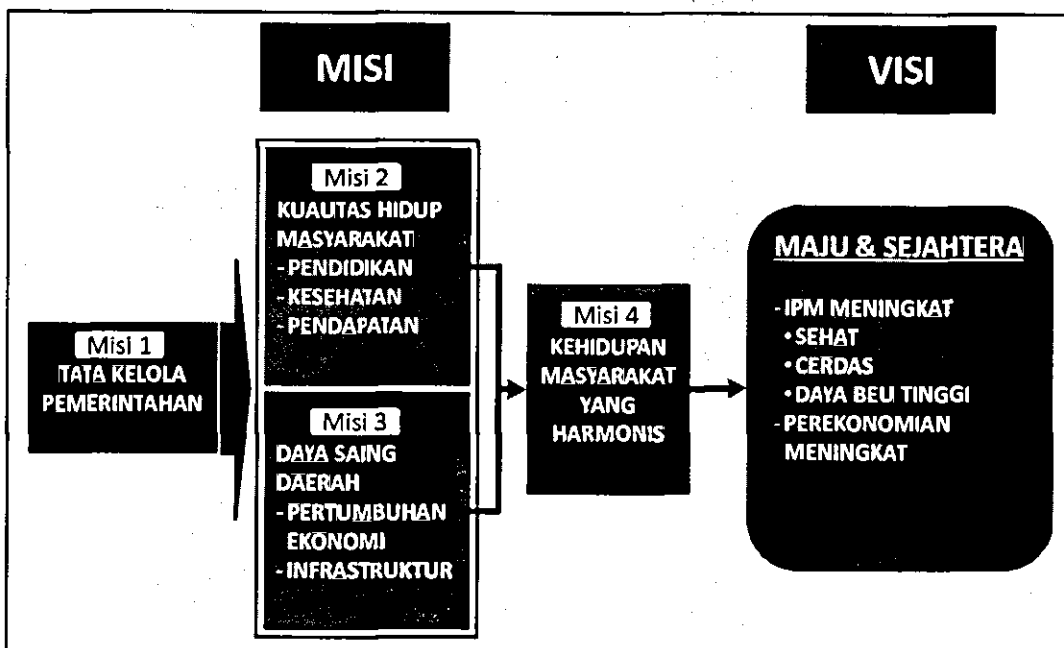
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi diatas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021, sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian visi melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 disajikan pada Gambar 5.1.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	/s/
Asisten	✓	SKPD: Bagian Terkait:	
Kabag	✓	1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

Gambar 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021



Sebagaimana gambar 5.1, untuk mewujudkan visi “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu sebagaimana misi pertama. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama kemampuan Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM yang profesional, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mendukung misi kedua untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung kualitas hidup masyarakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih dipacu selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui program-program pembangunan bidang ekonomi dengan menggerakkan potensi daerah terutama pariwisata, pertanian (agropolitan) dan kelautan (minapolitan) yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Ketiga misi tersebut akan dapat berjalan dan diwujudkan apabila kondisi masyarakatnya kondusif dan harmonis, sebagaimana harapan misi keempat yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” 5 (lima) tahun kedepan akan tercapai dengan indikator masyarakat Pacitan makin sehat, makin cerdas dan daya belinya tinggi atau dengan kata lain indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan meningkat serta perekonomian Kabupaten Pacitan juga meningkat.





Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

5.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan. Dalam konteks ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa bakti 2016-2021 sangat ditentukan oleh penjabaran ke tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut adalah tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT"										
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2017	2018	2019	2020	2021
1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.	1.1 Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan menerapkan <i>good governance</i>	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	1.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik	100	100	100	100	100
					2. Peningkatan E-Government (PeGI)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
				1.1.2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					2. Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat.	2.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat	2.1 IPM	68,17	2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	7,31	7,35	7,4	7,45	7,5
					2. Harapan lama sekolah	12,08	12,25	12,41	12,38	12,74
					3. Nilai rata-rata ujian:					
					- SD	77,14	77,56	77,86	78,21	78,64
				- SMP	82,23	82,56	82,79	82,95	83,26	
				2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	71	71,08	71,16	71,25	71,33
					2. Angka kematian Ibu	137,55	122,27	106,98	91,7	76,42
					3. Angka kematian bayi	8,1	7,95	7,79	7,64	7,49
	4. Prevalensi balita gizi buruk	0,23	0,22		0,21	0,2	0,19			
	2.2 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2.2 Angka Kemiskinan	13,85%	2.2.1. Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	15,8	15,13	14,75	14,33	13,85

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

VISI: "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT"

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2017	2018	2019	2020	2021
				2.2.2. Menurunnya pengangguran	1. Tingkat pengangguran terbuka	1,04	1,03	1,02	1,01	1
				2.2.3. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial	21,7	20,2	18,6	17,1	15,3
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.	3.1 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	3.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,82%	3.1.1. Menguatnya kondisi perekonomian daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,63	5,69	5,74	5,78	5,82
					2. Tingkat inflasi	7,03	6,86	6,41	6,13	6,03
					3. PDRB per kapita	25.686.898	28.265.259	31.093.541	34.201.553	37.622.338
				3.1.2. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	1. Persentase Koperasi Mandiri	1,21	1,41	1,81	2,22	2,42
					2. Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru	3,25	3,43	3,61	3,8	3,97
				3.1.3. Meningkatnya kinerja sektor industri	1. Persentase Pertumbuhan Industri	2,2	2,24	2,27	2,3	2,33
				3.1.4. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.750.000	2.000.000	2.300.000	2.650.000	3.000.000
	3.1.5. Meningkatnya daya saing sektor pertanian	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan	3,8	3,87	3,88	3,88	3,89			
3.2 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	3.2 Indeks Ketahanan Pangan Daerah	44,37 - 68,44	3.2.1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	1. Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	88,71	89,01	90,14	90,19	91,3	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Penrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

VISI: "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT"

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2017	2018	2019	2020	2021
	3.3 Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan	3.3 Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten	65	3.3.1 Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	59,84	61,7	63,56	65,43	65,93
					2. Persentase penduduk berakses air bersih	52,55	54,85	56,7	58,95	60,75
				3.3.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	73,27	73,28	73,29	73,3	73,31
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.	4.1 Meningkatkan kualitas dan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat	4.1 Persentase Konflik Bernuansa SARA yang di selesaikan	100%	4.1.1 Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban	1. Jumlah konflik bernuansa SARA	0	0	0	0	0
					2. Angka kriminalitas	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1
					3. Persentase penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban	92%	93%	94%	95%	97%

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penilikarsa	BAPPEDA <i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan *komprehensif* tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Penentuan arah kebijakan per tahun selama 5 (lima) tahun memberikan gambaran prioritas pembangunan daerah pada setiap tahunnya. Dengan demikian, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pacitan diimplementasikan dalam RKPD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan prioritas yang jelas. Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya diarahkan pada 8 (delapan) agenda Prioritas Utama yang dapat disingkat menjadi HASTA TAMA. HASTA TAMA terdiri dari:

1. Layanan Pendidikan
2. Layanan Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Ketahanan Pangan Daerah
5. Daya Saing Ekonomi
6. Infrastruktur Dasar Berkelanjutan
7. Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan
8. Tata Kelola Pemerintahan

Gambar 6.1

Delapan Agenda Prioritas Utama (HASTA TAMA) Pembangunan Pacitan 2016-2021







Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Prinsip-prinsip pembangunan yang dikedepankan dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Pembangunan untuk semua (seluruh lapisan masyarakat), bukan untuk sebagian masyarakat atau golongan tertentu.
2. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
3. Keterbukaan informasi pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Hubung		2. _____	
		3. _____	


Tabel 6.1
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT			
Misi I	: Memhangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya TY pemerintahan yang profesional dan menerapkan <i>good governance</i>	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional	1. Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT	2017-2018
			2. Peringkatan kapasitas aparatur	2017-2018
			3. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional	2018-2020
			4. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>	2018-2020
			5. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif	2017-2020
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan	2017-2018
			2. Penataan organisasi/kelembagaan	2017-2018
			3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu	2017-2018
			4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	2017-2018
			5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2017-2018
		6. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	2018-2020	
Misi II	: Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meringkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau	1. Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau	2017-2018
			2. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan	2018-2020
			3. Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	2020-2021
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	2017-2020
			2. Peningkatan akses kesehatan masyarakat	2017-2020
			3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	2017-2020
			4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS	2017-2020
			5. Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar	2017-2020
			6. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana	2019-2020

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPDI/Bagian Penakarsa DAPPEDA
Asisten	SKPDI/Bagian Terkait
Kabag Hukum	1. _____ 2. _____ 3. _____

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu	2017-2021
			2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	2017-2021
			3. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2017-2021
			4. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	2017-2021
			5. Pengendalian jumlah penduduk	2018-2020
	Menurunnya pengangguran	Memperluas kesempatan kerja dan usaha	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga	2017-2021
			2. Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif	2017-2021
			3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar	2017-2021
	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS	2017-2021
2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak			2018-2020	
Misi III	: Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Menguatnya kondisi perekonomian daerah	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	1. Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif	2018-2020
			2. Peningkatan pengendalian harga bahan pokok	2018-2020
			3. Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah	2018-2020
	Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	Meningkatkan peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah	1. Penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi	2017-2021
			2. Pengembangan sistem kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi dengan sektor unggulan daerah	2017-2021
	Meningkatnya kinerja sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah	1. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah	2017-2021
			2. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	2017-2021
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing	1. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan	2017-2021
			2. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata	2017-2021

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian	1. Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan 2. Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian	2017-2021 2017-2021
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Pacitan bebas rawan pangan	1. Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat 2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan	2018-2020 2018-2020
Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)	2017-2021
			2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum	2017-2021
			3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi	2017-2021
			4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi	2017-2021
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung	1. Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan	2019-2021
Misi IV	: Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas dan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pacitan Adem Ayem)	1. Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama	2019-2021
			2. Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia	2019-2021
			3. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan	2019-2021

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Penirakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.



Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT".


Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016-2021 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain.

Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu:

MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

1. Birokrasi Profesional dan Berkarakter, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
3. Predator (Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor) dan Silades (Sidang Langsung di Desa), melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Pelayanan Publik Prima Berbasis IT (Pacitan e-gov), melalui Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
6. Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana, melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Penrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

1. Padu PAUD (Pacitan Peduli PAUD), melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pacitan Cendekia, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Guru CAKEP (Cakap, Kompetitif, Edukatif Dan Profesional), melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan, melalui :
 - a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga.
 - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP), melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
6. Kampung ASI, melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
7. GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak), melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
8. SANTUN MAPAN (Sanitasi Total Untuk Masyarakat Pacitan), melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
9. Ketahanan Keluarga Berbasis Posdaya, melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Secara Mandiri.
10. GRINDULU MAPAN (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan), melalui program-program pembangunan yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
11. Peningkatan Rehabilitasi Sosial, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

MISI 3: MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI

1. Rumah Pangan Lestari, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Pacitan Bebas Rawan Pangan, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian.
4. Bangsa Betemak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Sejahtera Bersama Usaha Mikro dan Koperasi, melalui Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Revitalisasi Pasar Daerah/Tradisional, melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa.
7. Industri berdaya saing, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
8. Ayo Wisata Ke Pacitan, melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
9. Transportasi MAPAN (Mantap, Aman dan Nyaman), melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
10. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdaya Guna, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
11. Pacitan Bebas Kawasan Kumuh, melalui Program Pengembangan Perumahan.





Paraf Hierarki		
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	<i>[Signature]</i>	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	
		SKPD/ Bagian Terkait: 1. _____ 2. _____ 3. _____

12. Air Bersih untuk rakyat, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum.
13. Pacitan BERSERI (Bersih, Sehat dan Lestari), melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

MISI 4: MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

1. Pacitan Rukun Damai (pemantapan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama), melalui Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
2. Pacitan Adem Ayem (peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat), melalui Program Pemeliharaan Ketrentaman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3. Pacitan Berubah (revolusi mental dan penguatan jati diri masyarakat berbasis kearifan lokal), penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia, pelestarian seni budaya tradisional dan jati diri masyarakat pacitan, melalui Program Pengembangan Nilai Budaya.

Selain kebijakan dan program unggulan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara keseluruhan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.1 berikut:

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab				
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir							
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional	Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT	Persentase Cakupan Penerbitan (%):			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
				1. KTP	91,38	94,6							
				2. Kartu Keluarga	95,7	97,75							
				3. Akta Kelahiran	81,43	86,35							
								4. Akta Kematian	54,69	56,4	Program pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informatika	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
								Persentase jaringan komunikasi dan infonmatika yang terintegrasi	2,22	100			
								Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi	25	100			
								Persentase PD yang menerapkan SOP	100	100	Program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
								Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100	100	Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	Persandian	Dinas Komunikasi dan Infonmatika
								Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Semua PD
				Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Semua PD				
				Tingkat disiplin aparatur	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Semua PD				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua PD Kecamatan				

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
Mukum		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100	dan Pelayanan Publik Kecamatan	Daerah	
			Peningkatan kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat	18,56	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
				Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur	8,79	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
				Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	19,46	100		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional	Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah yang dihasilkan	3	7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah arsip in aktif yang dikelola	4.320 Box	5.625 Box	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	Dinas Perpustakaan
				Jumlah arsip statis yang dipelihara	97 Box	227 Box			
				Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku (%)	65,89	93,46	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan
				Jumlah Pengunjung Perpustakaan	59.040	137.389	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
			Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	210	630	Program Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	12	72			
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Cakupan desa dan kelurahan tangguh bencana (%)	23	16,4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	8	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA
Asisten	7	SKPD/ Bagian ferka I:	
Kabag	6	1. _____	
Hukum	5	2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	0,001	0,001	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	SATPOL PP
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	< 90 hari	<90 hari	Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10,53	100			
				Keterpaduan program pemerintah	140 kali	250 kali	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH / Wakil KDH	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	100	100	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani	40	100	Program peningkatan kerjasama daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase tertib administrasi pembangunan	100	100	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP	40	100			
				Persentase kebijakan bidang perekonomian yang diterbitkan	18,92	100	Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang perekonomian	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan	14,29	100			
				Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	14,29	100	Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda 8	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten 9	SKPD/ Bagian Terkait -
Kabag Hukum 4	1. _____
	2. _____
	3. _____

KEBUAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	45,57	100	Program penataan peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase penyampaian informasi tentang cukai kepada masyarakat dan/pemangku kepentingan	100	100	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
			Penataan organisasi/kelembagaan	Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	100	Program peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase raperda yang ditetapkan bersama (%)	58,62	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	35,56	100	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan	38,98	100	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	26,67	100	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	50,7	100	Program Perencanaan wilayah dan SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Penilik	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan	95	96	Program Kelitbangan / Inovasi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini audit BPK terhadap Laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100			
				Cakupan pendapatan daerah	1,3	1,8	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	36,63	41,24	Program peningkatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	CC	> B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua PD
				Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan :			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
				Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT (%)	100	100			
				Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (%)	90,16	92,5			
				Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan	42,5	55	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPBDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun (%)	87,5	100	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
				Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (%)	100	100	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
			Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi baik (%)	78,91	88,55	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau	Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau	APK PAUD	75,81	86,68	Program Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Mumi (APM):			Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				SD/Mi	99,03	99,2			
				SMP/MTs	85,14	85,3			
				Angka kelulusan (%):					
				SD/MI	100	100			
				SMP/MTs	100	100			
				Angka Partisipasi Kasar (APK):					
				SD/MI/Paket A	103,12	103,18			
				SMP/MTs/Paket B	98,62	99,1			
				Angka rata-rata lama sekolah	7,77	7,5			
				Angka Melek Huruf (AHM) pada usia 15 s/d 59 th	92,83	95,33	Program pendidikan non formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan	Persentase guru yang berkualifikasi minimal SI			Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				SD/MI	87,78	90			
				SMP/MTs	95,51	96,75			

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KEBUAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pendidikan	80,90	81,50	Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga	Jumlah Pemuda Pelopor	156	203	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (%)	60	65	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Cakupan gedung puskesmas/pustu dalam kondisi baik	37,18	89,74	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif :			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah Sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD
				Persentase ruang rawat inap rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik	69,57	74,2			
				Persentase kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (kondisi baik)	85,97	86,67			
				Persentase jumlah ambulance/mobil jenazah yang berfungsi dengan baik	77,78	83,3			
				Persentase penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	71,88	76,12	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Kesehatan	RSUD
				Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan (%)	95	98	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Peningkatan akses kesehatan masyarakat	Kunjungan puskesmas / visit rate (%)	85,75	88,75	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	10,44	11,36			RSUD
				Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	44,42	47,46	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUD
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar	0	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cost Recovery Rate	>40	>40	Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD	Kesehatan	RSUD
			Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS	Cakupan rumah sehat	73,11	79	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan desa siaga aktif berstrata Purnama Mandiri	8,77	23,39	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar	Persentase penanganan penyakit menular (Diare, DBD, Td Paru dan pneumonia balita)	100	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan balita gizi buruk	100	100	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pertolongan persalinan di sarana kesehatan	99,83	99,89	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan anak balita paripurna (%)	86,6	89			
				Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55,11	65	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana	Persentase sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja	35	39	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK-R	5	35	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB mandiri	73,9	79	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Cakupan kelompok BKB Holistik Integratif ber KB	24,9	80,5	Program Pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Menurunnya angka kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu	Cakupan jumlah kader dalam kelompok Tribina	41,09	70,7	Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang mendapat bantuan modal	1,43	1,48	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Perakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah layak huni	92,21	92,55	Program lingkungan sehat perumahan	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/LPMD)	6,06	6,22	Program pemberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase pertumbuhan lembaga ekonomi perdesaan (%)	2,17	2,95	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	26,99	27,39	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengendalian jumlah penduduk	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	9,98	6	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2,68	12,5	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase transmigran yang ditempatkan	100	100	Program fasilitasi transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6	Menurunnya pengangguran	Memperluas kesempatan kerja dan usaha	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga	Persentase angkatan kerja perempuan	79,2	80,8	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	3,07	3,97	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	75	81	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase Pembinaan Tenaga Kerja	100	100	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan (%)	78,3	84,5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat (%)	60	66	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial	
			Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	80	88	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	Sosial	Dinas Sosial	
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan (%)	65	73,1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial	
			Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase advokasi dan fasilitasi PUG dan anak (%)	36,96	50	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Paraf	Hierarki
	2
	3
	4
	Hukum

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait	
1	
2	
3	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	87,07	87,28	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Menguatnya kondisi perekonomian daerah	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif	Nilai Realisasi Investasi (trilyum)	0,693	0,949	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	26,84	7,5			
				Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	100	Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Lama proses izin usaha Penanaman Modal (hari)	5	3			
				Jumlah Perda dan Perbup dan kebijakan lain yang mendukung iklim infestasi	4	6			
				Persentase permohonan izin energi dan sumber daya mineral yang dilayani	100	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Peningkatan pengendalian harga bahan pokok	Persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah	Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	80,25	87	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Omset penjualan komoditas unggulan	711 M	921 M	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	12,5	18,75	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
Huklim		2. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	0,21	0,1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro dan koperasi	Meningkatkan peran UM dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah	Penguatan dan pemberdayaan UM dan koperasi	Persentase Koperasi Mandiri	0,81	2,42	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Pengembangan sistem kemitraan UM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah	Persentase Usaha Mikro yang dibina	3,47	3,52	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
10	Meningkatnya kinerja sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah	Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil menengah dan kerajinan	11.347	12.697	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	3,95	4,71	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan	Persentase pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pacitan	25	63	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Persentase museum Geosite yang dikembangkan (%)	42	75	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
				Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan yang difasilitasi (%)	69	80	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
				Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	33	67	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata

Parat Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian	Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,75	1,77	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%)	7,56	54,40			
				Peningkatan kelas kelompok tani (%)	2,62	3,26			
				Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan	0	0,25			
				Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	10.891,42	12 626,14	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Produksi perikanan budidaya (kolam, keramba, minapadi, tambak) (ton)	801.448	1.290.740	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	1 398,28	1.784,60	Program Optimalisasi pengelolaan produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%)	0,84	3,24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian	Persentase pelaku usaha perkebun yang mendapat pembinaan	0	25	Program Peningkatan Kapasitas Pelaku usaha Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Cakupan masyarakat penikanan yang mandiri (orang)	4,514	5.761	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau	6,80	5	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Pertanian	Dinas Pertanian
				Status kesehatan ternak (%)	87,5	89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Dinas Pertanian
				Produksi daging (kg)	3.247.446	3.599.625	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Produksi telur (kg)	498.000	552.004			
Produksi Susu (lt)	21.600	23.942							

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Populasi ternak potong besar (ekor)	85.399	94.660			
				Populasi ternak potong kecil (ekor)	171.213	189.780			
				Populasi unggas (ekor)	1.111.778	1.232.341			
13	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Pacitan bebas rawan pangan	Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan pangan (ton) :			Program peningkatan ketahanan pangan	Pangan	Dinas Pangan
				- Beras	116.117	122.000			
				- Jagung	102.256	107.470			
				- Kedelai	6.026	6.533			
				- Daging	1.736	1.917			
				- Telur	373	392			
				- Ikan	8.521	8.956			
				Cadangan pangan pemerintah kabupaten (ton)	≥ 100 ton	≥ 100 ton			
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,84	86,8				
			Pangan yang aman	89	89,9				
			Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan	Produksi hasil perkebunan (ton/Ha)	37.482	38.232	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h)	54,57	55			
				Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h)	90,61	91,09			
Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton)	885.114	889.804							
Produksi hortikultura (ton)	65.836	100.663							
14	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang	Peningkatan kualitas dan kuantitas	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Penirakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait
Kabag Hukum	1. _____ 2. _____ 3. _____

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab			
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
	menjangkau seluruh wilayah	memadai	infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)	- Jalan	39,8	100	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
				- Jembatan	42,8	95,83						
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik								
				- Jalan	56,15	65,93						
				- Jembatan	92,81	93,63						
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				- Alat berat	68,57	71,19						
				- Alat laboratorium	93,55	96,91						
				Persentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik						Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				- Jalan	24,75	36,21						
				- Jembatan	50,1	59,7						
				Persentase permukiman kumuh	0,057	0				Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Peningkatan pembangunan jalan lingkungan	55,38	67,88						
				Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	41,520	52,05						
				Persentase peningkatan prasarana permukiman	0	10,50				Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Sarana Prasarana Permukiman	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	33,94	83,37				Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	31,71	71,74	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan							
Persentase Angkutan laik jalan (tulus uji)	39,44	39,65	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan							

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEPA
Asisten	SKPD/ Bagian terkait:
Kabag Hukum	1. _____ 2. _____ 3. _____

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	36,77	60,66	Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	64,64	95,15	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum	Persentase Penduduk berakses air bersih	50,05	60,75	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi	Persentase rumah tangga ber-Sanitasi	87,56	95,06			
				Drainase dalam kondisi baik	80,54	88,04	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi	Persentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik	44,30	60,80	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	39,30	46,00			
				Luas sawah baru beririgasi (Ha)	0	800			
				Jumlah embung dalam kondisi baik	11	21	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	4	12	Program perencanaan tata ruang	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase bangunan ber IMB per total bangunan	71,72	84,22	Program pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KEBUAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	181	290	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah penataan kawasan dan penanda kawasan	7	12	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung	Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase pengolahan sampah akhir	27	30	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah	90,35	97,85			
				Penghargaan Kebersihan Nasional	ada	ada			
				Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	41	563			
				Penumbuhan bank sampah	13	80	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase industri hasil tembakau yang teruji kualitas lingkungan hidupnya	50	100			
				Jumlah Taman Kehati	0	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RIHJ)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase taman kota yang tertata	36,9	60,2			
				Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan yang disampling	156	200	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100			

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Indeks Tutupan Hutan (ITH)	72,27	72,42	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
16	Meningkatnya kenikmatan, kemnanan dan ketertiban	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pacitan Adem Ayem)	Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama.	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan	0	0	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETDA
			Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia	Persentase petugas LINMAS terlatih (%)	27	100	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA (%)	90	97	Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)	2	2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Persentase penduduk yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	1,95	13,63	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol
				Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	100	100	Program pendidikan politik masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol
				Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan	Persentase seniman/ budayawan yang di bina (%)	85	100	Program pengembangan nilai budaya	Kebudayaan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>BAPPEDA</i>	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana program prioritas Kabupaten Pacitan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing PD. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan tingkat capaian rencana pembangunan.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setiap program disajikan lengkap dengan indikator program, kondisi awal perencanaan, target dan pagu per tahun selama 5 (lima) tahun, kondisi akhir, dan perangkat daerah penanggung jawab. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada Tabel 8.1.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN PACITAN

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	PENDIDIKAN																
1	Program pendidikan anak usia dini	APK PAUD	75,81	80,22	4.117.300.000	81,9	4.475.000.000	83,53	4.750.000.000	85,12	4.975.000.000	86,68	5.300.000.000	86,68	23.617.300.000	Dinas Pendidikan	
2	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka partisipasi murni (APM) :			27.747.870.000		30.750.000.000		31.250.000.000		33.850.000.000		34.600.000.000		158.197.870.000	Dinas Pendidikan	
		- SD/MI	99,03	99,06		99,09		99,12		99,15		99,2		90,2			
		- SMP/MTs	85,14	85,18		85,22		85,28		85,3		85,3		85,8			
		Persentase Angka kelulusan :															
		- SD/MI	100	100		100		100		100		100		100			
		- SMP/MTs	100	100		100		100		100		100		100			
		Angka Partisipasi Kasar (APK)															
		- SD/MI/Paket A	103,12	103,14		103,15		103,16		103,17		103,18		103,18			
		- SMP/MTs/Paket B	98,62	98,74		98,81		98,95		99,00		99,10		99,10			
		Angka rata-rata lama sekolah	7,27	7,31		7,35		7,4		7,45		7,5		7,5			
3	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf (AHM) pada usia 15 s/d 59 th	92,83	93,33	560.000.000	93,83	610.000.000	94,33	648.000.000	94,83	687.000.000	95,33	730.000.000	95,33	3.235.000.000	Dinas Pendidikan	
4	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi minimal S1			1.775.000.000		1.925.000.000		2.045.000.000		2.170.000.000		2.310.000.000		10.225.000.000	Dinas Pendidikan	
		- SD/MI	87,78	88,00		88,5		89		89,5		90		90			
		- SMP/MTs	95,51	95,75		96		96,25		96,5		96,75		96,75			
5	Program manajemen pelayanan pendidikan	Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pendidikan	80,90%	81,10%	1.275.000.000	81,20%	1.385.000.000	81,30%	1.471.000.000	81,40%	1.560.000.000	81,50%	1.650.000.000	81,50%	7.341.000.000	Dinas Pendidikan	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	7.764.420.500	100	7.775.000.000	100	7.800.000.000	100	7.850.000.000	100	7.875.000.000	100	39.064.420.500	Dinas Pendidikan	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>γ</i>	SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>β</i>
Asisten	<i>γ</i>	BAPPEDA	
Kabag	<i>β</i>	SKPD/Bagian Terkait:	
Hukum	<i>β</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	1.080.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.080.000.000	Dinas Pendidikan
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pendidikan
KESEHATAN																
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif berstrata PURI	8,77	11,70	1.500.000.000	14,62	1.625.000.000	17,54	1.726.000.000	20,47	1.835.000.000	23,39	1.956.000.000	23,39	8.642.000.000	Dinas Kesehatan
2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	73,11	75,00	420.000.000	76	455.000.000	77	483.000.000	78	512.500.000	79	546.000.000	79	2.416.500.000	Dinas Kesehatan
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan gedung puskesmas/pustu dalam kondisi baik	37,18	51,28	22.412.650.000	64,1	24.285.000.000	76,92	25.800.000.000	84,62	29.350.000.000	89,74	32.760.500.000	89,74	134.608.150.000	Dinas Kesehatan
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	95	95,00	7.197.770.000	95	7.799.000.000	96	8.285.000.000	97	8.791.000.000	98	9.370.000.000	98	41.442.770.000	Dinas Kesehatan
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														Dinas Kesehatan & RSUD	
		Persentase kunjungan puskesmas/visit rate	85,75	86,75	29.381.764.125	87,25	31.836.950.000	87,75	33.823.400.000	83,25	37.892.300.000	88,75	40.268.350.000	88,75	173.202.764.125	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	10,44	10,60	1.926.000.000	10,79	2.087.000.000	10,99	2.217.000.000	11,19	2.352.000.000	11,36	2.507.000.000	11,36	11.089.000.000	RSUD
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar	0	33,33	2.396.000.000	66,67	2.596.212.000	100	2.708.202.000	100	2.873.800.000	100	3.064.000.000	100	13.638.214.000	Dinas Kesehatan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan Penyakit menular (Diare, DBD, Tb Paru dan pneumonia balita)	100	100	325.000.000	100	350.000.000	100	371.000.000	100	390.000.000	100	415.000.000	100	1.851.000.000	Dinas Kesehatan
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan balita gizi buruk	100	100	500.000.000	100	541.000.000	100	674.000.000	100	609.000.000	100	649.000.000	100	2.873.000.000	Dinas Kesehatan
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan di sarkes	99,83	99,85	3.622.455.750	99,86	3.925.152.000	99,87	4.170.061.000	99,88	4.425.141.000	99,89	4.718.083.000	99,89	20.860.892.750	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan anak balita parapuma	85,6	87,20		87,5		88		83,5		89		89		
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55,11	58	50.000.000	60	65.000.000	62	6.000.000	64	60.000.000	65	65.000.000	65	236.000.000	Dinas Kesehatan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

No	Bidang Urusan Pamarintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		Target	Rp
11	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit oru-pani/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif :			27.336.659.000		29.119.578.000		30.562.119.000		32.064.569.000		33.790.030.000		152.872.955.000	RSUD
		- Persentase ruang rawat inap Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis dan kantor Rumah Sakit dalam kondisi baik	69,57	70,83		72,20		73,50		74,00		74,20		74,20		
		- Persentase kelayakan peralatan pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis (kondisi baik)	85,97	86		86,18		86,35		66,51		86,67		86,67		
		- Persentase jumlah ambulancemobil jenazah yang berfungsi dengan baik	77,78	80		81,80		81,80		81,80		83,30		83,30		
12	Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	≥ 40 %	≥ 40 %	60.435.000.000	≥ 40 %	65.485.028.048	≥ 40 %	69.570.953.731	≥ 40 %	73.826.565.245	≥ 40 %	78.713.845.194	≥ 40 %	348.031.392.218	RSUD
13	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	44,42	45,03	216.075.000	45,63	234.130.000	46,25	248.739.000	46,85	263.954.250	47,46	281.427.000	47,46	1.244.325.250	RSUD
14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	71,88	74,47	2.000.000.000	75	2.100.000.000	75,44	2.200.000.000	75,81	2.300.000.000	76,12	2.400.000.000	76,12	11.000.000.000	RSUD
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.030.000.000	100	1.040.000.000	100	1.050.000.000	100	5.170.000.000	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	2.175.000.000	100	2.180.000.000	100	2.185.000.000	100	2.190.000.000	100	2.200.000.000	100	10.930.000.000	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAMIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun			14.550.000.000		15.682.000.000		16.698.000.000		17.652.000.000		18.648.000.000		83.030.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Jalan	39,8	75,70		100		100		100		100		100		
		- Jembatan	42,8	75		83,33		91,67		93,75		95,83		95,83		
2	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik			97.922.244.575		106.836.964.442		108.698.230.541		118.830.709.065		126.622.705.761		558.910.854.384	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Jalan	56,15	69,84		61,70		63,56		65,43		65,93		65,93		
		- Jembatan	92,81	93		93,25		93,38		93,50		93,63		93,63		

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPDI Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPDI Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan			850.000.000		860.000.000		870.000.000		880.000.000		890.000.000		4.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Alat Berat	68,57	70		69,97		70,38		70,78		71,19		71,19		
		- Alat Laboratorium	93,55	95		95,34		95,87		96,39		96,91		96,91		
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Persentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik	44,30	49,80	11.415.000.000	52,50	12.358.852.500	55,30	13.140.604.600	58	13.944.407.100	60,80	14.867.519.550	60,80	65.736.383.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	39,30	41,60		42,70		43,80		44,90		46,00		46,00		
		Luas sawah baru beririgasi (ha)	0	160		320		480		640		800		800		
5	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah embung Dalam kondisi baik	11	13	4.300.000.000	15	4.650.000.000	17	4.940.000.000	19	5.242.000.000	21	5.589.000.000	21	24.721.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik			8.075.000.000		9.415.512.000		10.691.000.000		11.977.450.000		13.306.950.000		53.465.912.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Jalan	24,75	29,19		31,40		33,62		35,84		36,21		36,21		
		- Jembatan	50,10	54		55,22		66,71		58,20		59,70		59,70		
7	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Penduduk berakses air bersih	60,05	52,55	8.956.922.500	54,58	9.700.000.000	66,70	10.305.000.000	58,95	10.935.000.000	60,75	11.650.000.000	60,75	51.646.922.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga bersanitasi	87,56	89,06		90,56		92,06		93,56		95,06		95,06		
8	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik	80,54	82,04	2.070.000.000	83,54	2.242.000.000	85,04	2.382.000.000	86,54	2.527.000.000	88,04	2.695.000.000	88,04	11.916.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah penataan kawasan dan penanda kawasan	7	9	1.204.320.000	10	1.305.000.000	11	1.386.000.000	12	1.471.000.000	12	1.568.000.000	12	6.934.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	4	6	1.100.000.000	6	1.191.000.000	8	1.266.000.000	10	1.343.000.000	12	1.432.000.000	12	6.332.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program pemanfaatan ruang	Persentase bangunan ber-IMB per total bangunan	71,72	74,22	250.000.000	76,72	270.000.000	79,22	287.000.000	81,72	305.000.000	84,22	325.000.000	84,22	1.437.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	181	220	150.000.000	235	165.000.000	250	175.000.000	265	185.000.000	290	197.000.000	290	672.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	1.000.000.000	100	1.015.000.000	100	1.025.000.000	100	1.035.000.000	100	1.050.000.000	100	5.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	13.550.000.000	100	13.600.000.000	100	13.750.000.000	100	13.900.000.000	100	14.000.000.000	100	68.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	Program lingkungan sehat perumahan	Rumah layak huni	92,21	92,26	1.125.000.000	92,35	1.219.000.000	92,41	1.295.000.000	92,48	1.375.000.000	92,55	1.466.000.000	92,55	6.480.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Persentase permukiman kumuh	0,057	0,035	21.875.000.000	0,024	25.450.000.000	0,015	26.725.000.000	0,007	31.053.000.000	0,000	34.579.000.000	0,000	139.682.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Peningkatan pembangunan jalan lingkungan	55,38	57,88		60,38		62,88		65,38		67,88		67,88		
		Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	41,52	45,03		46,78		48,54		50,29		62,05		52,05		
3	Program Pembinaan Ungkungan Sosial bidang Sarana Prasarana Permukiman	Persentase peningkatan prasarana permukiman	0	2,10	1.000.000.000	4,20	1.084.000.000	6,30	1.152.000.000	8,40	1.222.000.000	10,50	1.303.000.000	10,50	5.761.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	600.000.000	100	615.000.000	100	625.000.000	100	637.000.000	100	650.000.000	100	3.127.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL BASYARAHAT																
1	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Pelugas UNMAS terlatih	27	42	525.000.000	56	550.000.000	71	575.000.000	85	610.000.000	100	650.000.000	100	2.910.000.000	SATPOL PP
2	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA	90	92	450.000.000	93	475.000.000	94	605.000.000	95	535.000.000	97	570.000.000	97	2.535.000.000	SATPOL PP

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		Target	Rp
3	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)	2	2	900.000.000	2	925.000.000	2	950.000.000	2	975.000.000	2	1.000.000.000	2	4.750.000.000	SATPOL PP
4	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	0,001	0,001	1.050.000.000	0,001	1.100.000.000	0,001	1.150.000.000	0,001	1.200.000.000	0,001	1.250.000.000	0,001	5.750.000.000	SATPOL PP
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	665.000.000	100	700.000.000	100	3.375.000.000	Satpol PP
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparat	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.000.000	100	430.000.000	100	440.000.000	100	2.100.000.000	Satpol PP
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> 6	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Satpol PP
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Desa dan Kelurahan tangguh bencana	2,3	7,0	760.000.000	9,4	823.000.000	11,7	875.000.000	14,0	929.000.000	16,4	990.000.000	16,4	4.377.000.000	BPBD
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	400.000.000	100	415.000.000	100	425.000.000	100	438.000.000	100	450.000.000	100	2.128.000.000	BPBD
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	BPBD
SOSIAL																
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	78,3	78,3	700.000.000	79,8	760.000.000	81,4	807.000.000	82,9	856.000.000	84,5	912.000.000	84,5	4.035.000.000	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	80	60	400.000.000	61,2	435.000.000	62,4	460.000.000	63,6	488.000.000	64,8	520.000.000	66,00	2.303.000.000	Dinas Sosial
3	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina	80	80	175.000.000	81,6	189.000.000	83,2	200.000.000	84,8	212.000.000	86,4	225.000.000	88,00	1.001.000.000	Dinas Sosial
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan	65	66,3	400.000.000	67,9	433.000.000	69,2	460.000.000	70,5	488.000.000	71,8	520.000.000	73,1	2.301.000.000	Dinas Sosial
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	700.000.000	100	715.000.000	100	725.000.000	100	737.000.000	100	750.000.000	100	3.627.000.000	Dinas Sosial

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinsrjs Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Masih nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Sosial
D																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
TENAGA KERJA																
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	75	390.000.000	76,5	422.000.000	78	448.000.000	79,5	475.000.000	81	506.000.000	81	2.241.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	Program Pembinaan Ungkungan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Pembinaan Tenaga Kerja	100	100	700.000.000	100	750.000.000	100	796.000.000	100	845.000.000	100	900.000.000	100	3.991.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Persentase advokasi dan fasilitasi PUG dan anak	36,96	38,00	50.000.000	40,00	55.000.000	42,00	60.000.000	45,00	65.000.000	50,00	70.000.000	50,00	300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase angkatan kerja perempuan	79,20	79,50	400.000.000	79,70	433.000.000	80,00	460.000.000	80,50	438.000.000	80,80	520.000.000	80,80	2.301.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
PANGAN																
1	Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan			2.070.000.000		2.250.000.000		2.375.000.000		2.525.000.000		2.690.000.000		11.910.000.000	Dinas Pangan
		- Beras	116.117 ton	118.000 ton		119.000 ton	120.000 ton		121.000 ton		122.000 ton		122.000 ton		122.000 ton	
		- Jagung	102.256 ton	103.278 ton		104.310 ton	105.353 ton		106.406 ton		107.470 ton		107.470 ton		107.470 ton	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BARPEDA	
Kabag	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Huktim		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urutan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		Target	Rp
		- Kedelai	6.026 ton	6.086 ton		6.147 ton		6.209 ton		6.271 ton		6.333 ton		6.333 ton		
		- Daging	1.736 ton	1.771 ton		1.807 ton		1.843 ton		1.879 ton		1.917 ton		1.917 ton		
		- Telur	373 ton	377 ton		380 ton		384 ton		384 ton		392 ton		392 ton		
		- Ikan	8.521 ton	8.606 ton		8.692 ton		8.779 ton		8.779 ton		8.966 ton		8.966 ton		
		Cadangan pangan pemerintah kabupaten	≥ 100 ton	≥ 100 ton		≥ 100 ton		≥ 100 ton		≥ 100 ton		≥ 100 ton		≥ 100 ton		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,84	80,5		81,7		83,4		85,3		86,8		86,8		
		Persentase pangan yang aman	89	89,20		89,40		89,60		89,80		89,90		89,90		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	475.000.000	100	485.000.000	100	495.000.000	100	2.370.000.000	Dinas Pangan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pangan
4. PERTAHANAN																
1	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	36,63	38,17	4.820.000.000	38,940	5.222.000.000	39,70	5.550.000.000	40,47	5.880.000.000	41,24	6.262.000.000	41,24	27.734.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. LINGKUNGAN HIDUP																
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penghargaan Kebersihan Nasional	Ada	Ada	3.550.000.000	Ada	3.750.000.000	Ada	4.000.000.000	Ada	4.250.000.000	Ada	4.500.000.000	Ada	20.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	41	77		161		343		453		563		563		
		Persentase penanganan sampah	90,35	91,85		93,35		94,85		96,35		97,85		97,85		
		Persentase Pengolahan Sampah Akhir	27	27,5		28		28,5		29		30		30		
		Penumbuhan Sank Sampah	13	25		40		55		70		80		80		
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman kehati	0	1	1.080.000.000	2	1.150.000.000	3	1.225.000.000	4	1.300.000.000	5	1.385.000.000	5	6.140.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase taman kota yang terlata	36,9	41,5		44,3		48		50,5		60,2		60,2		
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	745.000.000	100	807.000.000	100	857.000.000	100	909.000.000	100	969.000.000	100	4.287.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Harat Hierarki		Harat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan yang disampling	156	160		170		180		190		200		200		
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Hutan	72,27	72,34	250.000.000	72,36	270.000.000	72,38	287.000.000	72,42	305.000.000	72,42	325.000.000	72,42	1.437.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Persentase industri hasil tembakau yang tenuji kualitas lingkungan hidupnya	50	50	100.000.000	50	108.000.000	80	115.000.000	80	121.000.000	100	129.000.000	100	573.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	685.000.000	100	695.000.000	100	3.370.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Penerbitan :			980.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.110.000.000		1.180.000.000		5.320.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1. KTP	91,38	92,25		92,80		93,95		94,70		94,60		94,60		
		2. Kartu Keluarga	95,70	96,95		97,20		97,35		97,55		97,75		97,75		
		3. Akta Kelahiran	81,43	84,15		84,75		85,25		85,75		86,35		86,35		
		4. Akta Kematian	54,69	55,60		55,75		65,85		56,15		56,40		56,40		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	780.000.000	100	785.000.000	100	795.000.000	100	800.000.000	100	810.000.000	100	3.970.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> 8	40.000.000	> 8	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa dengan administrasi baik	78,91	80,72	500.000.000	82,53	641.000.000	84,53	575.000.000	86,14	610.000.000	88,55	650.000.000	88,65	2.876.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/PMD)	6,06	6,09	220.000.000	6,12	235.000.000	6,16	247.000.000	6,19	264.000.000	6,22	275.000.000	6,22	1.241.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	87,07	87,11	1.175.000.000	87,15	1.276.000.000	87,20	1.350.000.000	87,24	1.400.000.000	87,28	1.475.000.000	87,28	6.675.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekda	8
Asisten	7
Kabag	4
Hukum	

SKPD Bagian Pemrakarsa	
PAPEDA	
SKPD Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target		Rp
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase pertumbuhan lembaga ekonomi pedesaan	2,17	2,23	250.000.000	2,49	270.000.000	2,64	285.000.000	2,80	300.000.000	2,95	320.000.000	2,95	1.425.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	26,99	27,07	1.030.000.000	27,16	1.116.000.000	27,24	1.185.000.000	27,32	1.258.000.000	27,39	1.340.000.000	27,39	5.929.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	685.000.000	100	695.000.000	100	3.370.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> 8	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
1	Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,98	9	2.286.810.000	8	2.475.000.000	7	2.625.000.000	6	2.785.000.000	6	2.965.000.000	6	13.136.810.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja	35	35	50.000.000	36	55.000.000	37	60.000.000	33	70.000.000	39	75.000.000	39	310.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK-R	5,00	15,00	60.000.000	20,00	64.178.066	25,00	57.658.496	30,00	61.079.313	35,00	65.122.731	35,00	287.938.505	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2,68	5,00	240.000.000	7,00	260.000.000	9,00	275.000.000	11,00	290.000.000	12,5	310.000.000	12,5	1.375.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
5	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB mandiri	73,90	73,90	2.435.000.000	75,00	2.633.000.000	76,00	2.800.000.000	78,00	2.950.000.000	79,00	3.145.000.000	79,00	13.968.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6	Program Pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD	Cakupan kelompok BKB Holistik Integratif ber KB	24,90	37,20	60.000.000	50,60	55.000.000	54,20	60.000.000	64,20	65.000.000	80,5	75.000.000	80,5	305.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan/jumlah kader dalam kelompok TnBina Keluarga	41,09	44,10	100.000.000	51,5	108.000.000	63,2	115.000.000	67,4	121.000.000	70,7	130.000.000	70,7	574.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	475.000.000	100	485.000.000	100	500.000.000	100	2.375.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa atur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	60.690.000	100	65.750.000	100	67.500.000	100	72.000.000	100	75.000.000	100	340.940.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> 8	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
PERHUBUNGAN																
1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	33,9	43	5.748.760.000	53,2	6.225.000.000	63,0	6.610.000.000	73,1	7.010.000.000	83,4	7.474.000.000	83	33.067.760.000	Dinas Perhubungan
2	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	32	60	255.000.000	56	276.000.000	61	293.000.000	67	310.000.000	72	330.000.000	72	1.464.000.000	Dinas Perhubungan
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji)	39	40	605.000.000	40	655.000.000	40	695.000.000	40	735.000.000	40	785.000.000	40	3.475.000.000	Dinas Perhubungan

Parek Hukumi		Parek Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukumi	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Ksranka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Aldir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target		Rp
4	Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	37	43	100.000.000	48	108.000.000	52	115.000.000	56	122.000.000	61	130.000.000	61	575.000.000	Dinas Perhubungan
5	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	65	70	1.745.740.000	76	1.891.000.000	82	2.008.000.000	89	2.130.000.000	95%	2.271.000.000	95	10.045.740.000	Dinas Perhubungan
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	685.000.000	100	700.000.000	100	3.375.000.000	Dinas Perhubungan
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	100.000.000	100	108.000.000	100	115.000.000	100	122.000.000	100	130.000.000	100	575.000.000	Dinas Perhubungan
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1	Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika	Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	2,22	41,00	2.600.000.000	56,51	2.850.000.000	72,02	3.025.000.000	87,53	4.210.000.000	100,00	6.425.000.000	100,00	18.110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi	25	43,75		62,50		75,00		87,50		100		100		
2	Program Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa	Jumlah Informasi Publik daerah yang terpubikasi media	210	294	400.000.000	378	433.000.000	462	460.000.000	546	488.000.000	630	520.000.000	630	2.301.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12	24		36		48		60		72		72		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	500.000.000	100	541.000.000	100	675.000.000	100	610.000.000	100	650.000.000	100	2.876.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	305.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro yang dibina	3,47	3,48	100.000.000	3,49	110.000.000	3,50	120.000.000	3,51	127.000.000	3,52	135.000.000	3,52	592.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	3,07	3,25	950.000.000	3,43	987.000.000	3,61	1.018.000.000	3,80	1.050.000.000	3,97	1.086.000.000	3,97	5.091.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang mendapat bantuan modal	1,43	1,44	200.000.000	1,45	220.000.000	1,46	230.000.000	1,47	244.000.000	1,48	260.000.000	1,48	1.154.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Mandiri	0,81	1,21	760.000.000	1,41	781.000.000	1,81	799.000.000	2,22	818.000.000	2,42	838.000.000	2,42	3.996.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	475.000.000	100	485.000.000	100	500.000.000	100	2.375.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	305.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
12	PENANAMAN MODAL															
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah)	0,693	0,728	325.000.000	0,754	352.000.000	0,821	374.000.000	0,883	396.000.000	0,949	423.000.000	0,949	1.870.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	26,84	5,00		5,00		7,60		7,50		7,50		7,50		
2	Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	100	525.000.000	100	575.000.000	100	610.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	3.060.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Lama proses izin usaha Penanaman Modal (hari kerja)	6	5		5		4		3		3		3		
		Jumlah Perda / Perbup dan kebijakan yang mendukung iklim investasi	4	4		5		6		6		6		6		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	600.000.000	100	615.000.000	100	625.000.000	100	635.000.000	100	650.000.000	100	3.125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	46.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	BMang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		Target	Rp
KEPERMUDAAN DAN OLAH RAGA																
1	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	156	158	495.000.000	160	636.000.000	170	570.000.000	180	604.000.000	203	644.000.000	203	2.849.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	60	62	680.000.000	62	736.000.000	63	781.000.000	63	828.000.000	65	882.000.000	65	3.907.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
STATISTIK																
1	Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Data/ Informasi/ Statistik Daerah Yang Dihasilkan	3	3	150.000.000	4	165.000.000	5	175.000.000	6	185.000.000	7	197.000.000	7	872.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
PERSANDIAN																
1	Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	85.000.000	100	100.000.000	100	365.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
KEBUDAYAAN																
1	Program pengembangan nilai budaya	Persentase seniman/ budayawan yang di bina	85	85	445.000.000	90	500.000.000	96	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	2.745.000.000	Dinas Pendidikan
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase museum Geosite yang dikembangkan	42	60	100.000.000	60	125.000.000	65	135.000.000	70	150.000.000	75	175.000.000	75	685.000.000	Dinas Pendidikan
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan yang difasilitasi	69	71	1.600.000.000	73	1.625.000.000	75	1.725.000.000	78	1.825.000.000	60	1.945.000.000	80	8.620.000.000	Dinas Pendidikan
PERPUSTAKAAN																
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	59.040	77.389	750.000.000	92.389	815.000.000	107.389	865.000.000	122.389	917.000.000	137.389	977.000.000	137.389	4.324.000.000	Dinas Perpustakaan
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	475.000.000	100	485.000.000	100	500.000.000	100	2.375.000.000	Dinas Perpustakaan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PO	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	60.000.000	> B	220.000.000	Dinas Perpustakaan
KEARSIPAN																
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	4.320 Box	4.561 Box	150.000.000	4.842 Box	162.000.000	6.183 Box	172.000.000	5.364 Box	182.000.000	5.625 Box	194.000.000	5.625 Box	860.000.000	Dinas Perpustakaan

Patal Himpun		Patal Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	BAPPEDA	
Kabag	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	
Hukum	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Mo	Bidang Umsan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Arsip Statis yang Dipelihara	97 Box	123 Box		149 Box		175 Box		201 Box		227 Box		227 Box		
2	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	65,89	73,36	120.000.000	78,04	130.000.000	83,18	138.000.000	88,32	146.000.000	93,46	156.000.000	93,46	690.000.000	Dinas Perpustakaan
URUSAN PILIHAN																
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
1	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	10.891,42	11.218,17	2.450.000.000	11.554,71	2.654.000.000	11.901,35	2.819.000.000	12.258,39	2.991.000.000	12.626,14	3.189.000.000	12.626,14	14.103.000.000	Dinas Perikanan
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi, tambak) (Kg)	801.448	881.593	2.120.000.000	969.752	2.297.000.000	1.066.727	2.440.000.000	1.173.400	2.589.000.000	1.290.740	2.760.000.000	1.290.740	12.206.000.000	Dinas Perikanan
3	Optimalisasi pengelolaan produksi Perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	1.398,28	1.468,20	950.000.000	1.541,61	1.030.000.000	1.618,69	1.094.000.000	1.699,62	1.160.000.000	1.784,60	1.236.000.000	1.784,60	5.470.000.000	Dinas Perikanan
4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Cakupan masyarakat perikanan yang mandiri (orang)	4.514	4.739,70	275.000.000	4.976,69	298.000.000	5.225,52	316.000.000	5.486,80	335.000.000	5.761,13	357.000.000	5.761,13	1.581.000.000	Dinas Perikanan
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PO	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	685.000.000	100	700.000.000	100	3.375.000.000	Dinas Perikanan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	60.000.000	> B	220.000.000	Dinas Perikanan
2 PARWISATA																
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	33	42	500.000.000	53	541.000.000	58	575.000.000	63	610.000.000	67	650.000.000	67	2.876.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase pengelolaan destinasi wisata di Kab. Pacitan	25	44	8.619.043.000	50	9.256.000.000	55	9.770.000.000	60	10.306.000.000	63	10.922.000.000	63	48.873.048.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	950.000.000	100	965.000.000	100	975.000.000	100	985.000.000	100	1.000.000.000	100	4.875.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 PERTANIAN																
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas Padi atau baban pangan utama sektor lainnya per ha (kw/ha)	54,57	64,59	3.531.000.000	64,73	4.742.000.000	54,86	4.913.000.000	54,91	5.091.000.000	55,00	6.296.000.000	55,00	24.573.000.000	Dinas Pertanian
		Produktivitas Tanaman Pangan per hektar padi dan palawija (kw/ha)	90,61	90,72		90,84		90,95		91,02		91,09		91,09		

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrosesa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Teknis:	
Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija (Ton)	685.114	886.251		887.408		888.455		889.162		889.804		889.804		
		Produksi Hortikultura (Ton)	65.836	71.434		77.629		84.502		92.145		100.663		100.663		
		Produksi hasil perkebunan (ton)	37.482.087	37.632,085		37.780,100		37.932,100		38.082,150		38.232,087		38.232,087		
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,75	1,75	13.796.440.000	1,76	14.782.000.000	1,76	15.580.000.000	1,77	16.411.000.000	1,77	18.365.000.000	1,77	78.934.440.000	Dinas Pertanian
		Persentase diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani	7,56	17,43		27,30		37,00		46,70		56,40		56,40		
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	2,62	2,97		3,05		3,12		3,19		3,26		3,26		
		Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan	0	0,05		0,10		0,15		0,20		0,25		0,25		
3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging (kg)	3.247.446	3.315.028	5.080.000.000	3.383.995	6.337.000.000	3.454.397	7.545.000.000	3.526.263	8.762.000.000	3.599.625	10.011.000.000	3.599.625	37.735.000.000	Dinas Pertanian
		Produksi telur (kg)	498.000	508.361		518.937		529.733		540.754		552.004		552.004		
		Produksi susu (litr)	21.600	22.049		22.508		22.976		23.454		23.942		23.942		
		Populasi Ternak Potong Besar (ekor)	85.399	87.176		88.990		90.841		92.731		94.660		94.660		
		Populasi Ternak Potong Kecil (Ekor)	171.213	174.775		178.411		182.123		185.912		189.780		189.780		
		Populasi Unggas (Ekor)	1.111.778	1.134.908		1.158.519		1.182.621		1.207.225		1.232.341		1.232.341		
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase status kesehatan ternak	87,5	87,7	415.000.000	88	450.000.000	88	478.000.000	88	507.000.000	89	540.000.000	89	2.390.000.000	Dinas Pertanian
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase diseminasi teknologi peternakan pada peternak	0,84	1,24	300.000.000	1,64	325.000.000	2,04	345.000.000	2,44	366.000.000	2,84	390.000.000	2,84	1.726.000.000	Dinas Pertanian
6	Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan	Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan	0	5,00	500.000.000	10,00	542.000.000	15,00	575.000.000	20,00	611.000.000	25,00	651.000.000	25,00	2.879.000.000	Dinas Pertanian
7	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau	6,80	5	1.100.000.000	5	1.191.000.000	5	1.265.000.000	5	1.342.000.000	5	1.430.000.000	5	6.328.000.000	Dinas Pertanian
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	1.000.000.000	100	1.015.000.000	100	1.025.000.000	100	1.035.000.000	100	1.050.000.000	100	5.125.000.000	Dinas Pertanian
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> 8	60.000.000	> B	220.000.000	Dinas Pertanian
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase permohonan izin energi dan sumber daya mineral yang dilayani	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	310.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Tanggal		Dinas Pembinaan	
Sekda	8	SKPD/Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA
Asisten	9	SKPD/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	10	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pamerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
PERDAGANGAN																
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	130.000.000	100	141.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	171.000.000	100	752.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	12,5	13,75	50.000.000	15	57.000.000	16,25	65.000.000	17,5	70.000.000	18,75	75.000.000	18,75	317.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Omset penjualan komoditas unggulan	711 M	753 M	300.000.000	795 M	325.000.000	837 M	345.000.000	879 M	366.000.000	921 M	390.000.000	921 M	1.726.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	80,25	82,5	4.034.310.000	84	4.371.000.000	85	4.644.000.000	86	4.928.000.000	87	5.255.000.000	87	23.232.310.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan	Persentase Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	0,21	0,1	50.000.000	0,1	57.000.000	0,1	65.000.000	0,1	70.000.000	0,1	75.000.000	0,1	317.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERINDUSTRIAN																
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah dan Kerajinan	11.347	11.597	1.350.000.000	11.857	1.380.000.000	12.127	1.403.000.000	12.407	1.427.000.000	12.697	1.455.000.000	12.697	7.015.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	Cakupan bina kelompok pengrajin	3,95	4,1	1.450.000.000	4,26	1.571.000.000	4,41	1.669.000.000	4,56	1.771.000.000	4,71	1.888.000.000	4,71	8.349.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	685.000.000	100	700.000.000	100	3.375.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	50.000.000	100	57.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	317.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TRANSMIGRASI																
1	Program fasilitasi transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	100	150.000.000	100	163.000.000	100	173.000.000	100	184.000.000	100	196.000.000	100	866.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN																
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPd	100,00	100,00	2.342.930.000	100,00	2.550.000.000	100,00	2.710.000.000	100,00	2.875.000.000	100,00	3.065.000.000	100,00	13.542.930.000	Bappeda

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

No	Bidang Unwan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD Pananggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
2	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	35,66	52,94	1.300.000.000	64,71	1.408.000.000	76,47	1.495.000.000	88,24	1.586.000.000	100,00	1.690.000.000	100,00	7.479.000.000	Bappeda
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan	38,98	59,32	1.300.000.000	69,49	1.403.000.000	79,66	1.495.000.000	89,83	1.586.000.000	100,00	1.690.000.000	100,00	7.479.000.000	Bappeda
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT)	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	26,67	46,67	210.000.000	60	227.000.000	73,33	241.000.000	86,67	255.000.000	100	271.000.000	100	1.204.000.000	Bappeda
5	Program Perencanaan wilayah dan SDA	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	50,70	66,20	1.190.000.000	74,65	1.289.000.000	83,10	1.369.000.000	91,55	1.453.000.000	100	1.649.000.000	100	6.850.000.000	Bappeda
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	950.000.000	100	965.000.000	100	9.750.000.000	100	985.000.000	100	1.000.000.000	100	13.650.000.000	Bappeda
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	200.000.000	100	215.000.000	100	230.000.000	100	244.000.000	100	260.000.000	100	1.149.000.000	Bappeda
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Bappeda
KELUANGAN																
1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit BPK terhadap Laporan keuangan daerah	WTP	WTP	6.825.500.000	WTP	7.180.000.000	WTP	7.627.000.000	WTP	8.093.000.000	WTP	8.628.000.000	WTP	38.154.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase barang/ aset daerah yang teregistrasi	100	100		100		100		100		100		100		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	1.530.000.000	100	1.550.000.000	100	1.665.000.000	100	1.575.000.000	100	1.585.000.000	100	7.805.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	2.750.000.000	100	2.765.000.000	100	2.775.000.000	100	2.885.000.000	100	2.995.000.000	100	14.170.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	100	150.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	825.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	150.000.000	> B	150.000.000	> B	160.000.000	> B	160.000.000	> B	175.000.000	> B	795.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sekda	2	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	BAPPEDA	F-
Asisten	4	SKPD/ Bagian Terkait:		
Kabag		1. _____		
Hukum		2. _____		
		3. _____		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	PD Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target
6	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Cakupan pendapatan daerah	1,3	1,4	4.325.000.000	1,6	4.686.000.000	1,6	4.978.000.000	1,7	5.282.000.000	1,8	5.631.000.000	1,6	24.902.000.000	Badan Pendapatan Daerah
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	400.000.000	100	415.000.000	100	425.000.000	100	435.000.000	100	450.000.000	100	2.125.000.000	Badan Pendapatan Daerah
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	315.000.000	Badan Pendapatan Daerah
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
1	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat	18,56	25,39	1.675.000.000	52,84	1.815.000.000	68,52	1.923.000.000	84,26	2.045.000.000	100	2.180.000.000	100	9.643.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur	8,79	20,00	1.930.000.000	40,00	2.091.000.000	60,00	2.221.000.000	80,00	2.357.000.000	100	2.514.000.000	100	11.113.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	19,46	33,87		51,34		67,25		83,61		100		100		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	685.000.000	100	700.000.000	100	3.375.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	315.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
RENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
1	Program Kelitbangan / Inovasi Daerah	Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan	95	95	1.375.000.000	95	1.490.000.000	95	1.583.000.000	96	1.679.000.000	96	1.790.000.000	96	7.917.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Parat Hierarchy	Parti Koordinasi
Sekda	SKPDI Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPDI Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	475.000.000	100	485.000.000	100	600.000.000	100	2.375.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	60.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	315.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> 8	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN UMUM																
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan :			1.655.000.000		1.793.000.000		1.904.000.000		2.020.000.000		2.154.000.000		9.526.000.000	Inspektorat
		- Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT	100	100		100		100		100		100		100		
		- penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90,16	90,50		91		91,50		92		92,50		92,50		
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawas	42,60	45	545.000.000	47,50	591.000.000	50	628.000.000	52,50	666.000.000	55	710.000.000	55	3.140.000.000	Inspektorat
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pedoman susdur pengawasan yang disusun	67,50	22	35.000.000	55,5	40.000.000	77,7	50.000.000	88,8	65.000.000	100	75.000.000	100	265.000.000	Inspektorat
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	315.000.000	Inspektorat
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	900.000.000	100	915.000.000	100	925.000.000	100	935.000.000	100	950.000.000	100	4.625.000.000	Inspektorat
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Inspektorat
7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	100	250.000.000	100	271.000.000	100	288.000.000	100	306.000.000	100	326.000.000	100	1.441.000.000	Sekretariat Daerah
8	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintahan umum yang diterbitkan	100	100	450.000.000	100	487.000.000	100	618.000.000	100	550.000.000	100	586.000.000	100	2.691.000.000	Sekretariat Daerah
9	Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum	Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	< 90 hari	< 90 hari	750.000.000	< 90 hari	813.000.000	< 90 hari	864.000.000	< 90 hari	917.000.000	< 90 hari	978.000.000	< 90 hari	4.322.000.000	Sekretariat Daerah

Parat Hierarchy	Parat Koordinasi
Sekda	SKPD Bagian Pengkarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		Persentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10,53	26,32		42,11		63,16		84,21		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
10	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan	Persentase terbit administrasi pembangunan	100	100	650.000.000	100	704.000.000	100	748.000.000	100	794.000.000	100	647.000.000	100	3.743.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP	40	60		70		80		90		100		100		
11	Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang diterbitkan	18,92	45,95	600.000.000	59,46	650.000.000	72,97	691.900.000	86,40	733.000.000	100	782.000.000	100	3.458.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan	14,29	42,86		57,14		71,43		85,71		100		100		Sekretariat Daerah
12	Program peningkatan kerjasama daerah	Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani	40	60	350.000.000	70	390.000.000	80	414.000.000	90	439.000.000	100	463.000.000	100	2.071.000.000	Sekretariat Daerah
13	Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	14,29	42,86	450.000.000	57,14	488.000.000	71,43	518.000.000	85,71	550.000.000	100	586.000.000	100	2.592.000.000	Sekretariat Daerah
14	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan	0	0	1.050.000.000	0	1.138.000.000	0	1.209.000.000	0	1.282.000.000	0	136.600.000	0	4.815.600.000	Sekretariat Daerah
15	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	45,57	63,72	550.000.000	72,79	596.000.000	81,86	633.000.000	90,93	672.000.000	100	716.000.000	100	3.167.000.000	Sekretariat Daerah
16	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH / Wakil KDH	Keterpaduan program pemerintah	140 kali	200 kali	4.750.000.000	225 kali	5.147.000.000	240 kali	5.466.000.000	245 kali	5.802.000.000	250 kali	6.186.000.000	250 kali	27.353.000.000	Sekretariat Daerah
17	Program penataan dan ketatalaksanaan pelayanan publik	Persentase PD yang menerapkan SDP	100	100	200.000.000	100	217.000.000	100	230.000.000	100	244.000.000	100	260.000.000	100	1.151.000.000	Sekretariat Daerah
18	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase penyampaian informasi tentang cukai kepada masyarakat dan/ pemangku kepentingan	100	100	250.000.000	100	271.000.000	100	288.000.000	100	306.000.000	100	326.000.000	100	1.441.000.000	Sekretariat Daerah
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	4.300.000.000	100	4.315.000.000	100	4.330.000.000	100	4.345.000.000	100	4.360.000.000	100	21.650.000.000	Sekretariat Daerah
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	1.460.750.000	100	1.470.000.000	100	1.480.000.000	100	1.490.000.000	100	1.500.000.000	100	7.400.750.000	Sekretariat Daerah
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	320.000.000	Sekretariat Daerah
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PO	CC	> B	550.000.000	> B	565.000.000	> B	575.000.000	> B	585.000.000	> B	595.000.000	> B	2.870.000.000	Sekretariat Daerah
23	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase raperda yang ditetapkan bersama	68,62	72,41	15.900.000.000	79,31	17.228.000.000	86,21	18.303.000.000	93,10	19.422.000.000	100	20.707.000.000	100	91.560.000.000	Sekretariat DPRD

Paraf hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Perencanaan	✓
Asisten	✓	BAPPEDA	
Kabag Hukum	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	1.950.000.000	100	1.965.000.000	100	1.975.000.000	100	1.985.000.000	100	1.995.000.000	100	9.870.000.000	Sekretariat DPRD
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	100	125.000.000	100	130.000.000	100	135.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	680.000.000	Sekretariat DPRD
26	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PO	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Sekretariat DPRD
27	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	1,95	5,84	2.060.000.000	7,79	2.075.000.000	9,74	2.100.000.000	11,69	2.125.000.000	13,63	2.150.000.000	13,63	10.510.000.000	Badan Kesbangpol
28	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	100	100	365.000.000	100	395.500.000	100	420.000.000	100	445.000.000	100	475.000.000	100	2.100.600.000	Badan Kesbangpol
29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	500.000.000	100	515.000.000	100	525.000.000	100	535.000.000	100	550.000.000	100	2.625.000.000	Badan Kesbangpol
30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	305.000.000	Badan Kesbangpol
31	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	CC	> B	40.000.000	> B	40.000.000	> B	45.000.000	> B	45.000.000	> B	50.000.000	> B	220.000.000	Badan Kesbangpol
32	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	182.105.000,00	100	202.105.000	100	222.105.000	100	242.105.000	100	262.105.000	100	1.110.525.000	Kecamatan Donorojo
33	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Donorojo
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
34	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	187.919.000,00	100	207.919.000	100	227.919.000	100	247.919.000	100	267.919.000	100	1.139.595.000	Kecamatan Punung
35	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Punung
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	187.919.000,00	100	207.919.000	100	227.919.000	100	247.919.000	100	267.919.000	100	1.139.595.000	Kecamatan Pringku

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa	
Asisten		BAPPDA	
Kabag Hukum		SKPD/Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prognnn Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcoms)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Progrwn dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		Target	Rp
37	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Pringluku
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
33	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	902.573.000,00	100	922.673.000	100	942.573.000	100	962.573.000	100	932.573.000	100	4.712.865.000	Kecamatan Pacitan
39	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	1.207.831.000,00	B	1.310.000.000	B	1.392.000.000	B	1.477.000.000	B	1.575.000.000	B		Kecamatan Pacitan
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
40	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	231.405.000,00	100	251.405.000	100	275.405.000	100	285.405.000	100	305.405.000	100	1.349.025.000	Kecamatan Kebonagung
41	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Kebonagung
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
42	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	209.141.000,00	100	229.141.000	100	249.141.000	100	269.141.000	100	289.141.000	100	1.245.705.000	Kecamatan Arjosari
43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	226.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Arjosari
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
44	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	176.033.000,00	100	166.033.000	100	206.033.000	100	226.033.000	100	246.033.000	100	1.040.165.000	Kecamatan Nawangan
45	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Nawangan
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
46	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	166.959.000,00	100	186.959.000	100	206.959.000	100	226.959.000	100	246.959.000	100	1.034.795.000	Kecamatan Bandar

Paraf Miskah		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	BAPPEDA	
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Terkait:	
Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target		Rp
47	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Bandar
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
48	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	185.842.000,00	100	205.842.000	100	225.842.000	100	245.842.000	100	265.842.000	100	1.129.210.000	Kecamatan Tegalombo
49	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Tegalombo
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	225.723.000,00	100	245.723.000	100	265.723.000	100	285.723.000	100	305.723.000	100	1.328.615.000	Kecamatan Tulakan
51	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Tulakan
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
52	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	214.857.000,00	100	234.857.000	100	354.857.000	100	274.857.000	100	294.857.000	100	1.374.285.000	Kecamatan Ngadirojo
53	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Ngadirojo
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
64	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	159.446.000,00	100	189.446.000	100	209.446.000	100	229.446.000	100	249.446.000	100	1.047.230.000	Kecamatan Sudimoro
55	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000,00	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B		Kecamatan Sudimoro
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
TOTAL					581.058.232.450		629.844.729.056		668.931.290.368		709.849.396.973		755.841.085.236		2.328.392.823.082	

Paraf Hierarki	Paraf Organisasi
Sekda	SKPD Bagian Perencanaan BAPPEDA
Asisten	SKPD Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
	2. _____
	3. _____

BAB IX


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Pacitan periode 2016 sampai dengan 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Target capaian kinerja Kabupaten Pacitan disajikan pada Tabel 9.1.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Tabel 9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN

No.	Fokus/Bidang Unisan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,33	5,63	5,69	5,74	5,78	5,82	5,82	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2	PDRB ADHB (Juta Rp.)	11.657.469,90	14.230.820,50	15.707.597,46	17.332.670,79	19.124.039,69	21.101.732,13	21.101.732,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3	PDRB ADHK (Juta Rp.)	8.948.792,66	9.971.569,12	10.539.195,46	11.143.761,82	11.787.666,16	12.473.674,88	12.473.674,88	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.4	Inflasi (%)	8,6	7,03	6,86	6,41	6,13	6,03	6,03	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.5	PDRB per Kapita (Rp.)	21.351.225	25.686.898	28.265.260	31.093.542	34.201.553	37.622,338	37.622,338	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.6	Angka Kemiskinan (%)	16,68	15,80	15,13	14,75	14,53	13,35	13,85	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	64,24	65,52	66,18	66,83	67,5	68,17	68,17	BAPPEDA
1.8	Angka kriminalitas yang tertangani	1,8	1,67	1,61	1,55	1,49	1,43	1,43	SATPOL PP
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 th	92,83	93,33	93,83	94,33	94,83	95,53	95,53	Dinas Pendidikan
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,27	7,31	7,35	7,4	7,45	7,5	7,5	Dinas Pendidikan
	Harapan lama sekolah	11,77	12,08	12,25	12,41	12,58	12,74	12,74	Dinas Pendidikan

Paraf Hierarki	Harapan lama sekolah
Sekda	Paraf Koordinasi
Asisten	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Kabag Hukum	BAPPEDA
	SKPD/ Bagian Terkait:
	1. _____
	2. _____
	3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kesehatan								
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	991,84	991,99	992,15	992,3	992,46	992,61	992,61	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup	8,41	8,25	8,10	7,95	7,79	7,64	7,64	Dinas Kesehatan
2.4	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,83	71,00	71,08	71,16	71,25	71,33	71,33	Dinas Kesehatan
2.5	Persentase Balita Gizi Buruk	0,25	0,23	0,22	0,21	0,2	0,19	0,19	Dinas Kesehatan
3	Ketenagakerjaan								
3.1	Persentase Penduduk yang Bekerja	98,78	98,96	98,97	98,98	98,99	99,00	99,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah grup kesenian	45	53	58	63	69	75	75	Dinas Pendidikan
1.2	Jumlah gedung kesenian	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan
2	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah Klub olahraga	138	138	138	138	138	139	139	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.2	Jumlah gedung olahraga	7	7	7	8	8	9	9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Persentase Angka Partisipasi Sekolah								Dinas Pendidikan
	- Usia 7-12 tahun	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
	- Usia 13-15 tahun	90,07	90,08	90,09	90,10	90,11	90,12	90,12	
1.2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah								Dinas Pendidikan

Paraf Hierarchy		
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>BAPPEDA</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	
		SKPD/ Bagian Terkait:
		1. _____
		2. _____
		3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- SD/MI	117,24	117,35	117,47	117,54	117,61	117,73	117,73	
	- SMP/MTs	48,68	48,74	48,81	48,89	48,94	49,00	49,00	
1.3	Rasio guru terhadap murid								Dinas Pendidikan
	- SD/MI	118	121	124	127	130	133	133	
	- SMP/MTs	108	111	114	117	120	123	123	
1.4	APK PAUD	75,81	80,22	81,9	83,53	85,12	86,68	86,68	Dinas Pendidikan
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) :								Dinas Pendidikan
	- SD/MI	99,03	99,06	99,09	99,12	99,15	99,2	99,2	
	- SMP/MTs	85,14	85,18	85,22	85,26	85,3	85,3	85,3	
1.6	Persentase Angka Kelulusan :								Dinas Pendidikan
	- SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	
	- SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK)								Dinas Pendidikan
	- SD/MI/Paket A	103,12	103,14	103,15	103,16	103,17	103,18	103,18	
	- SMP/MTs/Paket B	98,62	98,74	98,81	98,95	99,00	99,10	99,10	
1.8	Persentase guru yang berkualifikasi minimal S1								Dinas Pendidikan
	- SD/MI	87,78	88,00	88,5	89	89,5	90	90	
	- SMP/MTs	95,51	95,75	96	96,25	96,5	96,75	96,75	
1.9	Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pendidikan	80,90	81,10	81,20	81,30	81,40	81,50	81,50	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan								
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	23,17	23,63	23,68	23,74	23,8	23,36	23,86	Dinas Kesehatan
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	Dinas Kesehatan
2.3	Rasio pustu per satuan penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Dinas Kesehatan
2.4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,0034	0,005	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	Dinas Kesehatan
2.5	Rasio dokter per satuan penduduk	0,25	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga per satuan	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,44	1,44	Dinas Kesehatan

Paraf Kepala	Rasio tenaga per satuan	
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten	BAPPEDA	
Kabag	SKPD/ Bagian terkait:	
	1	
	2	
	3	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendudukp								
2.7	Cakupan Desa Siaga Aktif berstrata PURI	8,77	11,70	14,62	17,54	20,47	23,39	23,39	Dinas Kesehatan
2.8	Cakupan rumah sehat	73,11	75,00	76	77	78	79	79	Dinas Kesehatan
2.9	Cakupan gedung puskesmas/pustu dalam kondisi baik	37,18	51,28	64,1	76,92	84,62	89,74	89,74	Dinas Kesehatan
2.10	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	95	95,00	95	96	97	98	98	Dinas Kesehatan
2.11	Persentase kunjungan puskesmas/visit rate	85,75	86,75	87,25	87,75	88,25	88,75	88,75	Dinas Kesehatan
2.12	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	10,44	10,60	10,79	10,99	11,19	11,56	11,36	RSUD
2.13	Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar	0	33,33	66,67	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.14	Persentase penanganan Penyakit menular (Diare, DBD, Tb Paru dan pneumonia balita)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.15	Cakupan pelayanan balita gizi buruk	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.16	Cakupan pertolongan persalinan di sarkes	99,83	99,85	99,86	99,87	99,878	99,39	99,89	Dinas Kesehatan
2.17	Cakupan pelayanan anak balita paripurna	86,6	87,20	87,5	88	88,5	89	89	Dinas Kesehatan
2.18	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55,11	58	60	62	64	65	65	Dinas Kesehatan
2.19	Sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif :								RSUD
	- Persentase Ruang Rawat Inap Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis dan kantor Rumah Sakit dalam kondisi baik	69,57	70,83	72,20	73,50	74,00	74,20	74,20	

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Perakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1 _____	
		2 _____	
		3 _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Persentase kelayakan peralatan pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis (kondisi baik)	85,97	86	86,18	86,35	86,51	86,67	86,67	
	- Persentase jumlah ambulance/mobil jenazah yang berfungsi dengan baik	77,78	80	81,80	81,80	81,80	83,30	83,30	
2.20	Cost Recovery Rate	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	RSUD
2.21	Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	44,42	45,03	45,63	46,25	46,85	47,46	47,46	RSUD
2.22	Persentase penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	71,88	74,47	75	75,44	75,81	76,12	76,12	RSUD
2.23	Kemampuan layanan kesehatan Rumah Sakit	Tipe C	Tipe C	Tipe C	Tipe C	Tipe B	Tipe B	Tipe B	RSUD
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Jalan	56,15	59,84	61,70	63,56	65,43	65,93	65,93	
	- Jembatan	92,81	93	93,25	93,38	93,50	93,63	93,63	
3.2	Jumlah tempat ibadah	3.167	3.197	3.212	3.227	3.242	3.257	3.257	Sekretariat Daerah
3.3	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	24.137,50	24.985,00	25.840,00	26.690,00	27.540,00	28.350,00	28.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.4	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	22,00	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00	12,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	36,70	38,20	39,70	41,20	42,70	44,20	44,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1 _____	
		2 _____	
		3 _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	19,20	19,21	19,22	19,23	19,24	19,25	19,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.7	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.8	Persentase Penduduk berakses air bersih	50,05	52,55	54,58	56,70	58,95	60,75	60,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.9	Persentase rumah tangga bersanitasi	87,56	89,06	90,56	92,06	93,56	95,06	95,06	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.10	Drainase dalam kondisi baik	80,54	82,04	83,54	85,04	86,54	88,04	88,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.11	Jumlah penataan kawasan dan penanda kawasan	7	9	10	11	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.12	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	4	6	6	8	10	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.13	Persentase bangunan ber IMB per total bangunan	71,72	74,22	76,72	79,22	81,72	84,22	84,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.14	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	181	220	235	250	265	290	290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.15	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kota Kabupaten per satuan penduduk	0,56	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Pokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	4.489	6.145	6.827	7.509	8.191	8.873	8.873	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.17	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Jalan	39,8	75,70	100	100	100	100	100	
	- Jembatan	42,8	75	83,33	91,57	93,75	95,33	95,83	
3.18	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Alat Berat	68,57	70	69,97	70,38	70,78	71,19	71,19	
	- Alat Laboratorium	93,55	95	95,34	95,87	96,39	96,91	96,91	
3.19	Persentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik	44,30	49,80	52,50	55,30	58	60,80	60,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.20	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	39,30	41,60	42,70	43,80	44,90	46,00	46,00	
3.21	Luas sawah baru beririgasi (ha)	0	160	320	480	640	800	800	
3.22	Jumlah embung Dalam kondisi baik	11	13	15	17	19	21	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.23	Persentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Jalan	24,75	29,19	31,40	33,62	35,84	36,21	36,21	
	- Jembatan	50,10	54	55,22	56,71	58,20	59,70	59,70	

Paraf Hierarchy	Perumahan, Perikanan dan Kawasan Permukiman
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait
Kabag	1. _____ 2. _____ 3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Persentase permukiman layak huni	99,943	99,965	99,976	99,985	99,993	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.2	Rumah tangga pengguna air bersih	69,02	70,75	71,62	72,49	73,6	74,47	74,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.3	Lingkungan pemukiman kumuh	0,057	0,055	0,053	0,051	0,049	0,047	0,047	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.4	Peningkatan pembangunan jalan lingkungan	55,88	57,88	60,38	62,88	65,38	67,88	67,88	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.5	Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	41,52	45,03	46,78	48,54	50,29	52,05	52,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.6	Persentase peningkatan prasarana permukiman	0	2,10	4,20	6,30	8,40	10,50	10,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.7	Rumah layak huni	92,21	92,26	92,35	92,41	92,48	92,55	92,55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.8	Persentase permukiman kumuh	0,057	0,035	0,024	0,015	0,007	0,000	0,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	SATPOL PP
4.10	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	133.678	137.718	139.784	141.881	144.009	146.169	146.169	Dinas Komunikasi dan Informatika

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,99	1,02	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	SATPOL PP
5.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	SATPOL PP
5.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	SATPOL PP
5.4	Persentase Penegakan PERDA	90	94	95	95	97	99	99	SATPOL PP
5.5	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	90	92	93	94	95	97	97	SATPOL PP
5.6	Persentase Petugas LINMAS terlatih	27	42	56	71	85	100	100	SATPOL PP
5.7	Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA	90	92	93	94	95	97	97	SATPOL PP
5.8	Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)	2	2	2	2	2	2	2	SATPOL PP
5.9	Cakupan Desa dan Kelurahan tangguh bencana	2,3	7,0	9,4	11,7	14,0	16,4	16,4	BPBD
6	Sosial								
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Sosial
6.2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	78,3	78,3	79,8	81,4	82,9	84,5	84,3	Dinas Sosial

Parat Hierarki	
Sekda	<i>6</i>
Asisten	<i>7</i>
Kabag	<i>4</i>

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>BAPPEDA</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	


INDIKATOR KINERJA DAERAH


No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	78,3	78,3	79,8	81,4	82,9	84,5	84,5	Dinas Sosial
6.4	Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	60	60	61,2	62,4	63,6	64,8	66	Dinas Sosial
6.5	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina	80	80	81,6	83,2	84,8	86,4	88	Dinas Sosial
6.6	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan	65	66,3	67,9	69,2	70,5	71,8	73,1	Dinas Sosial
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	75	76,5	78	79,5	81	81	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2	Persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.3	Tingkat pengangguran terbuka	1,22	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.4	Keselamatan dan perlindungan	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.6	Persentase penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	60	60	61,2	62,4	63,6	64,8	64,80	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.7	Persentase Pembinaan Tenaga Kerja	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	67,28	67,28	67,5	67,95	68,01	68,05	68,05	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.2	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	32,72	32,72	32,5	32,05	31,99	31,95	31,95	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.3	Rasio KDRT	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01%	0,01	0,01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Persentase advokasi dan fasilitasi PUG dan anak	36,96	38,00	40,00	42,00	45,00	50,00	50,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.7	Persentase angkatan kerja perempuan	79,20	79,50	79,70	80,00	80,50	80,80	80,80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Pangan								
3.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pangan
3.2	Ketersediaan pangan utama	194.55 kg/jiwa	196.67 kg/jiwa	198.31 kg/jiwa	199.96 kg/jiwa	201.161 kg/jiwa	203.25 kg/jiwa	203.25 kg/jiwa	Dinas Pangan
3.3	Ketersediaan pangan								Dinas Pangan
	- Beras	116.117 ton	118.000 ton	119.000 ton	120.000 ton	121.000 ton	122.000 ton	122.000 ton	
	- Jagung	102.256 ton	103.278 ton	104.310 ton	105.353 ton	106.406 ton	107.470 ton	107.470 ton	
	- Kedelai	6.026 ton	6.086 ton	6.147 ton	6.209 ton	6.271 ton	6.333 ton	6.333 ton	
	- Daging	1.736 ton	1.771 ton	1.807 ton	1.843 ton	1.879 ton	1.917 ton	1.917 ton	
	- Telur	373 ton	377 ton	380 ton	384 ton	384 ton	392 ton	392 ton	
		8.521 ton	8.606 ton	8.692 ton	8.779 ton	8.779 ton	8.956 ton	8.956 ton	

Paraf Hierarki	- Kan	Paraf Koordinasi
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten		SKPD/Bagian Terkait:
Kabag Hukum		1. _____
		2. _____
		3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Persentase stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen (coefficient of variance)	8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	Dinas Pangan
3.5	Cadangan pangan pemerintah kabupaten	≥ 100 ton	≥ 100 ton	≥ 100 ton	≥ 100 ton	≥ 100 ton	≥ 100 ton	≥ 100 ton	Dinas Pangan
3.6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,84	80,5	81,7	83,4	85,3	86,8	86,8	Dinas Pangan
3.7	Persentase Pangan yang aman	89	89,20	89,40	89,60	89,80	89,90	89,90	Dinas Pangan
4	Pertanahan								
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	19,51	20,05	20,63	21,25	21,9	22,59	22,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.3	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.4	Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	36,63	38,17	38,940	39,70	40,47	41,24	41,24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	73,24	73,27	73,28	73,29	73,3	73,31	73,31	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Persentase Penduduk berakses air minum	50,05	52,55	54,85	56,7	58,95	60,75	60,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3	Pemantauan status mutu air	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	Luasan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	5	10	15	20	25	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
5.5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.6	Tempat pembuangan sampah (IPS) per satuan penduduk	0,56	1	1,3	1,7	1,3	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
5.7	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.8	Penghargaan Kebersihan Nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
5.9	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	41	77	161	343	453	563	563	Dinas Lingkungan Hidup
5.10	Persentase penanganan sampah	90,55	91,85	93,35	94,35	96,35	97,35	97,85	Dinas Lingkungan Hidup
5.11	Persentase Pengolahan Sampah Akhir	27	27,5	28	28,5	29	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
5.12	Penumbuhan Bank Sampah	13	25	40	55	70	80	80	Dinas Lingkungan Hidup
5.13	Jumlah taman kehati	0	1	2	3	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
5.14	Persentase taman kota yang tertata	36,9	41,5	44,3	48	50,5	60,2	60,2	Dinas Lingkungan Hidup
5.15	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.16	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan yang disampling	156	160	170	180	190	200	200	Dinas Lingkungan Hidup

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag. Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH





No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.17	Indeks Tutupan Hutan	72,27	72,34	72,36	72,38	72,42	72,42	72,42	Dinas Lingkungan Hidup
5.18	Persentase industri hasil tembakau yang teruji kualitas lingkungan hidupnya	50	50	50	80	80	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,91	0,92	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Persentase Kepemilikan KTP	91,38	92,25	92,8	93,95	94,70	94,60	94,60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5	Persentase Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	81,43	84,15	84,75	85,25	85,75	86,37	86,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8	Persentase Cakupan Penerbitan:								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1. KTP	91,38	92,25	92,80	93,95	94,70	94,60	94,60	
	2. Kartu Keluarga	95,70	96,95	97,20	97,35	97,55	97,75	97,75	
	3. Akta Kelahiran	81,43	84,15	84,75	85,25	85,75	86,35	86,35	
	4. Akta Kematian	54,69	55,60	55,75	55,85	56,15	56,40	56,40	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	6,06	6,09	6,12	6,16	6,19	6,22	6,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Persentase rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	87,07	87,11	87,15	87,20	87,24	87,28	87,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.3	Jumlah LSM	49	53	55	57	59	61	61	Badan Kesbangpol
7.4	Persentase LPM Berprestasi	0,29	0,31	0,31	0,31	0,35	0,35	0,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.6	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7.7	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	26,99	27,07	27,16	27,24	27,32	27,39	27,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.8	Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1 _____	
		2 _____	
		3 _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.9	Persentase desa dengan administrasi baik	78,91	80,72	82,53	84,53	86,14	88,55	88,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.10	Persentase pertumbuhan lembaga ekonomi perdesaan	2,17	2,23	2,49	2,64	2,80	2,95	2,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,75	1,74	1,71	1,71	1,70	1,70	1,70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.2	Rasio akseptor KB	48,96	49	49,05	49,09	50	50,05	50,05	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.3	Cakupan peserta KB aktif	78,40	78,86	79,09	79,32	79,55	79,78	79,78	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
			2015	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	9,98	9	8	7	6	6	6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.5	Persentase sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja	35	35	36	37	38	39	39	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.6	Persentase Sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK-R	5,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.7	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2,68	5,00	7,00	9,00	11,00	12,5	12,5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.8	Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB mandiri	73,90	73,90	75,00	76,00	78,00	79,00	79,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.9	Cakupan kelompok BKB Holistik Integratif ber KB	24,90	37,20	50,60	54,20	64,20	80,5	80,5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.10	Cakupan jumlah Kader dalam kelompok Tribina	41,09	44,10	51,5	63,2	67,4	70,7	70,7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
9	Perhubungan								
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	6.520.708	6.553.312	6.586.078	6.619.008	6.652.104	6.685.364	6.685.364	Dinas Perhubungan
9.2	Rasio ijin trayek	0,0085	0,0091	0,0090	0,0088	0,0086	0,0084	0,0084	Dinas Perhubungan
9.3	Rasio uji KIR angkutan umum	42,27	45,03	47,97	51,11	54,45	58,00	58,00	Dinas Perhubungan
9.4	Rasio angkutan melalui terminal	1,568	1,568	1,545	1,537	1,534	1,533	1,533	Dinas Perhubungan
9.5	Rasio penumpang melalui terminal	4,84	4,86	4,86	4,90	4,94	4,96	4,96	Dinas Perhubungan
9.6	Rasio angkutan umum terhadap jumlah penumpang	0,0096	0,0094	0,0092	0,0089	0,0087	0,0085	0,0085	Dinas Perhubungan
9.7	Persentase sarana dan prasarana perhubungan	50,70	56,73	61,93	67,26	72,57	77,91	77,91	Dinas Perhubungan
9.8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit)	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Perhubungan
9.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Dinas Perhubungan
9.10	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	65,20	73,20	80,80	87,30	93,50	100	100	Dinas Perhubungan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Unsur/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.11	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	33,9	43	53,2	63,0	73,1	83,4	83	Dinas Perhubungan
9.12	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	32	50	56	61	67	72	72	Dinas Perhubungan
9.13	Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji)	39	40	40	40	40	40	40	Dinas Perhubungan
9.14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	37	43	48	52	56	61	61	Dinas Perhubungan
9.15	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	65	70	76	82	89	95	95	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	8	8	8	8	8	8	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	28	32	32	32	32	32	32	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.3	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.4	Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	2,22	41,00	56,51	72,02	87,53	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.5	Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi	25	43,75	62,50	75,00	87,50	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.6	Jumlah Informasi Publik daerah yang terpublikasi media	210	294	378	462	546	630	630	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.7	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12	24	36	48	60	72	72	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11.1	Jumlah UM non BPR/LKM UM	22.013	22.233	22.345	22.565	22.785	23.005	23.005	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	



INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	Jumlah BPR/LKM	5.534	5.536	5.538	5.540	5.542	5.542	5.542	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
11.3	Persentase Usaha Mikro yang dibina	3,47	3,48	3,49	3,50	3,51	3,52	3,52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
11.4	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	3,07	3,25	3,43	3,61	3,80	3,97	3,97	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
11.5	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang mendapat bantuan modal	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,48	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
11.6	Persentase Koperasi Mandiri	0,81	1,21	1,41	1,81	2,22	2,42	2,42	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal								
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit usaha)	129	134	140	147	155	164	164	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.2	Rasio daya serap tenaga kerja	3,68	3,86	4,05	4,35	4,68	5,03	5,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.3	Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah)	0,693	0,728	0,764	0,821	0,883	0,949	0,949	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.4	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	26,84	5,00	5,00	7,50	7,50	7,50	7,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Jumlah organisasi pemuda	23	24	24	24	24	24	24	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.2	Jumlah organisasi olahraga	24	25	25	26	26	27	27	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait
Kabag Hukum	1. _____ 2. _____ 3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	46	48	50	50	52	52	52	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.4	Jumlah kegiatan olahraga	29	30	30	31	31	33	33	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	185	186	186	187	188	189	189	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.6	Lapangan olahraga	171	173	175	176	177	179	179	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.7	Jumlah Pemuda Pelopor	156	158	160	170	180	203	203	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.3	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	60	62	62	63	63	65	65	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
14	Statistik								
14.1	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.2	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.3	Jumlah Dokumen Data/ Informasi/ Statistik Sektoral Yang Dihasilkan	3	3	4	5	6	7	7	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian								
15.1	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan								
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	30	32	34	36	38	40	40	Dinas Pendidikan
16.2	Persentase seniman/ budayawan yang dibina	85	85	90	96	100	100	100	Dinas Pendidikan
16.3	Persentase museum Geosite yang dikembangkan	42	50	60	65	70	75	75	Dinas Pendidikan

Pakal Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag	1. _____ 2. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.4	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan yang difasilitasi	69	71	73	75	78	80	80	Dinas Pendidikan
17	Perpustakaan								
17.1	Jumlah perpustakaan	162	450	475	500	525	575	575	Dinas Perpustakaan
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25.316	25.816	26.316	26.816	27.316	27.816	27.816	Dinas Perpustakaan
17.3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	59.040	77.389	92.389	107.389	122.389	137.389	137.389	Dinas Perpustakaan
18	Kearsipan								
18.1	Pengelolaan arsip secara baku	65,80	72,30	79,05	86,05	93,30	100	100	Dinas Perpustakaan
18.2	Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	192	200	200	200	200	200	200	Dinas Perpustakaan
18.3	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	4.320 Box	4.581 Box	4.842 Box	5.183 Box	5.364 Box	5.625 Box	5.625 Box	Dinas Perpustakaan
18.4	Jumlah Arsip Statis yang Dipelihara	97 Box	123 Box	149 Box	175 Box	201 Box	227 Box	227 Box	Dinas Perpustakaan
18.5	Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	65,89	73,36	78,04	83,18	88,32	93,46	93,46	Dinas Perpustakaan
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi perikanan budidaya (ton)	801,45	881,59	969,75	1066,73	1173,40	1290,74	1290,74	Dinas Perikanan
1.2	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	10.891,42	11.218,17	11.554,71	11.901,35	12.258,39	12.626,14	12.626,14	Dinas Perikanan
1.3	Konsumsi ikan masyarakat (Kg/kapita/thn)	16,26	17,07	17,93	18,82	19,76	20,75	20,75	Dinas Perikanan

Paral Hierarki		Paral Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/Bagian Terkait	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____ 2. _____ 3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Peningkatan Produksi benih ikan (ekor)	1.480.000	1.628.000	1.790.800	1.969.880	2.166.868	2.383.555	2.383.555	Dinas Perikanan
1.5	Produksi hasil olahan perikanan (ton)	1.398,28	1.468,20	1.541,61	1.618,69	1.699,62	1.784,60	1.784,60	Dinas Perikanan
1.6	Cakupan masyarakat perikanan yang mandiri (orang)	4.514,00	4.739,70	4.976,69	5.225,52	5.486,80	5.761,13	5.761,13	Dinas Perikanan
2	Pariwisata								
2.1	Jumlah Kunjungan wisata	1.556.000	1.750.000	2.000.000	2.300.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.2	Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata	6.500.000.000	10.035.700.000	12.042.680.000	14.451.225.000	16.681.900.000	21.108.880.000	20.108.880.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	33	42	53	58	63	67	67	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.4	Persentase pengelolaan destinasi wisata di Kab Pacitan	25	44	50	55	60	63	63	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Pertanian								
3.1	Produktifitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/ha)	54,57	54,59	54,73	54,86	54,91	55,00	55,00	Dinas Pertanian
3.2	Persentase kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	2,24	2,17	2,12	2,08	2,03	1,98	1,98	Dinas Pertanian
3.3	Persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,59	2,50	2,45	2,40	2,34	2,28	2,28	Dinas Pertanian
3.4	Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	13,03	12,62	12,37	12,10	11,81	11,51	11,51	Dinas Pertanian
3.5	Persentase kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	2,53	2,45	2,40	2,34	2,29	2,23	2,23	Dinas Pertanian
3.6	Persentase kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	2,88	2,79	2,74	2,68	2,61	2,55	2,55	Dinas Pertanian
3.7	Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Penrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	KABUPEDA	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8	Peringkatan Pendapatan Petani Kebun (capaian rata-rata Rp/KK/Tahun)	352.588.353.800	360.166.004.414	370.743.655.028	381.321.305.642	391.321.305.642	400.321.305.642	400.321.305.642	Dinas Pertanian
3.9	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	26.534	26.733	26.866	27.005	27.140	27.275	27.275	Dinas Pertanian
3.10	Persentase peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20	7,20	Dinas Pertanian
3.11	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	18	21	24	27	30	33	33	Dinas Pertanian
3.12	Produktifitas Tanaman Pangan per hektar padi dan palawija (kw/ha)	90,61	90,72	90,84	90,95	91,02	91,09	91,09	Dinas Pertanian
3.13	Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija (Ton)	885.114	886.251	887.408	888.455	889.162	889.804	889.804	Dinas Pertanian
3.14	Produksi Hortikultura (Ton)	65.836	71.434	77.629	84.502	92.145	100.663	100.663	Dinas Pertanian
3.15	Produksi Hasil Perkebunan (Ton)	37.482,087	37.632,085	37.780,100	37.932,100	38.082,150	38.232,087	38.232,087	Dinas Pertanian
3.16	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,75	1,75	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	Dinas Pertanian
3.17	Persentase diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani	7,56	17,43	27,30	37,00	46,70	56,40	56,40	Dinas Pertanian
3.18	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	2,62	2,97	3,05	3,12	3,19	3,26	3,26	Dinas Pertanian
3.19	Cakupan Kelompok Tani yang dilatih Teknologi Perkebunan	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25	Dinas Pertanian
3.20	Produksi daging (kg)	3.247.446	3.315.028	3.383.995	3.454.397	3.526.263	3.599.625	3.599.625	Dinas Pertanian
3.21	Produksi telur (kg)	498.000	508.361	518.937	529.733	540.754	552.004	552.004	Dinas Pertanian
3.22	Produksi susu (litr)	21.600	22.049	22.508	22.976	23.454	23.942	23.942	Dinas Pertanian
3.23	Populasi Ternak Potong Besar (ekor)	85.399	87.176	88.990	90.841	92.731	94.660	94.660	Dinas Pertanian

Parat Hierarki		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Asisten	<i>[Signature]</i>	1. _____	
Kabag	<i>[Signature]</i>	2. _____	
Kabup	<i>[Signature]</i>	3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPIMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.24	Populasi Ternak Potong Kecil (Ekor)	171.213	174.775	178.411	182.123	185.912	189.780	189.780	Dinas Pertanian
3.25	Populasi Unggas (Ekor)	1.111.778	1.134.908	1.158.519	1.182.621	1.207.225	1.232.341	1.232.341	Dinas Pertanian
3.26	Persentase status kesehatan ternak	87,5	87,7	88	88	88	89	89	Dinas Pertanian
3.27	Persentase diseminasi teknologi peternakan pada peternak	0,84	1,24	1,64	2,04	2,44	2,84	2,84	Dinas Pertanian
3.28	Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan	0	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	Dinas Pertanian
3.29	Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau	6,80	5	5	5	5	5	5	Dinas Pertanian
4	Energi dan Sumber Daya Mineral								
4.1	Persentase permohonan izin energi dan sumber daya mineral yang dilayani	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Perdagangan								
5.1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	1.872.265,70	2.328.009,05	2.593.701,86	2.889.602,80	3.219.245,28	3.586.492,40	3.586.492,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.2	Persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	12,5	13,75	15	16,25	17,5	18,75	18,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.4	Omset penjualan komoditas unggulan	711 M	753 M	795 M	837 M	879 M	921 M	921 M	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.5	Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	80,25	82,5	84	85	86	87	87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.6	Persentase Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	0,21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa	
Asisten		BAPPEDA	
Kabag Hukum		SKPD/Bagian Terkait	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Perindustrian								
7.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,68	6,86	6,98	7,11	7,24	7,38	7,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.2	Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	80,34	81,25	81,74	81,93	82,07	82,21	82,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	3,95	4,1	4,26	4,41	4,56	4,71	4,71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.4	Jumlah Industri Kecil menengah dan kerajinan	11,347	11.597	11.857	12,127	12,407	12,697	12,697	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.5	Persentase Pertumbuhan Industri	3,9	2,20	2,24	2,27	2,30	2,33	2,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Ketransmigrasian								
8.1	Persentase transmigran swakarsa	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8.2	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Bappeda
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Bappeda
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Bappeda

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabaa Nukun	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i> BAPPEDA
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
1.6	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	35,56	52,94	64,71	76,47	88,24	100	100	Bappeda
1.7	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan	38,98	59,32	69,49	79,66	89,83	100	100	Bappeda
1.8	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	26,67	46,67	60,00	73,33	86,67	100	100	Bappeda
1.9	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	50,70	66,20	74,65	83,10	91,55	100	100	Bappeda
2	Keuangan								
2.1	Opini Audit BPK terhadap Laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.2	Persentase barang/ aset daerah yang teregistrasi	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.3	Cakupan pendapatan daerah	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
3.1	Persentase aparatur yang mengikuti diklat	18,56	25,39	52,84	68,52	84,26	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Unsur/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur	8,79	20,00	40,00	60,00	80,00	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3.3	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	19,46	33,87	51,34	67,25	83,61	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan	95	95	95	95	96	96	96	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Pemerintahan Umum								
5.1	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	35,67	47,37	53,22	59,06	64,91	70,76	70,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.3	Sistem Informasi Manajemen Pemda	3	3	11	17	21	25	25	Sekretariat Daerah
5.4	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5.5	Persentase PD yang menerapkan SOP	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5.6	Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5.7	Persentase kebijakan pemerintahan umum yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5.8	Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	Sekretariat Daerah

Part Hierarchy		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Sekda	<i>[Signature]</i>	BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.9	Persentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10,53	26,32	42,11	63,16	84,21	100	100	Sekretariat Daerah
5.10	Persentase tertib administrasi pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5.11	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP	40	60	70	80	90	100	100	Sekretariat Daerah
5.12	Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani	40	60	70	80	90	100	100	Sekretariat Daerah
5.13	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang diterbitkan	18,92	45,95	59,46	72,97	86,49	100	100	Sekretariat Daerah
5.14	Persentase kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan	14,29	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100	Sekretariat Daerah
5.15	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	14,29	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100	Sekretariat Daerah
5.16	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
5.17	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	45,57	63,72	72,79	81,86	90,93	100	100	Sekretariat Daerah
5.18	Keterpaduan program pemerintah	140 kali	200 kali	225 kali	240 kali	245 kali	250 kali	250 kali	Sekretariat Daerah
5.19	Persentase penyampaian informasi tentang cukai kepada masyarakat dan/ pemangku kepentingan	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5.20	Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan :								Inspektorat
	- Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT	100	100	100	100	100	100	100	
	- Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90,16	90,50	91	91,50	92	92,50	92,50	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		BAPPEDA	
Kabag Hukum		SKPD/ Bagian Terkait:	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Unsur/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.21	Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan	42,50	45	47,50	50	52,50	55	55	Inspektorat
5.22	Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun	87,50	22	55,5	77,7	88,8	100	100	Inspektorat
5.23	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
5.24	Persentase raperda yang ditetapkan bersama	58,62	72,41	79,31	86,21	93,10	100	100	Sekretariat DPRD
5.25	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol
5.26	Persentase penduduk yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	1,95	5,84	7,79	9,74	11,69	13,63	13,63	Badan Kesbangpol
5.27	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	B	B	B	B	B	Sekretariat Daerah
5.28	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Yang Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Fokus Kemampuan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	641,12	671,40	639,69	643,82	647,98	652,17	652,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	1.372.651	1.464.155,20	1.366.551,11	1.375.382,01	1.384.269,98	1.393.215,38	1.393.215,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pertanian								
2.1	Nilai tukar petani	103,53	104,87	105,55	106,23	106,92	107,61	107,61	Bappeda

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda <i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA <i>[Signature]</i>
Asisten <i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag <i>[Signature]</i>	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Perhubungan								
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	39,82	40,61	41,43	42,25	43,1	43,96	43,96	Dinas Perhubungan
1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	10.874.146	11.146.000	11.480.380	11.709.987	11.944.187	12.242.792	12.242.792	Dinas Perhubungan
2	Penataan Ruang								
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	87,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2.	Luas wilayah produktif	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3	Luas wilayah industri	17,01	21,36	23,93	26,81	30,04	33,66	33,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.4	Luas wilayah banjir	7,38	7,33	7,28	7,23	7,18	7,13	7,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.5	Luas wilayah kekeringan	19,05	18,03	17,54	17,07	16,60	16,15	16,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.6	Luas wilayah perkotaan	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	10	11	12	13	13	14	14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	3	4	4	5	5	6	6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RFJMD (2021)	Perangkat Daerah
		2015	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	21	23	26	29	33	37	37	Badan Pendapatan Daerah
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	29	30	31	31	32	33	33	Badan Pendapatan Daerah
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Angka kriminalitas	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	SATPOL PP
1.2	Jumlah demo	7	5	4	4	3	3	3	SATPOL PP
1.3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Daerah
1.4	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.5	Lama proses izin usaha Penanaman Modal (hari kerja)	5	5	5	4	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.6	Jumlah Perda / Perbup dan kebijakan yang mendukung iklim investasi	4	4	5	6	6	6	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	552	563	574	585	596	607	607	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2	Rasio ketergantungan	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan salah satu agenda yaitu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan Tahun 2021, selain masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Hal ini untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur.




10.2. Kaidah Pelaksanaan


Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 ini dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, RPJMD dan Renstra perangkat daerah akan dijabarkan kedalam RKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan tahunan. Selanjutnya RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Setiap perangkat daerah di Kabupaten Pacitan berkewajiban untuk menyusun Renstra perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021. Bila ada penetapan perangkat daerah yang baru setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, maka akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. RPJMD merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap penjabaran RPJMD ke

dalam Renstra perangkat daerah;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	
SKPD/Bagian Terkait:	
1 _____	
2 _____	
3 _____	

3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sampai dengan 2021;
4. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pacitan. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama 5 (lima) tahun. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD;
6. Bupati Pacitan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
7. DPRD Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sampai dengan 2021;
4. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pacitan. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama 5 (lima) tahun. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD;
6. Bupati Pacitan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
7. DPRD Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO